

# **Partai Islam *No*, Politik Islam *Yes***

*Esai-Esai Pergulatan Islam Politik*

Penulis

**Faisal Riza**

Editor

**Surya Adi Sahfutra**

**Kata Pengantar Penulis**  
**Kata Pengantar Editor**  
**Sambutan Guru Besar Ilmu Politik USU**  
**Sambutan Guru Besar Politik Islam UIN SU Medan**  
**Sambutan Rektor UIN Sumatera Utara Medan**

**Prolog:**

## **BAB 1: Pergulatan Islam Politik**

- a. Partai Islam *No*, Politik Islam *Yes*
- b. Masa Depan PPP di Sumut
- c. Umat Islam Dalam Sandiwara Politik
- d. Umat Islam Dalam Jebakan Oligarkis
- e. Ulama, Umat, dan Realitas Kontemporer
- f. Celah Sejarah Alwashliyah
- g. Pudarnya Etika Publik

## **BAB II: Dilema Politik Islam**

1. Kekalahan Parpol Islam di Pemilu 2009
2. Absennya Tokoh Islam di Pilpres 2009
3. 2014, Mana Tahan?
4. Meninjau Koalisi Hijau
5. Banyak Parpol Untuk Siapa?
6. Benah-benah Partai Ka'bah
7. Al-Washliyah, Dakwah dan Siyasa

## **BAB III: Desentralisasi Politik**

1. Anomali Otonomi
2. Demokrasi di Sumut dalam Sorotan
3. Tata Ruang Politik Kita

4. Gatot Pujo Nugroho dan Mitos Kepemimpinan Jawa
5. Risalah Untuk Pak Gubernur Sumut
6. Berebut Kuasa di Tanah Emas

#### **BAB IV: Krisis Mandat**

1. Posisi Tawar ala Rakyat
2. Merawat Daulat Rakyat
3. *Iming-iming buat Pening*
4. *Gelagat Kandidat Merakyat*
5. Pemuda Emoh Politik

#### **BAB V: Politik Narsisme**

1. Narsisme Pemimpin vs Apatisme Rakyat
2. Gombalisme di Altar Demokrasi
3. Kepemimpinan Modal, Gombal, atau Moral?
4. Balada Negeri Paralogy
5. Refleksi Kebangkitan Nasional: Apanya Yang Bangkit?
6. Nasib Angelina Nasib Bunga

Epilog:

Daftar indeks

Daftar bacaan

## **BAB I**

### **PERGULATAN ISLAM POLITIK**

#### **A. Partai Islam *No*, Politik Islam *Yes***

Islam memainkan peran penting dalam politik di Indonesia. Sebagai Negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan. Namun, perolehan suara partai-partai Islam cenderung mengalami penurunan sejak pemilu pertama kali pada tahun 1955. Apakah hal ini merupakan indikator menurunnya politik Islam? Atau Islam sudah tidak dianggap penting lagi dalam kehidupan politik di Indonesia? Apakah penyatuan atau koalisi partai Islam menjadi gagasan yang relevan?

#### **Irrelevansi Islam?**

Salah satu parameter yang menjelaskan eksistensi sebuah partai politik adalah seberapa besar dukungan yang diraihnya dalam pemilu. Jika partai tersebut meraih dukungan yang besar, maka dapat dikatakan pula partai tersebut memiliki eksistensi yang besar di masyarakat. Sebaliknya, jika dukungan

yang didapatkan kecil, maka eksistensi partai dipertanyakan. Bagi partai besar, raihan dukungan suara yang besar disebabkan partai tersebut memiliki potensi yang besar, bergerak dengan potensi tersebut untuk menghimpun dukungan dari rakyat sebanyak-banyaknya. Demikian halnya, bagi partai kecil, raihan dukungan yang kecil dalam pemilu menandakan partai tersebut hanya memiliki potensi yang kecil dan seadanya.

Sejarah memberikan pemahaman bahwa partai Islam terus menerus mengalami kekalahan dari pemilu ke pemilu. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah kaum muslim di Indonesia yang disebut-sebut sebagai mayoritas. Ada beberapa analisa dalam mencermati *trend* turunnya perolehan suara partai-partai Islam dalam sejarah pemilu di Indonesia sejak pemilu 1955 hingga pemilu yang paling terakhir, 2009.

*Pertama*, Saiful Mujani memandang, fenomena tersebut membuktikan Islam tidak lagi menjadi faktor penting dalam politik di Indonesia. Ketaatan umat Islam dalam beragama tidak secara serta-merta sejalan dengan pilihan politik. Faktanya, partai-partai Islam tidak pernah memperoleh suara lebih dari 44%. Partai-partai nasionalis lebih diterima karena mempunyai program-program yang riil. Pemilih sudah lebih “rasional” dalam menentukan pilihan partai politik.

Pandangan berbeda diajukan oleh Sunny Tanuwijaya, peneliti CSIS. Sunny mengatakan memang perolehan suara partai-partai Islam sejak Pemilu 1955 mengalami penurunan (44 % pada Pemilu 1955, 36,3% pada Pemilu 1999, 41 % pada Pemilu 2004 dan 29,2 % pada Pemilu 2009), tetapi hal tersebut tidak berarti kekalahan politik Islam, sebab politik Islam tetap memainkan peran penting dalam persaingan perolehan suara dalam pemilu. Turunnya perolehan suara partai-partai Islam tidak menyurutkan perhatian publik terhadap isu-isu politik Islam. Patut dipertimbangkan bahwa faktanya partai-partai nasionalis-sekuler memberikan perhatian yang relatif besar terhadap isu-isu keislaman atau politik Islam, seperti UU Pendidikan Nasional, UU Anti-Pornografi, Larangan aktivitas Ahmadiyah, dan formalisasi Syariat Islam. Selain itu, partai nasionalis-sekuler juga memiliki organisasi sayap yang bekerja untuk meraih dukungan dari kaum muslim. Sebut saja, Partai Demokrat punya Majelis zikir SBY, Golkar punya pengajian al-Hidayah, PDIP punya Baitul Muslimin Indonesia.

Rasionalitas pemilih juga tidak bisa disederhanakan pada persoalan identitas keagamaan semata. Rasionalitas sebenarnya didasarkan pada sejauhmana pemilih mampu memahami kualitas partai politik dan kandidat. Termasuk apa saja program-program kerakyatan yang ditawarkan oleh partai

politik dan kandidat. Jadi, menentukan rasionalitas pemilih bukan berdasarkan pilihan terhadap partai yang berbasis agama, tetapi kepada partai yang mengusung agenda-agenda yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat.

Meski begitu, agama tetap menempati derajat faktor penting dalam kehidupan politik di Indonesia. Yang patut juga dicermati bahwa kalangan menengah di perkotaan, yang umumnya berusia muda, kaum profesional dan *well-educated*, bukan saja mereka semakin modern kehidupannya tetapi sekaligus semakin taat beragama, setidaknya indikator ibadah wajib bisa digunakan di sini.

Laporan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) mengkonfirmasi bahwa keberagamaan dan kesalehan merupakan potret dari kecenderungan masyarakat yang semakin konservatif dalam menyikapi isu-isu politik Islam. Pada tahun 2001, 57.8% dan tahun 2002, 67% setuju dengan formalisasi Syariat Islam. Hasil ini membuktikan, meski pun dukungan terhadap partai-partai Islam tidak besar, tapi dukungan publik terhadap isu-isu politik Islam masih besar. Islam masih menjadi isu politik yang paling mudah untuk menarik simpati pemilih. Di sini dapat dipahami, turunnya

perolehan suara partai-partai Islam tidak menurunkan perhatian partai-partai nasionalis terhadap isu-isu keislaman.

*Ketiga*, pergeseran sikap politik partai-partai nasionalis. Partai Golkar dan Partai Demokrat yang selama ini dikenal sebagai partai nasional-sekular, justru dalam beberapa isu mutakhir cenderung mengakomodasi aspirasi kalangan konservatif, serta melakukan penetrasi terhadap konstituen partai-partai berbasis Islam. Hal tersebut terjadi, karena pemilih masih sangat konservatif. Pada tahun 2009, CSIS melakukan *survey* untuk mendeteksi sejauhmana tingkat konservatisme dalam masyarakat. Hasilnya, 70% responden menyetujui pembubaran Ahmadiyah dan UU Anti-Pornografi.

Fakta ini membuktikan, meskipun *public* memberikan dukungan terhadap Pancasila dan UUD 1945, tetapi jika dielaborasi dalam isu-isu riil yang berkaitan dengan sentimen keagamaan, maka realitasnya akan mengalami perubahan signifikan. Dengan demikian, keberagaman, kesalehan dan konservatisme di Indonesia mengalami peningkatan. Rakyat Indonesia semakin toleran terhadap intoleransi dan tindakan anti-pluralisme. Menguatnya konservatisme juga ditandai oleh sikap konservatif partai-partai nasionalis-sekuler.



Riset The Asia Foundation melaporkan bahwa ada 74 daerah yang mempunyai Peraturan Daerah bernuansa Syariat. Sekitar 42 daerah dari 74 daerah yang memberlakukan Perda bernuansa Syariat Islam adalah daerah yang dipimpin oleh partai-partai nasionalis dengan perolehan suara di atas 50%. Sedangkan 72 dari 74 daerah adalah hasil koalisi dengan partai-partai Islam yang beraliran nasionalis, seperti PAN dan PKB. Sedangkan pada level nasional, partai-partai nasionalis kerap bekerjasama dengan partai-partai Islam untuk menggolkan UU Pendidikan Nasional dan UU Anti-Pornografi. Begitu halnya sikap terhadap Ahmadiyah, sikap partai-partai nasionalis-sekular hampir tidak bisa dibedakan dengan sikap partai-partai Islam.

*Keempat*, kategorisasi partai Islam dan partai nasionalis-sekular tidak relevan lagi. Menurut Anis Baswedan, setidaknya ada empat kategori partai politik di Indonesia, yaitu sekular-eksklusif, sekular-inklusif, Islam-inklusif, dan Islam-eksklusif. Partai-partai yang selama ini dikenal sebagai “nasionalis-sekular”, tapi dalam realitasnya justru menjadi pengusung isu-isu keislaman. Sebaliknya, partai Islam justru lebih cenderung ke tengah, terbuka sepenuhnya sebagaimana ciri partai nasionalis dengan isu-isu kebangsaan.

Sekali lagi, menurunnya perolehan suara partai-partai Islam tidak disebabkan surutnya politik Islam. Justru, fenomena tersebut dapat dimaklumi, karena partai-partai nasionalis-sekular juga mengusung isu-isu politik Islam, seperti formalisasi Syariat Islam, UU Anti-Pornografi, Pelarangan Ahmadiyah dan lain-lain. Politik Islam mengalami intensifikasi yang sangat luar biasa dengan meningkatkan kesalehan dan konservatisme di tengah-tengah masyarakat.

Pertimbangkan juga untuk menghitung gerakan sosial Islam yang dikembangkan oleh organisasi Islam sejak masa penjajahan. Sebab, organisasi inilah yang merupakan gerakan riil politik Islam, Muhammadiyah, NU, Al-Washliyah, Persis dan sebagainya. Partai Islam hanya digunakan untuk kebutuhan praktis pemilu, dan tidak benar-benar secara institusional memperjuangkan agenda keislaman. Jadi, jika pun partai Islam kalah dan harus keluar dari arena pemilu, hal itu tidak berarti politik Islam mati.

## **B. Masa Depan PPP di Sumut**

Sejak mengalami penurunan suara secara drastis dan dramatis pada pemilu 2009 lalu, kegelisahan selalu menghantui hari-hari kader PPP. Setidaknya suasana batin itu terlihat dari diskusi-diskusi politik dari pusat sampai daerah. Satu hal yang sedang menyelimuti pikiran-pikiran kader partai berlambang ka'bah ini adalah apa sesungguhnya yang terjadi pada partai mereka? Kegagalan barangkali semakin bertambah manakala mereka membayangkan bagaimana kaburnya masa depan PPP. Lantas, apa yang dapat dilakukan dalam merekayasa kegemilangan pada hari-hari politik, khususnya Pemilu 2014?

Secara sederhana, partai dapat dikatakan besar atau kecil tergantung pada seberapa besar raihan suara dukungan terhadapnya. PPP merupakan partai yang matang dalam segi sejarah dan eksistensi di kancah politik nasional, terutama sejak Orde Baru. Namun, dibandingkan rekan seumurannya seperti Golkar dan PDI (PDIP), PPP lebih dahulu bernasib miris. Padahal di masa Orde Baru PPP selalu menempati urutan ke-2 setelah Golkar. *Trend* penurunan suara dari Pemilu ke Pemilu

merupakan fakta tak terbantahkan. Di sinilah persoalannya, pasca reformasi, eksistensi PPP semakin terancam. Bahkan pemilu paling tragis bagi PPP adalah pemilu 2009 yang mengkonfirmasi raihan suara yang turun drastis 5,38%. Padahal pada Pemilu 2004, mereka meraih sekitar 8,15%.

Kegalauan berikutnya adalah soal ideologi. Sistem kepartaian modern tetaplah mengisyaratkan ideologi yang mapan sekaligus mengharuskan hadirnya anasir modernitas seperti perencanaan dan manajemen yang rasional dan kalkulatif. Modernisasi politik inilah yang gagal diikuti oleh PPP. Karena hanya mengandalkan “lagu lama”, PPP tampak hanya mengamalkan pendekatan emosional, bukan rasional. Modernisasi politik mengandalkan institusionalisasi kepartaian yang kuat. Mulai dari ideologisasi yang kuat, sistem perkaderan yang mapan dan ketat, sampai pada institusionalisasi program-program terukur yang populis.

Ada beberapa jargon derivasi ideologi yang selalu dikumandangkan partai Islam, seperti; *izzul Islam wa almuslimin*, menegakkan syariah, persatuan Islam, kebangkitan Islam. Jargon-jargon ini, selain keusangannya kini, sejak dulu memang *absurd*, tidak dapat diukur dan dievaluasi. Jargon itu lebih mirip mantra-mantra yang menghipnotis para pemilih.

Setelah siuman, mereka justru tidak mendapatkan anugerah kebaikan politik apapun.

Umat Islam sebagai pasar politik terbesar di negeri ini adalah primadona bagi partai politik. Tidak hanya bagi partai Islam, tetapi semua partai sadar betul dengan keadaan ini. Masing-masing memperebutkan suara umat dengan beragam strategi. Misalnya, Partai Demokrat punya Majelis Zikir SBY, Golkar punya pengajian Hidayatullah, PDIP punya Baitul Muslimin. Semua ini merupakan organisasi sayap partai yang ditujukan untuk meraup suara dari umat Islam dengan pendekatan yang sama; *emotional approach*. Sementara untuk pasar non ideologis atau *swing voters*, partai sekuler lebih baik dalam menggalang dan mendapatkan simpati ketimbang PPP. Kondisi ini menegaskan bahwa umat Islam tidak hanya di PPP, dan PPP bukanlah satu-satunya parpol milik umat Islam.

Jika varian Islam moderat-Islam tradisional digunakan sebagai analisis, komposisi PPP sebenarnya mencukupi dan mengakomodasi dua varian tersebut. Karena sejarah fusi partai-partai Islam ke dalam PPP termasuk di dalamnya poros moderat (Parmusi) dan tradisional (NU). Tetapi poros-poros ini menunjukkan kerawanan dan ketegangan konflik hingga kini. Sekarang, praktis terlihat PPP hanya mendapatkan tempat yang

masih cukup baik pada Islam tradisional, di desa, dalam komunitas agraris, dan berbasis pesantren. Tetapi, kerumitannya, Islam tradisional sebagai pasar politik juga sangat ramai yang memperebutkannya, hampir seluruh partai. Sekarang, penetrasi PPP ke pasar Islam moderat kalah bersaing dengan PKS yang memang dikenal sebagai partai “Islam kota”. Suara PPP di kota-kota besar nyaris kehilangan signifikansi. Baik di Jakarta maupun Medan. Sampai di sini dapat diketahui bahwa pasar politik PPP benar-benar terbatas.

### **PPP di Sumut**

Secara optimis dan apresiatif, dibandingkan raihan suara di provinsi lain, saya ingin mengatakan bahwa raihan suara PPP di Sumut pada pemilu 2009 masih bisa diharapkan. Tetapi, sekali lagi, jika dibandingkan dengan raihan partai seumurannya, Golkar dan PDIP, tentu raihan PPP itu tidak terlalu menyenangkan.

Sepanjang pemilu di Sumatera Utara, hanya Pemilu 1955 yang tercatat pernah dimenangkan oleh Masyumi. Setelah itu tidak ada satu partai Islam pun di wilayah Sumatera Utara ini yang menguasai peta politik lokal. Sumatera Utara bukanlah milik partai Islam. Ia adalah basis partai sekuler. Golkar di sebagian besar wilayah Pantai Timur, PDIP di Utara; Karo, Toba

Samosir, Simalungun serta Nias. Kawasan Utara ini merupakan mayoritas Kristiani dan pada era Orde Lama merupakan basis PNI dan Parkindo. Kemudian, secara fenomenal di Pemilu 2009, Partai Demokrat hampir menguasai suara di titik-titik yang belum pernah terjadi sebelumnya (2004).

Sementara PPP sejak berdirinya di Sumatera Utara hanya memiliki basis “lumayan” di sebagian wilayah pantai Timur. Agak kuat di Tapsel dan Madina. Karena itu, PPP belum teruji melakukan penetrasi ke daerah yang bukan basis Islam. Mungkin juga mustahil dilakukan. Tak terdengar PPP di wilayah Utara. Di pusat kota Medan, suara PPP menyusup, sementara yang masih signifikan justru di Kabupaten Serdang-Bedagai. PPP masih mempertahankan 5 kursi (1 Fraksi) sejak pemilu 2004. Namun, itupun bukan sebagai partai pemenang pemilu.

### **Reaktualisasi Islam**

Mohamad Hatta pernah menyinggung bahwa politik Islam yang dikembangkan Partai Islam hanya sebagai gincu alias politik gincu. Karena hanya menyentuh wilayah-wilayah simbol formal, bukan substansi. Soekarno pun pernah menyinggung poros Islam formal ini dengan menyatakan dalam *Di Bawah Bendera Revolusi*, 1940; “Islam yang kita catut dari kalam Ilahi

dan sunnah hanya abunya, asapnya, ach...ya abunya untuk celak dan serban. Asapnya untuk sekedar baca Fatimah, bukan apinya yang menyala dari satu zaman ke zaman lainnya.”

Dalam tataran ideologis, sebagai partai Islam tentu saja tetap harus mengawali langkahnya dari sumber nilai-nilai Islam, tepatnya melakukan reaktualisasi Islam. Menghadirkan Islam dalam era kekinian, yang substantif, mudah diterima, dan dinikmati umat. Ini sama dengan mengambil sikap meninggalkan jargon-jargon usang yang tidak terukur alias kabur. Reaktualisasi Islam harus konkrit ditunjukkan melalui *performance* partai yang modern. Termasuk melalui institusionalisasi gagasan, kader-kader, dan figur tokoh yang memimpin partai yang mampu menginternalisasi gagasan reaktualisasi ini. Baik melalui program-program yang populis ataupun melalui langkah yang mudah dinikmati umat. Bagi umat, apalah arti “Islam *rahmatan li al-alamin*”, jika kehidupan sehari-hari mereka mengalami kesulitan mencari rahmat Tuhan. Apalah arti jargon “persatuan Islam”, *izzul Islam wa al-muslimin*, jika para nelayan muslim harus melalui hari-harinya dengan jeratan hutang rentenir di lehernya.

Islam yang mesti dihadirkan di sini adalah Islam transformatif. Islam dalam dimensi transformatif diupayakan dapat



menjembatani ketegangan-ketegangan dari poros-poros kepentingan yang ada di internal tubuh PPP. Karena ide transformatif menuntut pengeralahan segala energi politik untuk kepentingan umat, *al-mashlahah ar-ra'iyah*. Reaktualisasi Islam ke arah transformatif bermakna juga melakukan penetrasi gagasan-gagasan Islam tentang keadilan sosial, sistem ekonomi, hak asasi manusia dan lainnya.

Selain penguatan ideologi dan identitas, langkah taktis dan strategis bagi PPP Sumut sebenarnya dapat dimaksimalkan melalui penguatan pemetaan pasar politik di wilayah pantai Timur Sumatera utara yang mayoritas Islam. Penguatan jejaring politiknya yaitu para kader legislator dan kepala daerah terpilih yang didukung oleh PPP. PPP punya saham besar pada kemenangan pasangan Syamsul-Gatot pada Pilgubsu 2008 dan beberapa kemenangan kepala daerah pada pemilukada musim 2010 lalu. Hanya sejauh mana modal jejaring politik ini bermanfaat bagi PPP pada pemilu 2014, tentu saja konfirmasinya belum terlihat.

### **C. Umat Islam Dalam Sandiwara Politik**

*Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah ditebak. Ada peran wajar dan ada peran yang berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara?*

(Ian Antono God Bless).

Syair yang dibuat dan dipopulerkan oleh musisi Indonesia Ian Antono ada benarnya manakala kita melihat fenomena politik di Sumatera Utara menjelang pemilihan gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2008. Sebagaimana sudah menjadi rutinitas dalam setiap momentum pemilihan, umat Islam karena kekuatan elektoralnya selalu menjadi gula yang diperebutkan oleh semut-semut politik. Namun, dalam sejarahnya, umat Islam tidak pernah merasakan secara nyata apa-apa yang dijanjikan. Umat Islam tetap berada dalam keterbelakangan dan tidak tersejahterakan. Mengapa demikian? Bagaimana dengan pilgubsu yang akan datang ini?

#### **Stupidifikasi Umat**

Setiap menjelang pemilihan kita sering mendengar khutbah para kontestan yang akan mencalonkan diri sebagai pemimpin dan merebut kekuasaan. Mereka sering mengatasnamakan umat

Islam sembari mengklaim diri sebagai manusia paling peduli pada nasib umat. Kedengarannya memang romantik. Apalagi ditambah dengan cerita kejayaan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya, tidaklah sulit bagi umat menentukan dan memantapkan *bargaining position* dengan kekuatan elektoral yang potensial dan dalam suasana demokrasi dimana mayoritas menjadi penentu kebijakan. Umat Islam memang pada prinsipnya dapat menentukan arah kebijakan dan alur sejarah mereka sebagaimana cita politik Islam yakni keadilan dan kesejahteraan.

Benar tesis W. F. Whertheim yang mengemukakan bahwa Indonesia merupakan "*majority with a minority Complex*". Umat Islam itu mayoritas dalam angka namun minoritas dalam penguasaan teknikal. Dengan kata lain mayoritas tersebut adalah umat Islam yang hingga saat ini masih terbelakang. Kekuatan elektoral yang potensial tersebut tidak selalu nyata dan aktual. Keadaan seperti ini dapat dipahami manakala para politisi dan pemimpin-pemimpin Islam hanya melakukan stupidifikasi (pembodohan). Mereka memanipulasi umat dan Islam itu sendiri. Islam mereka sulap menjadi ideologi. Sehingga nilai-nilai Islam yang sesungguhnya bersifat universal dan inklusif itu tercemari kepalsuan.

Pada dataran realitas, ideologi yang dimaksud sering muncul ke permukaan dengan wajah yang garang dan eksklusif. Keadaan ini membuat umat kesulitan berdialog dengan ideologi lain seperti nasionalisme. Padahal, dialog sangat penting dalam rangka membangun peradaban bangsa Indonesia. Ideologi Islam dengan sendirinya menghasilkan kelompok-kelompok yang berbeda sesuai dengan pemahaman penganutnya masing-masing. Maka tidaklah mengherankan umat Islam selalu mengalami perpecahan internal yang panjang dan semi permanen. Inilah fakta keberislaman yang sangat kontra produktif dengan cita politik Islam.

Ironisnya, perpecahan oleh sebagian orang dianggap proyeksi politik yang menjanjikan. Padahal, perpecahan itu memakan waktu, menghabiskan energi, dan merusak pikiran. Umat pun selalu berada dalam keadaan lelah. Sehingga umat tidak akan mampu berpikir kritis dan rasional dalam menghadapi kebijakan-kebijakan politik. Para apologis menyatakan bahwa perbedaan yang terjadi di kalangan umat adalah *sunnatullah*. Jadi, *sunnatullah* yang dahulu satu sekarang beribu-ribu. Lagi, perbedaan sering dianggap rahmat. Saat ini kenyataannya justru terbalik. Perbedaan mirip gejala kiamat.

### **Pemimpin Tidak Kreatif**

Pola-pola manuver, kampanye dan pengenalan tokoh-tokoh yang akan menjadi cagubsu (muslim) mendatang menurut hemat penulis tidaklah jauh berbeda dengan model-model yang terdahulu alias produk daur ulang. Kita dapat menyaksikannya secara nyata melalui media-media yang tersedia. Pendekatan yang dilakukan dalam mendapatkan simpati umat dilakukan dengan mengambil emosi (*emotional approach*) umat Islam. Tiba-tiba menjelang pilgubsu 2008 ini para kontestan menampakkan nilai-nilai filantropi mereka dengan menyumbang banyak masjid, merekrut para ulama dan ustadz, menghadiri pengajian, mengadakan zikir akbar, mendatangi kelompok-kelompok perwiran, dan sejenisnya. Semua itu mengesankan bahwa sang pemimpin adalah orang yang punya komitmen tinggi dan taat kepada Tuhan.

Selain itu, pola pendekatan yang digunakan oleh para cagub dan tim suksesnya adalah *solidarity making*. Mereka menggalang sebanyak-banyaknya orang Islam lewat pertemuan dan acara agama, konsolidasi simpul-simpul umat, dan mendatangi organisasi-organisasi Islam. *Solidarity making* ini sangat berlebihan dan terlalu ditekankan porsinya. Kita dapat melihat ini dengan mudah ketika di media muncul dukungan-dukungan dari orang yang mengaku representasi organisasi Islam. Padahal, itu hanya para elit organisasi itu saja. Boleh

jadi para anggota tidak mengerti betul arti dukungan tersebut. Dari keadaan ini, para elit organisasi maupun elit politik sangat diuntungkan. Dengan kata lain umat Islam hanya dimanfaatkan untuk kepentingan orang-orang tertentu.

Sesungguhnya, gejala seperti ini sangat menyedihkan sekaligus menggembirakan. Kesedihan tampak dari respon umat yang berakar dari kebutaan politik beserta ketidak-mengertian akan konsep, dan program para kontestan secara baik dan mendetail. Motif kehadiran mereka lebih didominasi oleh gejolak emosional yang terkait erat dengan primordialisme ideologis-politis. Kegembiraan ada pada perasaan yang dimiliki umat, perasaan bertanggung jawab dan aktif sebagai partisipan di dalam mendukung mekanisme politik. Dari keadaan ini apakah proses sosialisasi politik terhadap umat sudah berjalan dengan baik? Jawabnya tentu saja belum. Karena kedewasaan politik umat tentu tidak dapat diraih dalam tempo singkat.

Sandiwara politik ini sangat mudah ditebak. Tidak disertakannya umat pada partisipasi aktif untuk mengawal setiap proses sosialisasi politik, tidak adanya pendidikan politik dan pengambilan kebijakan menunjukkan demokrasi tidak berjalan dengan baik. Dengan kata lain tidak ada pendewasaan umat dalam berpolitik menuju arah lebih baik. Setelah

berhasilnya salah satu kontestan meraih kekuasaan, mereka lalu sibuk dengan urusannya. Tinggallah umat menjadi penonton. Sementara itu, realitas kebangsaan tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada perubahan signifikan; pengangguran tetap banyak dan malah bertambah, sembako kian melonjak, anak putus sekolah kian merebak, dan sebagainya.

### **Rasional dan Kritis**

Islam pada prinsipnya merupakan *a liberating force, a liberating religion* atau sebuah agama yang membebaskan manusia. Islam mengandung ajaran transformatif yang membebaskan. Kehadirannya dimaksudkan untuk mengubah masyarakat dari berbagai kesulitan. Dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Itulah yang disebut kesejahteraan. Islam bukan faktor pelengkap yang hanya cukup memberikan terobosan situasional politik, untuk kemudian kembali kepada *status quo*. Seharusnya dari kalangan umat Islam, muncul ijtihad baru. Sepanjang sejarah Islam, ijtihad tersebut telah tertera. Ijtihad, sebagaimana disebut Muhammad Iqbal, merupakan gerak hidup umat Islam. Saat ini, agar umat tidak jumud dan mundur, umat Islam mesti menggelorakan ijtihad.

Mestinya para kontestan dalam pilgubsu 2008 ini tidak usah sibuk melakukan aksi *solidarity making*. Apalagi atas nama

umat Islam. Mereka seharusnya memberdayakan umat lewat sosialisasi politik yang modern, rasional dan realistis. Konkritisasinya dapat diwujudkan dengan program-program yang diandalkan, terukur dan terencana. Dengan ini para kontestan berarti menjadi *problem solver* yang membawa dan menghantarkan umat kepada kesejahteraan dan kemakmuran.

Komunikasi yang dibangun harus bersifat populis dan merakyat bukan bersifat elitis. Demokrasi adalah partisipasi rakyat yang tidak diukur dari banyaknya yang mencoblos ketika pemilihan berlangsung, namun lebih dari itu yakni memberikan kepada rakyat (umat) keluasan ruang berpartisipasi dalam setiap hal yang menyangkut pembangunan. Kemudian, para kontestan dan timnya dapat menciptakan program-program yang lebih baru dan kreatif yang berguna untuk merespon persoalan-persoalan keumatan.

Dalam menanggapi berbagai agitasi politik yang dilancarkan oleh para kontestan, umat dapat mengeluarkan sikap keengganan dan keraguan yang sehat. Keengganan yang dimaksud adalah keengganan yang di dalamnya ada kritik dan rasionalisasi, sehingga tidak muncul sikap membabi buta.

Umat harus berpikir dan bersikap rasional sehingga tidak terjebak pada ikatan primordial “ideologi Islam” yang



sesungguhnya sudah direduksi dan dimanipulasi. Memilih pemimpin yang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas yang bagus, dengan program-program yang langsung nyata dampaknya bagi kemajuan umat Islam. Dengan cara ini kita akan dapat menatap prospek kedewasaan politik dengan tersenyum.

Umat Islam merupakan kesatuan religio-politik untuk membentuk *baldah tayyibah* (negara yang makmur) atau *qaryah tayyibah* (masyarakat yang sejahtera). Konsep-konsep ini merupakan proyeksi dari cita masyarakat muslim mengenai apa yang disebut sebagai *khairu ummah* atau umat terbaik di sebuah negeri yang baik, di bawah ampunan Tuhan. Cita-cita ini membutuhkan perjuangan yang serius, bukan dengan sandiwara. Maka dari itu, berperan wajar dan tidak berpura-pura adalah kesadaran yang baik dan rasionalisasi yang canggih dan inovatif dari setiap muslim; baik pemimpin atau umat menjadi hal yang mutlak sebagai syarat.

## **D. Umat Islam Dalam Jebakan Oligarkis**

(Tanggapan Terhadap Saudara Ahmad Arif, SE, MM)

Sebuah kenyataan pahit ketika tersiar kabar bahwa Koalisi Parpol Islam (KPI) dalam rangka sukseksi Pilgubsu 2008 ini belum-untuk mengatakan tidak akan- menemukan konsensus alias tidak menemukan kata sepakat dalam penentuan calon Islam-Islam yang sejatinya bermaksud mengakomodasi aspirasi umat Islam. Ironi selanjutnya ada dalam tulisan saudara Ahmad Arif (yang dirahmati Allah SWT) dalam artikelnya “*Pilkada Sebagai Ajang Warming Up*” (*Waspada*, Senin, 3 Desember 2007). Sungguh, saudara AA telah meremehkan persoalan. Ia tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan perasaan umat Islam di Sumut yang mendambakan pemimpin ideal dari partai-partai Islam yang dengannya agenda politik Islam dapat terlaksana, setidaknya dalam jangka waktu lima tahun ke depan (2008-2013).

Barangkali saudara AA lupa bahwa Sea Games 2007 yang berlangsung di Thailand sudah pada tahapan pertandingan, bukan pemanasan. Atlit-atlit nasional kita sedang berlaga, berjibaku dengan mengobarkan api patriotisme untuk membela dan mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata

dunia Internasional. Karena itu sangat tidak *elok* dan bijaksana ketika saudara AA menggunakan istilah *warming up*. Ia terkesan salah tempat. Ini penting. Karena, melalui tulisan AA, tampaknya ada yang salah dalam paradigma politik kita. Sehingga aktivitas politik kita mengalami kekeliruan. Semoga saja ini tidak merepresentasikan kondisi psiko-politik seluruh anggota KPI.

### **Hukum Besi Oligarkis**

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, rakyat sangat tergantung kepada pemerintah. Karena itu setiap ada momentum penting seperti pergantian kepemimpinan, pemilu atau pilkada, rakyat sangat mengharapkan adanya angin segar perubahan yang menghantarkan mereka kepada kehidupan yang lebih baik dalam segala aspek. Harapan tersebut bukan sekonyong-konyong hadir di benak rakyat, namun ia terbesit, menggumpal, dan bahkan mengkristal.

Saudara AA (yang dikasihi Allah Swt) mengatakan "...Sementara kebijakan internal parpol sangat berkaitan dengan pusat (DPP), maka tidak serta merta apa yang terjadi di daerah dapat diakomodir oleh pusat. Karena itu, Koalisi Parpol Islam (KPI) menghadapi sedikit kendala teknis. Masing-masing DPP dari anggota KPI sudah menggariskan kebijakan yang

mungkin saja tidak seluruhnya sejalan dengan perkembangan politik regional di Sumut.”

Memang itulah faktanya, hampir semua partai dibentuk “dari atas”, sangat sentralistik dengan struktur hirarkis yang ketat dan dirancang sebagai partai *catch all*. Partai politik adalah instrumen utama demokrasi, tetapi partai tidak bisa menghindar dari apa yang disebut oleh Robert Michel sebagai “hukum besi oligarki”, yakni kecenderungan dominasi (penguasaan) minoritas yang mewakili mayoritas kepentingan rakyat.

Dengan demikian, merupakan suatu kenafian politik telah terjadi, sebagaimana disebut oleh saudara Ahmad Arif, bahwa Koalisi Parpol Islam karena ketergantungannya kepada DPP masing-masing melakukan kesalahan dengan baik, yaitu menafikan apa yang sesungguhnya menjadi aspirasi umat dalam Pilgubusu ini. Setiap organisasi partai menampilkan struktur oligarkis yang didasarkan pada basis demokratis dengan mengakui kedaulatan rakyat yang semu alias negasi terhadap hak politik rakyat. Dari sini dapat dikatakan bahwa struktur oligarkis telah “membunuh” prinsip dasar demokrasi. Beserta itu despotisme tampaknya merupakan keniscayaan.

Dalam kasus konflik kepentingan di tubuh KPI, dapat dijelaskan sebab yang menjadi kecenderungan dalam konteks

hubungan antara partai politik dan massa. *Pertama*, oligarki dari segi organisasi partai. Partai politik merupakan organisasi yang dibentuk untuk mewadahi kepentingan dan mencapai tujuan bersama, tetapi para aktor yang membentuk dan menjadi anggota partai mau tidak mau harus merelakan hilangnya kebebasan beraspirasi rakyat demi kepentingan oknum tertentu dalam organisasi.

Partai akan membatasi dan mengendalikan kebebasan maupun kepentingan individual para anggotanya. Partai sebagai suatu entitas tidak selalu identik dengan totalitas anggotanya dan elemen masyarakat yang membentuk partai itu. Kenyataan bahwa partai telah merumuskan tujuannya secara pasti serta dibekali cara-cara dan kepentingan-kepentingan yang menyebabkan secara teleologis partai terpisah dari elemen masyarakat yang mewakilinya. Kepentingan massa yang menyatukan mereka dalam sebuah partai tidak mungkin selalu bersesuaian dengan kepentingan birokrasi-prosedural meski para politisi partai terlibat di dalamnya.

*Kedua*, oligarki dalam kepemimpinan partai. Partai selalu membutuhkan pemimpin, maka dari itu partai-partai yang tergabung dalam KPI berkompetisi untuk mempertahankan, menempatkan bahkan memaksakan kadernya sebagai

pemimpin (cagub dan cawagub). Inilah fakta yang terjadi di dalam KPI, masing-masing menginginkan kadernya menjadi cagub-cawagub. Libido kekuasaan, meminjam istilah Sigmund Frued, inilah yang disebut Mitchel sebagai penyebab utama berlakunya hukum besi oligarki. Pemimpin partai (ataupun DPP) selalu mengendalikan keputusan partai maupun anggotanya, melakukan penyeleksian kandidat (termasuk dirinya sendiri) yang akan dipromosikan.

*Ketiga*, oligarki dalam konteks hubungan partai politik dengan rakyat. Partai (Islam) tidak pernah menempatkan warga negara (umat) sebagai entitas yang beradab dan mempunyai hak-hak politik yang harus dijunjung tinggi dan dihormati. Dalam konteks ini kiprah parpol Islam seolah tidak mencerminkan secara substansial ideologi yang diusung. Ideologi tersebut hanya dipergunakan untuk menciptakan hubungan emosional dengan umat. Tidak lebih. Ideologi tersebut lebih berupa pragmatism untuk memburu kekuasaan dan kekayaan. Sikap mereka dalam merespon hal tersebut sama seperti kaum kapitalis yang menempatkan warga masyarakat sebagai konsumen demi keuntungan mereka sebanyak-banyaknya. Para politisi partai selalu memanipulasi massa demi kepentingan mereka, yaitu untuk meraih kekuasaan dan kekayaan.

Selanjutnya saudara AA mengatakan “even pilkada inilah yang menjadi semacam pelatihan untuk dapat mengambil sikap yang lebih tepat dalam even yang lebih besar seperti pilpres tahun 2009”. Kita tahu, dalam sejarah Indonesia ada dua hal penting menyangkut wacana Islam dan politik yang mandiri dan independent. *Pertama*, Islam dimanfaatkan, ditunggangi, dan dipolitisasi oleh orang dan kekuatan tertentu. *Kedua*, bisa juga Islam dijadikan komoditas murahan untuk memikat dan mengelabui publik Islam oleh banyak partai politik Islam sebagaimana marak terjadi setiap kali akan berlangsungnya pemilihan umum dan saat menjelang pilgubsu 2008 kali ini.

Disinilah kita patut curiga terhadap gairah ekspresi parpol Islam yang sedemikian besar. Terutama pada masa-masa konsolidasi menjelang pilgubsu ini dalam bentuk koalisi Parpol Islam (KPI). Apakah itu benar-benar merupakan perwujudan dari hadirnya kembali politik Islam, atau sekedar “repolitisasi Islam”?

Tulisan ini dibuat di tengah kasak-kusuk elit politik dan ketidakpastian nasib umat di dalamnya. Sesungguhnya, perubahan tidak sulit diprediksi bagi orang-orang yang dalam dan luas pengetahuannya, ia seperti matematika sosial yang tentu saja keakuratannya bersifat relatif namun tetap dapat

dipertanggung-jawabkan. Meski demikian, perubahan membutuhkan waktu yang lama. Proses demokratisasi yang baik yang dianggap sebagai jalan menuju kebaikan bersama memang butuh waktu yang tidak singkat. Ia menuntut keseriusan dari pelakunya dan terutama dari para elit politik, yaitu berupa kemauan politik yang canggih dan modern-rasional. Namun, jika setiap momen demokrasi akbar seperti Pilgubsu 2008 ini masih disebut sebagai ajang pemanasan, tentu kita membutuhkan waktu yang lebih lama dan energi yang lebih ekstra untuk itu.

Lalu, dalam kesementaran itu, siapa yang menahankan derita kelaparan rakyat miskin? Bagaimana pula banyak pengangguran bisa bangun dari mimpinya untuk mendapatkan pekerjaan? Kapan para pelajar mendapatkan pendidikan yang layak dan gratis?



## **E. Ulama, Umat, dan Realitas Kontemporer**

Ada fenomena keislaman di Medan kontemporer yang menguak beberapa problematika kompleks. Islam berhadapan dengan pembangunan ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Apa yang tampak nyata di permukaan adalah ketidakberdayaan umat dalam menghadapi gelombang pembangunan pusat pertokoan dan perbelanjaan yang membuat masjid-mesjid harus dirubuhkan. Ironisnya, para umara dan ulama tampak baik-baik saja. Malah, mereka terkesan tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan mereka tampak memperparah keadaan. Apa yang salah? Peran apa yang harus diambil oleh ulama dan umara dalam konteks pembangunan ini?

### **Ulama: untuk umat atau dirinya?**

Kata ulama merupakan bentuk jamak dari '*alim*', artinya yang tahu, atau yang mempunyai pengetahuan (Q.S. Fathir/35:28). Ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan agama (Q.S. As-Syu'ara/26:196-197), mewarisi tugas nabi yaitu *tabligh* (Q.S. Al-Maidah/5: 67), *tabyin* (Q.S. An-Nahl/16:44), *tahkim* atau memutuskan persoalan manusia (Q.S. Al-Baqarah/2:213),

dan uswah dan teladan (Q.S. Al-ahzab/33:21). Singkatnya, ulama merupakan orang yang ahli dalam ilmu agama Islam. Dengan ilmu pengetahuannya, mereka memiliki rasa takwa, takut, dan tunduk kepada Allah SWT. Ulama juga memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah SWT baik yang *kauniyyah* maupun *quraniyah*.

Karena begitu khasnya posisi ulama di dalam Islam, maka tidak sulit bagi kita memahami kenapa ulama sangat dihormati. Para ulama juga memiliki pengaruh besar. Sehingga umat dengan suka-rela mewakafkan loyalitasnya untuk mereka. Dalam konfigurasi sosial-kebudayaan, ulama juga dianggap sebagai *cultural broker* (broker kebudayaan). Ulama adalah yang mampu memberikan filterasi atau saringan realitas sosial kebudayaan dan politik yang berkembang di masyarakat. Signifikansi peran plus loyalitas umat terhadap ulama telah mempertebal pengaruh ulama. Mereka merupa sebagai figur strategis dalam kerjasama sosial. Baik di kalangan penguasa maupun pengusaha. Ulama dibutuhkan untuk mendampingi dan mengarahkan umat dalam menghadapi kompleksitas dinamika kehidupan.

Namun, pengaruh, Kharisma, serta loyalitas tersebut perlahan redup. Bahkan hilang. Kondisi ini disebabkan setidaknya oleh dua hal. *Pertama*, modernisasi, perkembangan teknologi

informasi, pertumbuhan ekonomi, dan segala bentuk perubahan sosial yang terjadi telah menggeser fungsi dan kedudukan ulama di mata masyarakat. *Kedua*, gagapnya ulama mengantisipasi dan menyikapi perubahan, minimnya keteladanan, dan menipisnya keberpihakan ulama kepada umat. Ulama lewat produk ijtihad dan fatwanya sering tidak senafas dengan masyarakat. Hal itu mengacaukan keadaan. Ini bukan generalisasi. Saya hanya mengamati kecenderungan tersebut yang menggejala di tengah kehidupan kita sekarang.

Figur ulama, ustadz, dan muballigh terjebak dalam selebrasi ekonomi politik yang sarat dengan permainan keuntungan dunia, kemegahan, dan kemewahan. Mereka tidak tahan berada di garis demarkasi perjuangan membela umat yang masih miskin, bodoh, terpinggirkan, tersingkirkan dalam pusaran kapitalisme ekonomi dan politik praktis. Banyak media yang telah memberikan kritik terhadap gejala ini. Sebut saja keterlibatan ulama dalam politik praktis seperti pilkada. Pertimbangkan juga tema-tema sinetron yang lagi *trend* belakangan ini; ustadz *photocopy*, ustadz gadungan, ustadz seleb, dan sejenisnya yang mengumbar kenafian perilaku ustadz. Begitu juga kecenderungan generasi muda yang lebih banyak mengambil informasi tentang Islam di internet sembari

menitipkan doa di jejaring sosial. Gejala ini menunjukkan bahwa ada masalah dalam otoritas Islam.

Tanda utama mengenai adanya masalah dalam otoritas Islam saat ini dapat dilihat dari kasus pembongkaran dan perubahan masjid di kota Medan yang dilegitimasi oleh fatwa-fatwa ulama. Pembahasan mengenai hal itu dapat dibaca dari artikel “Umat krisis Kepercayaan Terhadap Ulama”, (*Waspada*, 5 September 2012, h. A6). Dalam kolom Tajuk Rencana pun, *Waspada* mengkritik Majelis Ulama Indonesia kota Medan soal fatwa yang dianggap merugikan umat Islam. Beberapa bulan lalu *Waspada* merilis Tajuk Rencana “Fatwa Haram jangan Kacangan & Jauhi Pesanan”, *Waspada*, (9 April 2012. h. B4).

Di kota-kota di dunia muslim, ciri kemajuan kebudayaan Islam antara lain adalah menjulangnya bangunan seperti mesjid yang megah sebagai wahana pertemuan umat dalam berbagai hal. Itulah simbol bagaimana Islam membangun peradabannya, itu pula yang dibuktikan oleh nenek moyang kita seperti kesultanan Islam di Sumatera Timur pra kemerdekaan. Sekedar menyebut beberapa contoh yang dekat ada Mesjid Raya Medan Al Mahsun, Mesjid Raya Sulaimaniyah di Perbaungan, Mesjid RayaAzizi di Langkat.

Namun, yang terjadi pada kota Medan belakangan ini adalah gejala memburuknya peradaban Islam dan takluknya moralitas di hadapan kedigdayaan kapitalisme yang menggusur dan menghancurkan Mesjid. Seolah hal ini menjelaskan kepada dunia bahwa kota yang maju itu adalah kota yang banyak rukonya, banyak malnya, dan banyak tempat-tempat hiburan. Modernitas, kapitalisme, dan developmentalisme telah menggeser paradigma pembangunan di bawah supremasi modal kapital. Setiap ruang publik jika mungkin direkayasa untuk kepentingan uang, uang, hanya uang. Ironisnya, peruntukan tersebut dilegitimasi oleh fatwa ulama. Geliat ekonomi kota diukur seberapa banyak orang berbelanja, seberapa penuh mal-mal setiap hari, bukan diukur seberapa banyak infaq masyarakat untuk masjid, seberapa banyak beasiswa pendidikan dari sedekah umat yang dikeluarkan oleh Badan Kemakmuran Mesjid.

Sesungguhnya gejala kemunduran kepemimpinan otoritas Islam (ulama, ustadz, muballigh dan organisasi Islam) ini bukanlah terjadi hanya di Medan saja, tetapi di banyak belahan dunia muslim. Tesis ini saya temukan ketika mengikuti konferensi Internasional “Muslim Religious Authority in Contemporary Asia” di Asia Research Institute, NUS Singapura, November 2011 lalu. Penyebabnya antara lain;

*pertama*, ketidakmampuan ulama dalam melakukan rekonfigurasi dalam perubahan sosial yang pesat. *Kedua*, relasi intim sebagian ulama kepada penguasa dan pengusaha. *Ketiga*, kecenderungan disorientasi, karena orientasi sebagian ulama tidak lagi berbasis pada pembangunan keummatan, tetapi kediriannya sendiri.

Kita tidak hendak menyalahkan siapapun sebab ini merupakan masalah bersama sehingga harus direfleksikan bersama untuk kebaikan bersama. Baik ulama dan umat mesti saling membangun *mutual trust*, hubungan saling percaya yang menguntungkan. Karena masalah keislaman kontemporer justru jauh lebih kompleks ketimbang saling menyesali keadaan satu sama lainnya. Kita harus melakukan rekonfigurasi, pembingkai ulang peran-peran Islam dalam perubahan sosial, menjadi pemain utama dalam pembangunan, bukan menjadi bagian yang tersingkirkan oleh kedigdayaan kapital.

Pertimbangkan juga untuk tetap percaya kepada ulama. Karena sesungguhnya kita masih memiliki banyak ulama, ustadz, muballigh yang masih bisa jadi teladan. Tetapi, mereka luput dari publikasi media. Mereka mungkin tidak populer, tingkat elektabilitas mereka rendah, tidak berada di samping pejabat atau pengusaha konglomerat, tanpa serban dan jubah menjuluri

badan. Mereka berada di pesantren, di masjid, madrasah *kampong*, dan di pelosok-pelosok desa. Mereka tulus membangun untuk umat dan agamanya. Inilah kesempatan umat untuk mencari figur seperti itu.

## **F. Celah Sejarah Alwashliyah**

*Angin Pulang Menyejuk bumi, menepuk teluk mengempas  
emas, lari ke gunung memuncak sunyi, berayun-alun di atas  
alas. (T. Amir Hamzah)*

Itulah kutipan sajak dari penyair agung nan sangat masyhur Tengku Amir Hamzah. Sajak berima yang meski bunyi-bunyinya tidak sama tapi materinya berfungsi saling mengingatkan. Demikian halnya sejarah yang seringkali berima, ia mungkin tidak persis sama terulang, tetapi kejadiannya bisa mengingatkan pelakunya pada peristiwa yang sedang terjadi dan masa depan. Tulisan ini ingin mengurai rima-rima sejarah Alwashliyah yang berkaitan erat dengan politik praktis. Bagaimana Alwashliyah membaca sejarahnya sendiri dan adakah celah Alwashliyah untuk memimpin Sumut di masa depan?

## **Rima Alwashliyah**



Alwashliyah merupakan organisasi yang menganut I'tikad (keimanan) Ahlussunnah wal Jamaah, mengakui pemikiran fikih empat mazhab, tetapi menekankan pada mazhab Syafii. Banyak pengikutnya menganut Tarekat Naqsyabandiyah. Alwashliyah juga merupakan mazhab keislaman dengan karakter tradisional sekaligus modern. Sebuah karakter keislaman yang oleh Kareel Stenbrink disebut sebagai Islam kompleks. Hingga kini, Alwashliyah berhasil membangun identitas keislaman sekaligus kebudayaan yang kuat di Sumatera Utara, sebagaimana NU di Jawa Timur.

Sebagai organisasi modern, Alwashliyah memang tidak bisa menghindar dari berbagai dimensi kehidupan yang melingkupi umat. Karakter organisasi seperti ini setidaknya dapat dirujuk dalam pemikiran Talcott Parsons dalam "*Structure and Process in Modern Societies*", (1960;45-46). Parsons mengatakan bahwa organisasi-organisasi di suatu negara diklasifikasikan menjadi empat kelompok, antara lain; (1) berorientasi ekonomi seperti perusahaan; (2) berorientasi politik; (3) organisasi integratif yang mengurus kedayagunaan dalam masyarakat seperti lembaga hukum, pemelihara pola yang memberi sumbangan untuk mempertahankan pola budaya, dan pendidikan yang diwakili oleh otoritas agama dan sekolah.

Namun dapat diperdebatkan bahwa seringkali organisasi memperlihatkan orientasi ganda sekaligus atau saling berurutan. Suatu organisasi politik, misalnya, dapat berhubungan dengan perusahaan atau kegiatan bisnis untuk membantu menjamin keamanan finansial organisasi. Lebih jamak lagi ditemukan organisasi keagamaan, pendidikan dan budaya mempunyai ciri-ciri politik untuk mewujudkan tujuan utama organisasi demi mempertahankan orientasi budaya dalam masyarakat. Afiliasi dengan percaturan politik sangat penting bagi beberapa organisasi demi kelangsungan hidupnya.

Relasi afiliatif organisasi keagamaan dengan organisasi politik sangat kuat ketika ormas keagamaan menghadapi suatu ancaman yang dapat memperlemah organisasi. Entah lewat persaingan keras dengan organisasi lain maupun penindasan oleh penguasa. Di sinilah posisi Alwashliyah dengan tantangan internal dan eksternal. Ia tidak dapat menghindar dari orientasi ganda; dakwah sekaligus politik, dakwah sekaligus pendidikan, ekonomi, dan budaya.

Dengan demikian, sekalipun Alwashliyah selalu antusias dalam kegiatan sosial, pendidikan dan keagamaan, organisasi ini sejak didirikan juga sama peduli dan bahkan terlibat aktif dalam politik praktis. Meskipun secara normatif Alwashliyah tidak

mengatur tentang keterlibatan dalam politik elektoral. Sebab Alwashliyah bukan partai politik dan tidak pernah mendirikan partai politiknya sendiri. Tapi, organisasi ini telah memiliki sejarah keterlibatan yang panjang dalam politik praktis melalui partai politik yang ada.

Sejak tahun-tahun awal berdirinya, misalnya, Alwashliyah berhubungan erat dengan partai politik Masyumi di era Soekarno. Demikian halnya Alwashliyah punya saham besar di PPP di masa Soeharto. Sampai kini, di era reformasi, polarisasi politik Alwashliyah tampak lewat kehadiran kader-kadernya di berbagai parpol dengan ragam ideologi. Sekalipun demikian, pencapaian politik Alwashliyah tidak pernah mendekati ketinggian prestasi sosialnya di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. Prestasi politik Alwashliyah sepanjang pengamatan saya paling tinggi di level legislatif dan yudikatif.

## **Eksperimen**

Tampaknya percobaan meraih prestasi politik sebagai eksekutif (gubernur) baru akan terjadi pada Pilgubsu 2013 mendatang. Kali ini berdasarkan Rakerwil II Alwashliyah Sumatera Utara yang diselenggarakan pada tanggal 31 Maret 2012. Alwashliyah memutuskan mengusung Hasbullah Hadi (HH) sebagai calon gubernur Sumatera Utara 2013 lewat jalur

perseorangan. Hasil rapat tersebut yang diamini seluruh pimpinan daerah menjelaskan geliat politik yang bergelora di dalam tubuh organisasi Islam terbesar di Sumut itu. Instruksi pun keluar untuk meminta kepada seluruh organ bagian dan para kader untuk turut memperjuangkannya berikut hukuman organisasi jika keputusan instruksi itu tidak dijalankan. Menariknya, Hasbullah Hadi sebagai kader Partai Demokrat adalah satu dari beberapa orang yang ditunjuk oleh Partai Demokrat untuk masuk dalam anggota tim Sembilan melalui SK DPP Partai Demokrat No. 172/INT/DPP.PD/IV/2012 tanggal 5 April 2012 terkait penjaringan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara pada Pilgubsu 2013.

Deklarasi Hasbullah Hadi (HH) sebagai calon yang didukung penuh organisasi Alwashliyah di Sumatera Utara merupakan suatu langkah baru bagi sejarah Alwashliyah sendiri dan Sumatera Utara. Sebab baru ini ada ormas Islam mencalonkan kadernya sebagai kandidat di Pilgubsu, dan baru ini pula ada calon independen di Pilgubsu. Nampaknya, Alwashliyah benar-benar sudah menjadi parpol tanpa deklarasi. Sebenarnya, langkah ini seperti ingin mengulang rima sejarah politik kesuksesan Abdul Halim Harahap sebagai anggota DPD RI tahun 2004, dan dukungan penuh organisasi dalam kemenangan Syampurno pada Pilgubsu 2008 lalu. Kali ini, Alwashliyah

tidak ingin menjadi pendukung, akan tetapi aktor panggung. Jadi, jika benar mesin mesin-politik Alwashliyah bekerja secara efektif, bukan tidak mungkin HH bisa menjadi pemenang dalam Pilgubsu 2013. Sebab Alwashliyah -meski tidak punya data statistik- anggotanya sangat banyak di akar rumput.

Persoalannya, apakah fenomena ini melulu tuntutan sejarah atau justru menunjukkan bahwa jalan dakwah dan pendidikan yang selama ini ditempuh oleh kader Alwashliyah tidak dianggap lagi membawa *mashlahat* untuk mereka? Seseorang itukah Alwashliyah bermain politik? Apakah hal ini merupakan ijtihad politik untuk kepentingan umat atau justru sekedar memberikan kunci pintu yang memungkinkan masuknya makelar kekuasaan? Jika ijtihad politik ini dalam rangka memberikan *mashlahat* kepada umat, siapapun tidak akan mempersoalkannya, justru akan mendapatkan dukungan penuh. Tetapi jika yang terjadi adalah tertukarnya hasrat dakwah dengan politik kekuasaan, maka di sinilah terjadi politisasi Islam, rekayasa rantai besi oligarki yang hanya mengorbankan umat.

Langkah besar ini pun bisa jadi mempertaruhkan sejarah kegemilangan masa lalu sekaligus masa depan organisasi dan

tidak menutup kemungkinan pertarungan masa depan umat Islam di Sumatera Utara. Sekali lagi, rima sejarah tak berbunyi sama, tetapi syairnya cukup untuk saling mengingatkan.

## **G. Pudarnya Etika Publik**

Komitmen setiap warganegara yang berporos pada pengutamakan kemaslahatan publik di atas kepentingan pribadi adalah modal dasar dalam perawatan peradaban bangsa. Komitmen seperti itu juga dapat disebut sebagai etika publik. Demokrasi yang memberikan ruang kebebasan seperti sekarang ini perlu direnungkan ulang. Demokrasi adalah ikrar kolektif warga bangsa untuk hidup bersama dalam memperjuangkan kebajikan dan keadilan serta menciptakan kesejahteraan. Untuk semua itu, tentu rangkaian tindakan etis sesuai prinsip kepatutan publik mutlak diperlukan.

Di ranah publik, etika sebagai seperangkat nilai tata keadaban untuk kebaikan bersama menjadi penting di tengah kerisauan. Apalagi ketika kita menyaksikan ruang politik sekadar menjadi ajang transaksi kepentingan elit sesaat dan terbatas. Penekanan etika adalah hal mendesak dalam dialektika dan dinamika demokrasi. Terutama saat bunyi politik untuk mencipta kemaslahatan bagi setiap warganya makin tidak terdengar.

Apa yang salah dalam perjalanan republik ini? Jawabannya adalah apa yang terlihat kurang etis di mata publik sekarang, yaitu kurangnya etika. Dalam tradisi politik demokratis yang

dibangun oleh para filosof seperti Aristoteles, Plato, Al-Kindi dan Al-Faraby, etika merupakan keutamaan. Ia merupakan aktifitas dan nalar praktis yang harus ditempatkan dalam prinsip kepemimpinan. Bagi warga negara, etika dapat dimaknai sebagai komitmen publik dalam meletakkan kebaikan warga (*al-maslahat ar-ra'iyah*) seperti keutamaan, kesetaraan, dan kebebasan.

Al-Kindi mengemukakan ciri-ciri manusia utama yang relevan dilekatkan pada pemimpin, antara lain; *pertama*, hikmah, yaitu nalar mendalam dan atau bisa juga praktis yang membawa pemimpin dan warga negara meletakkan kebaikan kolektif di atas kepentingan pribadi. Kebijakan-kebijakan dilakukan dengan mekanisme musyawarah mufakat berbasis hikmah. Negara kerakyatan/demokrasi ini harus dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam mekanisme permusyawaratan perwakilan. Dengan mengedepankan hikmah, keputusan politik dapat diterima oleh rakyat.

*Kedua*, berani, yaitu sikap keberanian dari pemimpin ketika mengambil keputusan berdasarkan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan dan lainnya. Kegamangan dalam memutuskan hanya akan menciptakan ketidakpastian bagi rakyat. *Ketiga*, moderat, yaitu kemampuan bersikap rasional,



terencana, kalkulatif dan seimbang berdasarkan situasi yang berubah. *Keempat*, adil, kemampuan bertindak imparisial, jujur dan menekankan pada prinsip keseimbangan dan kesetaraan sebagai nilai utama bagi setiap kebijakan politik. *Kelima*, peduli, yaitu kebaikan setiap orang akan terangkai menjadi kebaikan bersama dalam semangat kepedulian.

Membicarakan pentingnya etika akan membawa kita pada pertaubatan dan dalam skala lebih luas “pertaubatan nasional”, yaitu kesadaran bahwa kebebasan tanpa etika adalah barbarianisme dan anarkisme. Kebebasan tanpa *signal* keadaban publik akan memicu munculnya hasrat brutal dari mereka yang kuat secara ekonomi dan politik untuk menindas yang lemah. Hadirnya tatanan bebas tanpa keinsyafan terhadap etika akan menjadikan kepentingan publik sekedar arena demokrasi yang di dalamnya terjadi ajang penindasan dari mereka yang kuat secara finansial maupun politik.

## **Keadaban**

Dalam evolusi kebudayaan, penghargaan manusia terhadap badannya bergerak dari bawah ke atas. Menurut Friedrich Nietzsche, bagian bawah badan kita adalah penghambat jalannya mutasi dari otak. Perlu diketahui bahwa perasaan dan nurani

juga bersemayam di otak, meskipun biasa kita katakan bahwa perasaan berasal dari hati (dalam arti non-anatomis). Manusia utama senantiasa harus berusaha memadukan antara pikiran yang bersemayam di otak dengan perasaan yang berasal dari hati untuk menjadi lebih cerdas, lebih arif, dan lebih beradab. Karena pangkal dari segala kesulitan yang dihadapi manusia sekarang adalah kurang cerdas, kurang beradab atau kurang berpendidikan. secara eufemistik disebut berpendidikan beda. Rakyat yang sudah cerdas, berbudaya dan berkeadaban sukar diperdaya dan berani beroposisi. Sebaliknya, rakyat yang tidak kritis, tidak tahu hak-haknya dan tidak mau diberdayakan, memberi peluang kepada para pemimpin untuk dapat berkuasa lebih lama dan seenaknya.

Tampaknya, syarat kepemimpinan haruslah dari pemikir (filosof) sebagaimana yang diungkapkan al-Farabi dalam buku *al-Madinah al-fadhilah*-nya sungguhlah kebenarannya. Karena pemimpin yang filosof menguasai secara mendalam dan praktis soal etika. Al-Farabi mengibaratkan negara sebagai tubuh, pemimpin sebagai kepala, dan rakyat sebagai anggota badan. Agar badan sehat dan bugar, kepala harus memikirkan dengan bijaksana apa-apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Filosof atau pemikir selalu mengedepankan hikmah dan gemar mengindahkan etika bahkan estetika.

Sekarang, gagasan yang mengutamakan etika dalam perbincangan publik justru banyak mengundang kontroversi dan perdebatan. Sebagian kalangan menolak pentingnya etika publik. Mereka memandang bahwa tanggung jawab warga dan komitmen membangun keadaban berbenturan dengan kebebasan setiap warga negara yang memiliki hak untuk memilih aktifitasnya. Menggagas etika publik dicurigai sebagai pendukung *status quo* dan anti HAM.

Padahal, konstruksi sosial politik bernegara bukanlah tatanan politik yang dapat kita bangun dan kita abaikan begitu saja. Demokrasi tidak bisa dibiarkan jalan sendiri. Apabila kita menginginkan demoralisasi politik, kehidupan politik tidak dapat kita serahkan begitu saja kepada para politisi dan elit pasif yang membiarkan kebebasan secara *bablas*.

Relevansi komitmen aktif warga negara dalam mengedepankan etika justru menjadi penting untuk menjamin dan merawat kebebasan yang telah kita perjuangkan dan keadilan yang kita citakan. Saat etika dan komitmen warga hilang dari ranah publik, segera kita menyaksikan intimidasi terhadap hak kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya (hak asasi yang konstitusional). Kita juga masih melihat bagaimana kekerasan dan terorisme beraktifitas di

negeri ini, anak remaja di negeri ini merasa bebas berzina, dan seterusnya.

## **Anti Peradaban**

Belakangan ini, gairah politik rakyat dan hasrat untuk menegakkan kebaikan bersama dalam ruang politik sayup terdengar. Tetapi, kita menyaksikan bagaimana elit politik sibuk mempertontonkan keanehan, ketidaketisan seperti kasus-kasus korupsi, merencanakan pembangunan gedung DPR baru yang mewah sementara rakyat tersudut kelaparan di pinggiran. Pendeknya, bangunan itupun nanti akan menjadi simbol pengingkaran terhadap rakyat. Monumen itu secara jelas menandakan hilangnya kepedulian elit terhadap rakyatnya. Kita juga menyaksikan bagaimana prinsip keadilan sebagai dasar etika tampak timpang dalam kepemimpinan republik ini. Mafia pajak bisa seenaknya merajai dan menyuap para penyelenggara negara. Maraknya penegak hukum yang justru bermasalah dengan hukum, uang telah menggantikan keadilan dan kebijaksanaan.

Kita juga melihat eksploitasi sumber daya alam telah dilegalkan tanpa mempertimbangkan keadilan dan kepentingan warga di daerah. Beberapa bencana yang beruntun datang

mengkonfirmasi kita bahwa etika berlingkungan kita sedang minus. Adalah juga tindakan anti perdaban ketika kesengsaraan rakyat yang terkena bencana hanya menjadi ruang politisasi. Bahkan bantuan dana bencana dikorupsi. Tampaknya para elit bangsa ini kehilangan kemampuan menahan diri dan gagal meletakkan kebaikan publik di atas kepentingan pribadi.

Segegap pengabaian terhadap apa yang penting bagi kebaikan bersama dalam kehidupan republik ini agaknya menjadi catatan penting untuk berefleksi. Karena itu kemerdekaan dan kebebasan yang telah kita capai dalam aktifitas bernegara hanya bisa dipertahankan dengan hadirnya komitmen aktif setiap warga negara untuk merawat dengan mengedepankan etika. Demokrasi sebagai arena politik yang menghadirkan kebebasan warga negara dalam mengekspresikan hak asasinya butuh etika yang memberikan jalan tertib pada pemaknaan bagi kebaikan bersama setiap warga. Demokrasi kita pun bukan hanya bermakna kebebasan, lebih dari itu demokrasi adalah kebudayaan dan peradaban.

## **BAB II**

### **ISLAM PRAGMATIS : PERJUMPAAN ISLAM DAN POLITIK PRAKTIS**

#### **A. Kekalahan Parpol Islam di Pemilu 2009**

Seperti yang diharapkan banyak pihak sebelumnya, bahwa pemilu berjalan dengan damai, lancar, dan aman. Meskipun relatif belum ideal karena masih terdapat beberapa persoalan seperti carut marutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang membuat banyak calon pemilih kehilangan hak pilihnya serta berbagai pelanggaran pemilu. Hasilnya cukup mengejutkan yaitu melonjaknya suara partai Demokrat tiga kali lipat dari raihan partai tersebut di pemilu 2004, dari 7 % naik menjadi 20, 85%.

Di balik kedahsyatan perolehan suara Partai Demokrat -yang membuatnya menjadi pemenang pemilu 2009- kekalahan menyedihkan terjadi pada parpol-parpol Islam. Mereka harus rela menelan pil pahit dengan prediket partai “papan tengah”. Sekali lagi, perjuangan parpol Islam hanya sampai di parlemen dengan kekuatan yang kian menipis, dengan rekor tidak pernah

sampai ke pucuk kekuasaan sebagai imam. Dengan kekuatan segitu, agenda politik Islam dipastikan kian berat dilakukan.

Parpol Islam yang dimaksud di sini adalah partai politik yang berasaskan Islam seperti PKS, PPP, PBB, PBR, PPNUI dan partai yang basis sosiologisnya umat Islam seperti PKB, PKNU, PAN dan PMB. Dalam setiap momen Pemilu, satu hal yang tidak terlalu mengherankan tetapi menyedihkan adalah semakin menurunnya perolehan suara parpol-parpol Islam. Sebaliknya, semakin gandrungnya masyarakat Indonesia dengan partai nasionalis dan sekuler.

Dalam sejarah pemilu demokratis Indonesia, Islam sejak lama tidak digunakan sebagai dasar utama perilaku memilih masyarakat muslim. Padahal 90% pemilih Indonesia adalah muslim. Misalnya, pada pemilu 1955 total perolehan suara parpol-parpol Islam (Masyumi, PNU, PSII dan Perti) kurang lebih 43,9%. Sementara pada saat yang sama penduduk muslim berjumlah 90%. Ini berarti bahwa banyak dari kaum muslim memilih partai yang nasionalis-sekuler (PKI, PNI dan PSI).

Pada pemilu pertama pasca Orde Baru tahun 1999 ada sekitar 12 partai Islam dan 5 partai dengan basis sosiologis Islam yang ikut sebagai peserta Pemilu. Namun, dukungan terhadap parpol-parpol Islam hanya sekitar 17,71%, jika ditambah

dengan PAN dan PKB hanya 37,44%. Pada pemilu 2004, partai Islam yang mengikuti pemilu jumlahnya menciut menjadi 7 Partai. Hasilnya seluruh kekuatan parpol Islam tersebut hanya meraih 21,34% ditambah PAN dan PKB menjadi 38,35%. Perolehan suara tersebut relatif kecil dibandingkan potensi suara pemilih muslim yang berkisar 87%.

Pada pemilu 2009, lewat hasil perhitungan KPU diketahui bahwa perolehan suara parpol Islam secara drastis menurun dibandingkan pemilu 2004. lihat tabel berikut;

Nama Partai	Raihan Suara (%)	
	Pemilu 2004	Pemilu 2009
PKB	10.57	4, 94
PPP	8.15	5, 32
PKS	7.34	7, 88
PAN	6.44	6, 01
PBB	2.62	1, 74
PBR	2.44	1, 21



PPNUI	0.79	0,14
PMB	Belum Ikut	0, 40
PKNU	Belum Ikut	1, 47
Jumlah Total	38. 35	29, 16

Dari tabel ini dapat diketahui bahwa parpol Islam yang raihan suaranya relatif stabil adalah PKS dan PAN. Atas raihan ini PKS menempati urutan keempat dan PAN di urutan kelima, setelah PD, Golkar, dan PDIP. Meski demikian, raihan PKS tidak lebih tinggi dari PKB pada pemilu 2004 yang menempati posisi ketiga setelah Golkar dan PDIP dengan raihan suara sebesar 10, 57%.

Sengaja tidak dibebankan pengalaman Pemilu di masa Orde Baru karena setiap kita mengerti hasil dari setiap Pemilu di masa itu penuh dengan kecurangan dan manipulasi alias tidak demokratis. Meski demikian, ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa jika pun Pemilu di masa Orde Baru tersebut dilakukan dengan demokratis, parpol Islam tetap akan kalah. Singkatnya, meskipun Islam adalah mayoritas secara sosiologis namun minoritas secara politik.

## **Kehilangan Identitas**

Sejak pemilu 2004, arus deras pragmatisme dan deideologisasi menjangkiti seluruh tubuh parpol, termasuk parpol-parpol Islam. Hal tersebut kemudian membuat hilangnya identitas partai, terutama partai Islam di mata masyarakat, performanya dianggap sama saja bahkan tidak terlalu baik dibandingkan dengan parpol nasionalis dan sekuler. Selain itu, kekalahan partai-partai Islam terutama di Pemilu 2009 ini dapat dijelaskan dengan beberapa faktor. *Pertama*, faktor internal, mulai dari konflik elit, lemahnya institusionalisasi partai, gagapnya partai membaca perubahan dan melakukan rekonstruksi gerakan, serta kegagalan dalam membangun *platform* yang populis.

Simbol-simbol agama yang luhur cuma dipakai sebagai identitas pengenalan, landasan etik moral politik belum tampak optimal, ayat-ayat Tuhan yang dikumudangkan hanya mantra yang melenakan. Tidak ada artikulasi politik yang riil seperti politik pembelaan terhadap umat. Yang ada hanya kepentingan pragmatis selingkar kecil oligarki Islam itu tanpa memperhitungkan seberapa luas kepentingan tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam yang kompleks.

*Kedua*, faktor eksternal, yaitu banyaknya peserta Pemilu yang secara otomatis memberi peluang kebebasan dan keragaman

pilihan masyarakat. Melebarnya pergeseran solidaritas ideologis pada diri umat juga terjadi di sini. Ditambah lagi, semakin massifnya pemikiran sekularisasi politik yang membuat merebaknya penggemar sekularisasi. Sehingga, identitas keislaman sebuah partai tidak memberikan keefektifan dan signifikansi untuk menarik pemilih muslim. Sebab kebanyakan kaum muslim tidak menjadikan faktor identitas keagamaan dalam memilih partai. Secara umum, seorang muslim yang lepas dari berbagai faktor yang memengaruhinya, cenderung memilih partai non-Islam. Kecenderungan sikap elektoral ini stabil atau bahkan menguat sampai pemilu 2009.

Salah satu parameter yang menjelaskan eksistensi sebuah partai politik adalah seberapa besar dukungan yang diraihinya dalam pemilu. Jika partai tersebut meraih dukungan yang besar, maka dapat dikatakan pula partai tersebut memiliki eksistensi yang besar di masyarakat. Sebaliknya, jika dukungan yang didapatkan kecil, maka eksistensi partai dipertanyakan. Bagi partai besar, raihan dukungan suara yang besar disebabkan partai tersebut memiliki potensi yang besar, bergerak dengan potensi tersebut untuk menghimpun dukungan dari rakyat sebanyak-banyaknya. Demikian halnya, bagi partai kecil, raihan dukungan yang kecil dalam pemilu menandakan partai tersebut hanya memiliki potensi yang kecil, seadanya lagi.

Memang, meski tak signifikan, tetapi ada kecenderungan meningkatnya raihan suara salah satu partai Islam di pemilu 2009 ini. Tetapi sebenarnya hal tersebut menurunkan suara parpol Islam yang lain. Karena mereka (parpol Islam) hanya memperebutkan suara dari pemilih yang sama (kanibalisme politik). Parpol Islam tidak pernah melakukan perambahan kepada pasar yang berbeda seperti potensi suara di kantong-kantong nasionalis atau memanfaatkan *swing voters* dan golput. Mereka hanya terjebak di *captive market*-nya yaitu Islam modernis, Islam tradisional, Islam radikal. Keadaan ini membuat parpol Islam hanya tetap menjadi partai papan tengah, sekaligus hanya menjadi kanibal antar sesamanya.

Raihan dukungan terhadap parpol Islam yang terus menurun dari Pemilu ke Pemilu tersebut menunjukkan bahwa partai-partai ini kian hari kian terpuruk eksistensinya. Bukan tidak mungkin hal itu juga merupakan tanda-tanda kepunahan di masa depan. Tetapi ini hanya sebuah kekhawatiran. Sebagai penyandang identitas Islam, partai Islam mestinya melakukan penegasan identitas dan ideologi. Hal ini bukan hendak memicu sentimen keagamaan semakin tajam. Tetapi agar identitas dan ideologi menjadi landasan dan etika gerak politik dalam menyusun *platform* partai, yaitu politik keberpihakan pro-rakyat. Bukan kehausan akan kekuasaan. Bukan juga

meletakkan ideologi hanya sebagai simbol-simbol yang manipulatif dan menghipnotis *inner drive* masyarakat.

Partai Islam harus memiliki penetrasi politik yang modern dan canggih. Mereka harus memperhatikan kecenderungan dan kebutuhan masyarakat, membangun isu-isu riil yang menjadi prioritas untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang kompleks seperti kesejahteraan, ketersediaan lapangan kerja dan pendidikan serta pembelaan terhadap perempuan.

Meningkatkan pemahaman geopolitik dan ekopolitik yang baik dalam setting kemajemukan bangsa juga merupakan tugas lain parta Islam. Ini dilakukan untuk memperbesar marketnya dan lepas dari kungkungan pasar yang terbatas. Partai Islam juga harus membangun *popularity* lewat ketokohan -bukan kultus- yang berakar di masyarakat, yang menjadi simbol perjuangan masyarakat. Ketokohan yang diterima bukan saja di kalangan Islam tetapi oleh semua kalangan masyarakat Indonesia. Sehingga identitas parpol Islam mudah dikenal dan *marketable* bagi pemilih. Dengan demikian partai Islam akan terus eksis dan tetap *viable*. Semoga!!!

## **B. Absennya Tokoh Islam di Pilpres 2009**

Hingar-bingar Pilpres 2009 telah mendemamkan seluruh lapisan rakyat Indonesia. Deklarasi pasangan capres-cawapres sudah dilakukan sebagai pertanda gendang perang perebutan kekuasaan dimulai. Ada Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (SBY Berboedi), Jusuf Kalla-Wiranto (JK Win), dan Megawati-Prabowo (Mega Pro). Pekik heroik dan patriotik dikumandangkan; demi rakyat!, untuk rakyat!, atas nama rakyat!, panggilan rakyat!. Namun, formasi kepemimpinan tersebut dianggap banyak pengamat kurang ideal karena tidak satupun dari mereka yang merepresentasikan politik Islam. Padahal Islam merupakan mayoritas penduduk negeri ini. Karenanya, dalam komposisi itu tak ada kumandang seperti *izzul Islam wa al-muslimin! Li I'lai' kalimatillah!*

### **Sejarah Peran**

Dalam sejarah nasional pasca kemerdekaan, keterlibatan tokoh Islam dalam aktivitas politik negara bukanlah barang baru. Sejak berlangsungnya pemilu pertama (1955) sampai pemilu 2009 ini, perpolitikan Indonesia senantiasa dimeriahkan oleh para elit agama. Demikian pula pada pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung yang dimulai sejak

tahun 2004 dan tahun 2005, tokoh Islam tidak pernah absen. Bahkan mereka semakin tampak memainkan peran aktifnya. Hal ini karena sejak kemunculannya, organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan mereka.

Masyarakat masih dapat menyaksikan kehadiran tokoh-tokoh Islam yang ikut sebagai kontestan di pilpres 2004. Ada Amin Rais (Capres PAN) dan Hamzah Haz (capres PPP), Salahuddin Wahid (cawapres Wiranto) dan Hasyim Muzadi (cawapres Mega). Namun, pada pilpres 2009 ini tokoh Islam tidak muncul sama sekali. Ormas dan Parpol Islam sebagai institusi perkaderan pemimpin Islam tidak mampu mengajukan satupun tokoh mereka menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Semua tokoh yang maju dalam pilpres 2009 kali ini merupakan representasi dari aliran politik nasionalis. Mengapa parpol-parpol Islam tidak berkoalisi? Bukankah raihan total 29,16% parpol-parpol Islam di pemilu 2009 cukup untuk memenuhi syarat mengajukan capres-cawapres?

Absennya tokoh-tokoh Islam mengisi bursa capres-cawapres ini merupakan pukulan telak bagi Islam politik Indonesia sebagai mayoritas mutlak penduduk bangsa ini. Ini merupakan kegagalan sejarah politik Islam Indonesia yang tidak mampu

menyumbang pemimpin nasional masa kini. Padahal, banyak berderet tokoh Islam yang bisa diajukan sebagai pemimpin politik atau presiden. Amin Rais, Din Syamsuddin, Hidayat Nurwahid, Tifatul Sembiring, Surya Dharma Ali, Bachtiar Chamsah, Yusril Ihza Mahendra, dan lainnya. Beratus jumlahnya professor dan doktor politik Islam di dalam negeri yang bisa diandalkan untuk menyatukan visi kepemimpinan Islam. Namun, itu semua tidak terjadi. Elit Islam tidak pernah duduk satu meja untuk kepentingan muslim Indonesia ini.

### **Poros Tengah?**

Upaya menyatukan parpol Islam sesungguhnya sudah pernah dilakukan. Jauh hari sebelum pemilu legislatif 2009, Din Syamsuddin (ketua PP Muhammadiyah) sudah mengumandangkan *hayya 'ala* poros tengah jilid II. Gagasan ini ingin mengulang sukses dari poros tengah jilid I yang digagas oleh Amin Rais yang berhasil menaikkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden RI mengalahkan Megawati (PDIP) dan B. J. Habibie (Golkar). Saat itu Amin Rais berhasil menyatukan kepentingan-kepentingan dari faksi-faksi Islam politik yang ada untuk mendukung Abdurrahman Wahid menjadi presiden.



Poros tengah jilid II juga ingin mencari solusi alternatif akibat kosongnya situs kuasa dan gagalnya perkaderan Islam nasional untuk mencetak pemimpin-pemimpin tangguh dan populer yang akan diusung pada pilpres 2009. Namun, upaya tersebut hanya romantisme belaka yang tidak ada wujud konkritnya. Poros tengah jilid II hanya semacam “tembang lawas” yang hanya sempat hit di zamannya dan dalam konteks pilpres 2009, tembang itu kehilangan daya tarik dan popularitasnya.

Gagalnya poros tengah juga diakibatkan sulitnya menyatukan faksi-faksi Islam, dalam konteks ini adalah parpol-parpol Islam. Elit partai Islam tidak selalu bersedia duduk satu meja untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan kepentingan umat Islam dan agenda-agenda penyejahteraan masyarakat. Mereka hanya sibuk dengan kepentingannya masing-masing. Selain itu, etos kanibalisme dengan saling “memangsa” suara konstituen antar sesama parpol Islam dan saling menjegal juga menjadi penyebab sulitnya komunikasi dan koalisi politik dijalin.

Gejala naiknya satu parpol Islam dan turunnya raihan suara parpol Islam lainnya merupakan indikator yang tidak terbantahkan. Poros tengah juga memiliki kelemahan. Sejarahnya yang traumatik tidak dapat dilupakan begitu saja. Memang, poros tengah berhasil mengusung Abdurrahman

Wahid menjadi Presiden (1999). Namun, tahun 2001 poros tengah ini juga yang menjatuhkannya.

### **SBY dan Penari**

Ketika poros tengah yang ideologis itu tidak dapat menyatukan partai-partai Islam, justru keanehan muncul. Ada tokoh lain yang mampu menyatukannya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Semua parpol Islam peserta pemilu 2009 baik yang lulus *Parliamentary threshold* (PT) atau tidak bergabung ke kubu SBY; PPP, PKS, PAN, PKB, PBB, PBR, PMB. Kejadian yang sama pernah terjadi di pemerintahan SBY-JK (2004-2009). Padahal, SBY bukanlah tokoh Islam atau besar di organisasi keislaman manapun. Namun, harus diakui, figurnya ibarat “kiblat” bagi elit politik Islam. Meski demikian, jangan berharap bersatunya partai Islam tersebut untuk kepentingan muslim Indonesia, karena mereka bersatu untuk kepentingan terbatas.

Hasil dari pemilu legislatif 2009 menunjukkan bahwa Partai Demokrat menempati peringkat pertama dengan raihan suara yang fenomenal (20,85%). Jauh melampaui perolehan seluruh partai peserta pemilu 2009. Adapun PKS, PAN, PPP, PKB sebagai partai Islam dan basis sosiologis Islam hanya merupakan partai dengan sebutan medikor alias papan tengah.

Lebih tragis lagi nasib “si pejuang syariat” PBB yang tidak lulus PT. Dengan perolehan yang demikian menunjukkan bahwa partai-partai ini memiliki *bargaining position* yang lemah, bahkan hampir tidak memiliki harga jual sama sekali.

Maka tidak heran parpol Islam panik dengan berupa macam tingkah; ada yang jauh-jauh hari sudah “menggadai-gadaikan” politiknya dengan harga murah kepada Partai Demokrat. Ada yang sibuk berkonflik tak menentu, ada pula yang disebut-sebut bermain tiga kaki seperti badut sirkus, ada pula yang dituduh gertak sambal dan dagang sapi. Demikianlah, memang gaya akrobat politik yang dimainkan, manuvernya mirip tarian latar yang fungsinya meramai-ramaikan saja, sementara eksistensinya dikecualikan. Keadaan ini tentu saja kian memperlemah partai Islam itu sendiri di hadapan parpol nasionalis dan segera di hadapan rakyat secara keseluruhan.

Kegagalan elit parpol Islam di tingkat nasional ini terlihat dengan terjadinya pola-pola koalisi yang melibatkan agama dalam kekuatan politik dengan ideologi yang sangat berbeda. Koalisi pragmatis murni dengan motivasi sekedar *power sharing* ini mencerminkan ketidakpastian elit parpol Islam dalam menyikapi berlangsungnya politik kontemporer. Demikian juga mengalirnya dukungan elit agama terhadap

kandidat tertentu yang tidak bersinggungan dengan basis keagamaan mereka. Ini semua memperlihatkan betapa lemah dan *fragile*-nya pemahaman elit agama terhadap posisi strategis mereka sebagai aktor politik nasional.

Begitu pun banyaknya parpol Islam yang bergabung dengan Partai Demokrat, namun SBY sebagai capresnya Partai Demokrat sama sekali tidak bergeming untuk memilih tokoh Islam sebagai representasi mayoritas mutlak dari kekuatan koalisi dan rakyat Indonesia. Di sini, parpol Islam hanya dipandang sebelah mata. SBY mengabaikan apa yang disebut oleh Schumpeter sebagai *rational system of preference* di mana representasi dari mayoritas penting diperhatikan dan dibentuk dengan cara mengambil tokoh yang representatif. SBY memang juga tidak peduli dengan langgam atau pakem kepemimpinan nasional seperti Jawa-non-jawa, militer-sipil, nasionalis-Islam dan sebagainya. Karena ia merasa figurnya melampaui sekat-sekat ideologis primordial yang sudah terbukti di Pilpres 2004 lalu. Keyakinan tersebut cukup untuk memenangkan pilpres 2009, sementara yang lainnya sekedar “penari latar”.

Mencermati model-model dukungan PKS pada SBY-Boediono, misalnya, terlihat jelas betapa kuatnya tarikan

kepentingan dan orientasi politik jangka pendek dalam proses-proses transaksi politik. Banyak pihak termasuk kadernya sendiri menyayangkan sikap PKS yang tidak konsisten ini. Apa boleh buat, perilaku PKS ini dianggap seperti mengikuti kata pepatah “tak ada rotan akar pun jadi”, “Tak dapat wapres, 30 menteri pun jadi”. Gagal jadi sufi, dagang sapi dilakoni.

Sejarah kepemimpinan Islam ini tampaknya harus terinterupsi sejenak dengan pertanyaan apakah pakem Islam-nasionalis sudah dihapuskan dalam kamus politik Indonesia? Karena itu, penting bagi para elit untuk bertafakkur dan berzikir sebanyak-banyaknya. Melakukan perenungan sejarah (*historical reflection*) juga perlu. Terutama terkait dengan perjalanan politik Islam untuk melahirkan kesadaran sejarah baru (*historical consciousness*). Dari sanalah, pada gilirannya, mereka dapat memperoleh pengertian terhadap peristiwa, langkah, dan kebijakan yang ditempuh di masa lalu dan bagaimana membaca gejala bentuk ideal (*ideal type*) masa depan, plus terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju sebuah kehidupan yang lebih baik dari.

Melakukan perenungan sejarah adalah untuk memahami bahwa semua peristiwa itu tidak terjadi dengan sendirinya. Selalu ada kausalitas dan hubungan antar berbagai peristiwa. Dulu dan

sekarang. Keterkaitan inilah yang menjadi bahan pembelajaran yang menggugah kesadaran kita. Semoga!

### **C. 2014, Mana Tahan?**

Tulisan saya “nasib parpol Islam di 2014” Waspada, Jumat 28 Januari 2011 mendapat tanggapan hangat dari kawan-kawan di lapangan dan akademisi. Dari sekian banyak tanggapan itu adalah saudara Warjio yang tergelitik dan menuliskan perasaannya di harian yang sama. Pertarungan partai-partai politik dalam memenangkan pemilu dan merebut kekuasaan bukanlah pada saat pemilu berlangsung. Tetapi, sebenarnya sudah bermula sejak tahapan penyusunan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu. Strategi ini lebih sistematis dan berbiaya rendah terutama bagi partai-partai di parlemen yang memiliki suara *veto* seperti Demokrat, Golkar, dan PDIP.

Menjelang Pemilu 2014, meski masih tiga tahun lagi, revisi terhadap UU Pemilu sudah hangat dibicarakan di parlemen. Tujuannya bagaimana partai-partai memperjuangkan produk UU yang sesuai dengan kepentingannya. Kemungkinan pembahasan revisi UU Pemilu tersebut akan dibahas tahun 2011 ini. Materi kerangka acuan perubahan UU No 10/2008 yang disiapkan oleh DPR memuat beberapa variabel antara lain; PT, ET dan Dapil. Variabel ini muncul kembali sebagai

bola panas sekaligus mengundang perdebatan karena menyangkut hidup matinya partai, terutama partai medikor (papan tengah), partai gurem, dan partai sedang berkembang.

### **Politik Partai Besar**

Usulan revisi UU No. 28 tahun 2008 tentang Pemilihan DPR, DPD dan DPRD itu idealnya membawa semangat penguatan sistem presidensiil dan mengefektifkan demokrasi. Dengan persyaratan yang dianggap proporsional, partai-partai yang akan masuk ke Senayan juga akan lebih sederhana. Parlemen kita menjadi tidak sekompleks sekarang. Dengan demikian diharapkan mudah mengambil kebijakan tanpa banyak pertimbangan dan ancaman. Tetapi bagi parpol sedang, kecil, dan masih sedang berkembang, meningkatkan besaran PT dianggap sebagai upaya parpol besar untuk mengamankan parpol di bawahnya.

Oleh sebab itu di parlemen saat ini ada dua arus politik yang terpolarisasi kepada dua poros kepentingan yang saling bertarung. *Pertama*, poros partai besar; Demokrat, Golkar dan PDIP. *Kedua*, Poros partai menengah; PKS, PAN, PKB, PPP, Gerindra dan Hanura. Di luar parlemen ada partai gurem yang tergabung dalam Presidium Dewan Persatuan Nasional (juga



anggota koalisi pemerintah) di mana Oesman Sapta sebagai ketua presidiumnya.

Ketentuan UU No 10/2008 menyatakan; “parpol peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam perolehan kursi DPR pada masing-masing dapil.” Sedangkan dalam materi draf yang disiapkan badan legislasi DPR, usul perubahan PT memang belum terlihat tetapi sudah menguak wacana di kalangan mayoritas parpol di DPR saat ini mengenai peningkatan besaran PT itu. Golkar dan PDIP mengusulkan PT 5%. Sedangkan Demokrat lebih moderat dengan angka 4%, dan partai medikor seperti PAN, PPP, PKS dan PKB lebih setuju besaran PT yang lama (2,5%). Di sinilah letak kekhawatiran itu.

Karena, selain mengancam eksistensi partai Islam sebagai partai papan tengah, peningkatan PT akan membuat partai kecil sulit terwakili di parlemen dan mengebiri aspirasi mereka. Karena parpol yang tidak sampai ambang batas suara sah tidak diikutkan dalam perhitungan suara di DPR. Sementara banyak suara rakyat yang disalurkan ke partai kecil tersebut, problem lanjutannya, mau di bawa kemana suara rakyat yang sudah

menentukan pilihannya kepada partai kecil? Apakah dianggap hangus?

Kemudian, materi penciptaan dapil juga termuat dalam draf revisi UU itu. Dinyatakan jumlah kursi setiap anggota DPR paling sedikit dua kursi dan paling banyak enam kursi. Padahal semakin kecil dapil, semakin besar ambang batas kursi (PT), semakin besar suara yang diperlukan peserta pemilu untuk mendapatkan kursi di sebuah dapil itu. Semakin kecil dapil semakin kecil pula kesempatan partai kecil untuk mendapatkan kursi di DPR.

Selain dua hal di atas; draf revisi UU No. 10/2008 itu juga memuat pemberlakuan *Electoral Treshold* (ET). Salah satunya memunculkan rumusan perubahan Pasal 8 Ayat 20: “*partai politik yang telah memenuhi ketentuan tentang ambang batas perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan menjadi peserta pemilu berikutnya.*” Dengan demikian, hanya parpol yang melewati ET saja yang secara otomatis menjadi peserta pemilu berikutnya.

Draf revisi tersebut tentu saja mereduksi ketentuan dalam UU No. 10/2008: “*partai politik peserta pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta pemilu pada pemilu berikutnya*”. Artinya, sekali parpol ditetapkan sebagai parpol peserta pemilu sampai

kapanpun parpol tersebut dapat saja mengikuti pemilu berikutnya. Jika ketentuan ambang batas kursi (Parliamentary Threshold) sebesar 5% disepakati, pengurangan dapil disetujui di parlemen, Electoral Threshold pun diketok-palu, maka alamat kerja keras dan berat bagi parpol Islam tersebut. Sedangkan untuk mencapai 2,5% pada pemilu 2009 sudah terlalu berat. Sebagaimana tampak pada PBB, PBR, PMB, dan PKNU yang tereliminasi dari parlemen.

Selain aturan normatif pemilu yang semakin berat, parpol Islam masih menyisakan persoalan yang cukup kompleks. Sebutlah misalnya, ketiadaan tokoh kunci yang baru dan populer, lemahnya konsolidasi internal, formulasi *platform* gerakan yang populis, ancaman deideologisasi Islam serta minimnya dana institusi. Segenap masalah itu adalah pekerjaan rumah tangga masing-masing parpol Islam. Kita dapat membayangkan bagaimana jadinya PAN tanpa Amin Rais, PKB setelah kematian Gusdur yang dilanda perpecahan yang tak kunjung reda, PPP yang digerogoti konco-konco fusinya. Pernyataan ini tidak bermaksud meremehkan kerja elit partai masing-masing. Karena apapun kerja mereka harus tetap mendapatkan apresiasi yang tinggi. Kita percaya pada ketulusan mereka untuk berkhidmat mereka pada umat.

Saya tidak bermaksud hiperbolik soal partai dakwah yang satu ini, yaitu PKS. Soalnya, dalam kurun waktu dua kali pemilu 2004 dan 2009, PKS memiliki daya tahan relatif stabil dan cenderung meningkat. Karena itu, PKS dapat menjadi partai tumpuan harapan bagi umat Islam. Setidaknya pada pemilu 2014. Institusi partai ini juga kuat, mapan, dan sepi konflik. Meski sempat dituduh eksklusif dan konservatif, tetapi ada upaya PKS membuka diri dalam konteks memperluas market politiknya dengan jargon “PKS Punya Kita Semua”. Tetapi, PKS tidak punya figur sepopuler SBY, Mega atau Sultan HB X, yang menjadi faktor penting dalam meraup simpati dan suara pemilih. Sehingga prestasinya patut ditunggu konfirmasinya di 2014 nanti.

Tradisi memperluas market politik belum dilakukan partai Islam selainnya. Biasanya, parpol Islam tidak dapat fleksibel dan terjebak dalam *captive market* pasar suara pendukung yang terbatas, yaitu hanya pada umat Islam; Islam tradisional, Islam Moderat. Padahal pemilih Islam juga diperebutkan oleh partai sekuler. PDIP punya Baitul muslimin, Golkar punya Hidayatullah, Demokrat Punya majelis zikir SBY, Nurussalam. Kemampuan parpol sekuler membuka diri sama dengan membuka peluang merambah pasar suara untuk memenuhi syarat ambang batas suara yang tinggi.

Sejarah kekalahan parpol Islam dalam pemilu-pemilu bukanlah suatu yang mengherankan, tetapi ia tetap saja merupakan keadaan yang menyedihkan. Meski belum pasti, dengan beberapa indikator persoalan yang disebutkan di atas, saya ingin mengatakan bahwa nasib partai Islam di Pemilu 2014 bisa jadi akan sangat memilukan. Sungguhpun ada partai Islam yang bertahan suaranya tidak lebih dari yang ada sekarang. Agar tidak terjadi hal yang demikian, setidaknya ada dua hal yang dapat dan harus dilakukan.

*Pertama*, reaktualisasi ideologi; parpol Islam harus mereduksi keinginannya mendirikan negara Islam, tetapi mesti mengarah kepada negara Pancasila yang diridai Tuhan. *Kedua*, memperluas market politik dengan cara memperkenalkan tokoh yang dapat diterima oleh banyak kalangan (tidak konservatif). Dilanjutkan dengan konkritisasi program populis jika ingin mendapatkan suara lebih dari yang dipersyaratkan oleh UU. Jika tidak, untuk semua parpol Islam, kita harus mengucapkan; *2014, mana tahan?*

## **D. Meninjau Koalisi Hijau**

Jelang pendaftaran bakal calon Gubernur Sumatera Utara 2013, akan ada banyak kemungkinan yang terjadi berikut dengan kejutan-kejutan politik di antaranya adalah bagaimana bentuk bangunan koalisi partai yang mencalonkan figur-figur potensial menang. Melihat geopolitik Sumut yang sedemikian dinamis ada beberapa kombinasi koalisi yang biasa terjadi; pertama, cluster partai: koalisi Islamis-Nasionalis, koalisi Nasionalis-nasionalis, dan koalisi Islamis-Islamis. Kedua, komposisi figur pelangi yang merujuk pada cluster agama yaitu Islam-non Islam, dan pasangan Islam-Islam. Tulisan ini ingin meninjau bagaimana peluang dan potensi pasangan Islam-Islam dalam format koalisi hijau dari dua partai Islam terbesar di Sumatera Utara, figur Gatot Pujo Nugroho dari PKS dengan Fadly Nurzal dari PPP. Seberapa efektif peluang koalisi hijau ini?

### **Koalisi Hijau**

Majunya kader partai Islam di Pilgub Sumut merupakan langkah berani. Benar bahwa mayoritas penduduk di Sumut adalah muslim, tetapi dalam sejarah kemenangan partai Islam dalam pemilihan umum sejak awal pemilu diselenggarakan belum pernah terjadi. Sumut dikenal sebagai wilayah

nasionalis, Golkar sejak lama berkuasa di sini baik di Pantai Timur maupun Pantai Barat, sebelum direbut oleh Demokrat pada pemilu 2009, sementara di wilayah Utara bercokol PDIP.

Konfigurasi koalisi hijau merupakan koalisi partai-partai Islam yang mengusung figur-figur Islam. Di Sumatera Utara hal ini bukan hal yang baru pertama terjadi. Tetapi, pada Pilgubsu 2008 koalisi Hijau sudah pernah terjadi dan berhasil mengantarkan pasangan Syamsul Arifin – Gatot Pujo Nugroho menjadi pemenang dalam perhelatan itu. Ketika itu pasangan Syampurno ini didukung oleh dua partai Islam terbesar di Sumut yaitu PKS dan PPP, bersama keduanya terdapat pula partai Islam lainnya seperti PBB, PKNU dan partai non parlemen lainnya. Setidaknya di sini ada tiga argumentasi yang dapat dikemukakan dari peristiwa itu; pertama, keinginan politik umat Islam agar kekuatan Islam menyatu sebagai manifestasi kebersatuan umat Islam dan ukhuwah islamiyah; kedua, keinginan umat agar mereka dipimpin oleh figur Islam sebab mayoritas penduduk di Sumut adalah muslim. Di luar partai Islam, koalisi ini juga mendapat restu dari dua organisasi Islam terbesar di Sumut yaitu Alwashliyah dan Muhammadiyah; ketiga, dukungan yang didapatkan dari pasangan Syampurno sangat signifikan di garis pantai Timur, selain tingkat populasi pemilih yang gemuk, pantai timur juga merupakan kantong-

kantong pemilih Islam. Peta politik inilah yang dapat dijadikan modal kuat mengusung kembali, jika tidak melanjutkan koalisi hijau di pilgubsu 2013.

### **Gatot-Fadly**

Sejak setahun lalu Gatot sudah dipersiapkan oleh partainya PKS untuk meneruskan perjuangan politik dakwah di level eksekutif. Restu dari DPP PKS di Jakarta ia dapatkan dengan mudah tanpa hingar bingar internal pada Mukernas Medan beberapa waktu yang lalu. Hal ini wajar sebab trend popularitas Gatot pasca mendapatkan “warisan” jabatan Gubernur dari Syamsul Arifin melejit melebihi figur lain melalui manuver-manuver kontroversial Gatot antara lain melakukan “bersih-bersih” birokrasi dan konsolidasi daerah. Beberapa lembaga survey yang sudah merilis hasil surveynya ke publik mengkonfirmasi lonjakan popularitas Gatot dengan prosentase yang sangat signifikan, popularitas inilah yang diasumsikan akan berbanding lurus dengan tingkat elektabilitasnya dan potensial untuk menang di Pilgubsu 2013.

Jabatan Gatot sebagai Plt. Gubernur Sumut sekarang memberikan kemudahan baginya untuk turun ke level akar rumput mengenalkan diri sambil mengambil simpati masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemerintahan. Jabatan



itu juga yang memudahkannya membangun jaringan di tingkat elit daerah sehingga pengalaman-pengalaman itu bisa memperkuat modal kepemimpinannya. Figur Gatot sebagai Jawa “Mataraman” memudahkannya juga mendapatkan pengakuan primordial “ashabiyah”, jalinan kesukuan dari masyarakat Jawa Pujakesuma, hal ini penting sebab komunitas Jawa merupakan populasi yang cukup besar di Sumut dan jumlah itu sangat signifikan untuk menambah daya tawar politik di pemilihan.

Figur Fadly merupakan salah seorang dari beberapa figur penting di balik layar kemenangan Syampurno di 2008. Dukungan PPP kepada pasangan pemenang pilgubsu 2008 itu tidak bisa dianggap remeh, apalagi diabaikan. Karena itu majunya Fadly dalam pencalonan di Pilgubsu 2013 ini merupakan langkah maju terutama dalam politik PPP di Sumut. PPP merupakan partai tua yang memiliki pengalaman panjang dalam dinamika politik di tanah air, tentu juga di Sumut. Tetapi dalam catatan saya, belum pernah PPP mencalonkan figur kadernya sendiri di level Pilgubsu. Karena itu, majunya Fadly ini dapat diapresiasi dengan baik setidaknya dalam beberapa konteks,; pertama, Fadly merupakan politisi muda berbakat, anak Pesantren, dan jebolan IAIN Sumatera Utara, perkaderannya di organisasi Islam mengkonfirmasi bahwa

Fadly adalah representasi politik santri, yang sesungguhnya lama absen di kancah politik Sumut. Kekosongan inilah yang menurut saya sangat masuk akal ketika Fadly mendeklarasikan dirinya menjadi kandidat yang akan bermain di Pilgubsu 2013. Kedua, Fadly mengkonfirmasi bahwa perkaderan di partai politik, terutama di PPP masih berjalan, sementara publik dalam suasana kecewa sebab partai tidak melakukan perkaderan politik terhadap kadernya, partai tidak kurang hanya perusahaan rental kapal/kenderaan untuk digunakan orang yang sanggup menyewanya.

Dalam pengamatan saya, sebagaimana pengamatan orang banyak, setiap sesuatu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Gagasan Koalisi Hijau ini, antara Gatot (PKS)-Fadly (PPP), mungkin akan memiliki beberapa halangan; pertama, halangan ideologis. Meski sama-sama partai Islam komunikasi politik antara keduanya belum tentu bisa terjadi secara efektif dan berhasil, sebab ideologi PKS yang memegang prinsip agak ketat dengan PPP sebagai representasi Islam mainstream Indonesia. Hambatan usia partai, Tuanya PPP dengan Mudanya PKS bisa saja menjadi penghalang dialog-dialog yang memungkinkan terwujudnya koalisi.

Dua modal dari tiga modal yang dipersyaratkan secara konvensional sudah dimiliki oleh kedua figure ini, pertama, modal social. Keduanya merupakan orang organisatoris yang memiliki basis massa Islam yang solid, kedua, modal politik. Keduanya juga punya mesin partai yang kuat ke akar rumput, dan prosentase kursi parlemen yang memenuhi syarat pencalonan sesuai UU pemilihan yang berlaku. Hanya tinggal memenuhi satu modal lagi, yaitu modal ekonomi. Inilah factor pendukung yang tak kalah penting, sebab kita tahu kedua partai tersebut bukanlah partai “kaya”. Jika saja semua modal tersebut dapat terpenuhi, komunikasi politik tidak mendapatkan halangan yang serius, bukan tidak mungkin koalisi hijau akan terkonsolidasi lagi, dan bukan tidak mungkin koalisi itu bisa menjadi pemenang dalam pilgubsu 2013. Kita tunggu saja!

## **E. Banyak Parpol Untuk Siapa?**

Senin malam 7/7/08 ketua KPU Abdul Hafiz Ansary didampingi para anggota KPU lainnya telah mengumumkan dan menetapkan parpol-parpol yang lulus verifikasi faktual dan berhasil menjadi peserta pemilu 2009. Ada 18 parpol yang memenuhi persyaratan sesuai oleh UU Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Setelah hasil verifikasi dibacakan, segera eskalasi suhu politik nasional meningkat. Dimulai pada minggu ini saat parpol-parpol akan meluncurkan manuver-manuver politiknya untuk meraup simpati rakyat.

Jumlah parpol nasional peserta pemilu 2009 ini lebih banyak dibandingkan peserta pemilu 2004, tetapi lebih sedikit dibandingkan pemilu 1999. Pada Pemilu 2004 diikuti 24 parpol sedangkan Pemilu 1999 diikuti 48 parpol. Secara keseluruhan ada 34 parpol peserta Pemilu 2009 dan ditambah enam parpol lokal yang khusus berada di Nangroe Aceh Darussalam.

Banyaknya parpol-parpol baru yang menjadi peserta pemilu 2009 segera memunculkan tanya, untuk siapa parpol-parpol tersebut? Sejauh mana parpol-parpol tersebut memberikan kontribusi bagi pembangunan demokrasi di Indonesia?

## **Ringkihnya Tubuh Parpol**

Multi partai bukanlah sistem baru di Indonesia, namun Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang, partai-partai politik lebih banyak mendatangkan masalah ketimbang membawa manfaat bagi kepentingan rakyat. Dari catatan sejarah, partai politik merupakan hasil dari patahan-patahan sejarah (Daniel Dakhidae, 1999). Pada zaman pendudukan Jepang, partai politik merupakan peristiwa patahan sejarah yang besar, karena tidak menyaksikan partai politik. Ketika kemerdekaan diraih pada tahun 1945 masyarakat Indonesia terlarut dalam euforia demokrasi yang luar biasa, parpol-parpol menjamur pada masa demokrasi parlementer dengan ideologi yang beraneka ragam. Disini parpol tidak hanya memainkan peran sebagai penyalur aspirasi rakyat tetapi juga sebagai penyalur ideologi. Perbedaan ideologi merupakan masalah serius pemicu konflik terbesar pada waktu itu.

Memasuki masa kejayaan demokrasi terpimpinnya Soekarno, beberapa partai diberangus oleh pemerintah sehingga tamat riwayatnya; Masyumi dan PSI. Episode berikutnya, pada masa Soeharto parpol-parpol dipaksa melakukan fusi dan harus mengakui kedigdayaan Golkar sebagai sebuah mesin politik Orde Baru bagi militer dan birokrasi. Baru kemudian, di masa

reformasi, partai-partai baru yang tidak memiliki akar sejarah bermunculan.

Era reformasi merupakan peluang untuk mengganti struktur massa setelah terjadi gap yang cukup menganga antara elit partai dengan konstituen. Persoalannya adalah bagaimana membuat partai-partai berakar pada masyarakat, dimulai dari meluasnya jaringan organisasi partai sampai akar rumput? Perluasan jaringan organisasi partai sejauh ini hanya untuk memobilisasi dukungan massa dalam rangka meraih kekuasaan. Bukan untuk menerjemahkan fungsi-fungsi partai yang lebih komprehensif kepada masyarakat. Faktanya, parpol-parpol selama ini tidak berhasil menampilkan diri sebagai basis artikulasi, partisipasi, dan kontrol publik terhadap negara.

Parpol di Indonesia lebih kental dengan personalitas para elitnya (personalisme) ketimbang sebagai organisasi yang mengakar ke bawah. Hal yang menonjol adalah ketergantungan organisasi pada figur pemimpin puncaknya ketimbang kinerja secara keseluruhan. PDIP lebih tergantung pada figur Megawati, PKB dengan Gusdur, dan Demokrat pada Susilo Bambang Yudoyono. Keadaan ini memunculkan kultus individu dan memperlemah organisasi partai serta dengan

segera terjadi stagnasi kepemimpinan yang demokratis sekaligus melemahnya institusionalisasi sistem kepartaian.

Tampilnya para aktor yang tidak berbasis partai juga menandakan sarana rekrutmen partai yang tidak berfungsi dengan baik. Keadaan ini tidak lain merupakan negasi terhadap aspirasi para pemilih yang telah berpartisipasi dalam pemilu. Kondisi ini juga dapat disebut dengan rendahnya derajat keterwakilan dan lemahnya akuntabilitas pemimpin partai politik.

Selanjutnya, partai politik lebih digerakkan oleh politik identitas yang sektarian ketimbang oleh ideologi dan perjuangan rakyat. Partai-partai politik mengklaim berbasiskan ideologi nasionalisme, Islam, sosialisme, developmentalisme. Tetapi ideologi tersebut diartikulasikan pada ranah eksklusifisme yang membawa dampak pada macetnya konsolidasi demokrasi. Kiprah partai politik tidak mencerminkan secara substansial ideologi yang diusung. Karena ideologi hanya digunakan sebagai *emotional approach* untuk menciptakan hubungan emosional dengan konstituen. Kesan yang tampak hanya pragmatisme untuk memburu kekuasaan dan kekayaan tak berujung.

Kepartaian di Indonesia jauh dari budaya oposisi. Di masa Orde Baru, dua partai non-pemerintah (PPP dan PDI) adalah lawan politik yang tidak berperan sebagai oposisi, melainkan sebagai “penggembira” yang cukup puas dengan menerima pembagian jatah kekuasaan dan kekayaan secara terbatas. Di Indonesia, oposisi tidak muncul dari dunia kepartaian, melainkan dari gerakan sosial dan aksi kolektif massa yang menentang otoritarianisme. Kekuatan inilah yang merupakan kekuatan terbesar dalam meruntuhkan Orde Baru.

Selama ini, soal ketiadaan oposisilah yang membuat transisi demokrasi pasca Orde Baru berjalan stagnan. Tidak adanya kesinambungan dalam peralihan transisional antara oposisi yang mengawal transisi dengan kekuatan lain yang kemudian mengontrol transisi. Di masa Reformasi ini oposisi sebenarnya tidak lagi menjadi tabu. Akan tetapi, tidak ada partai yang membangun kultur dan gerakan oposisi. Semua partai menceburkan diri ke dalam pelangi kekuasaan. Taruhannya jelas; tersendatnya laju mekanisme *check and balances*.

### **Parpol Untuk Rakyat**

Banyak parpol baru merupakan kabar gembira sekaligus keprihatinan. Kabar gembiranya ada pada meluas dan beragamnya saluran-saluran aspirasi politik rakyat. Pada saat



yang sama, pengamat merasa prihatin akan banyaknya parpol baru. M. Qodari (Direktur Eksekutif Indobarometer) menyebutkan bahwa banyaknya parpol baru tersebut cukup memperhatikan. Karena sistem presidensial yang selama ini dianut dalam tata pemerintahan Indonesia tidak cocok dengan sistem multipartai. Kekuatan partai justru terpecah-pecah dan akan menyulitkan konsolidasi politik dan eksekusi kebijakan pemerintah. Parpol-parpol baru yang ada tidak memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya dalam hal pemikiran dan program kerja. Konsekuensinya banyak parpol tidak membawa nilai tambah bagi masyarakat dan pembangunan demokrasi.

Bagaimanapun partai politik dan wakil rakyat harus memiliki komitmen dan ketulusan untuk memperjuangkan harkat dan martabat rakyat. Peran wakil rakyat dan parpol harus semakin meningkat seiring dengan meningkatnya dinamika sosial. Jika sekarang ini semakin banyak partai politik yang bersaing, maka seharusnya hal itu berdampak langsung pada perbaikan kehidupan rakyat. Sebab banyaknya parpol dan wakil rakyat yang berkualitas berarti semakin banyak elemen yang memperjuangkan nasib rakyat.

Dengan demikian rakyat akan terbebas dari problematika kehidupan. Bukan sebaliknya. Menguatnya persaingan politik

justro menyeret rakyat untuk dijadikan sekedar legitimasi perjuangan untuk meloloskan agenda individu atau golongan. Hal seperti ini sama sekali tidak mendidik rakyat, rakyat harus memiliki kedaulatan dan partai politik merupakan wahana untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.

Wujud meningkatnya kemampuan wakil rakyat dalam menampung aspirasi pemilihnya berarti juga semakin melibatkan rakyat dalam pembuatan keputusan politik. Dengan demikian, masyarakat bisa ikut mendorong parpol dan wakil rakyat untuk tidak sekedar menjadi instrumen demokrasi, tetapi benar-benar memfungsikan diri sebagai kekuatan politik yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan rakyat. Kalau memang kehadiran parpol membawa manfaat langsung bagi kehidupan rakyat, tanpa kampanye pun rakyat akan berbondong-bondong memilih partai tersebut.

### **Kedepankan Etika Politik**

Persaingan politik dalam bentuk apa pun, kepentingan harus ditempatkan dalam etika politik. Bila tokoh-tokoh politik lewat parpolnya berniat membantu mengembangkan demokrasi di Indonesia, mereka harus mampu mengembangkan etika politik dan memenuhi harapan rakyat. Moralitas elit politik kita harus diubah dari politik kepentingan menjadi politik nurani.

Berpolitik hendaknya tidak sekedar menjadi wahana kontestasi untuk merebut kekuasaan.

Kekuasaan harus diwujudkan melalui implementasi nyata mewujudkan kedaulatan rakyat dan amanat hati nurani rakyat. Yang demikian tidak berarti parpol tidak boleh berkonsentrasi memperebutkan kekuasaan, karena salah satu fungsi parpol memang untuk merebut kekuasaan. Kekuasaan disini dimaknai sebagai upaya mewujudkan visi dan misi dan program partai politik, jika ia memegang tampuk kepemimpinan dan pemerintahan. Parpol sebagai representasi ide-ide juga harus mampu mencerminkan preskripsi tentang negara dan masyarakat yang diidealitaskan.

Oleh karena itu parpol seharusnya dibentuk bukan atas dasar selera elit, atau karena tersingkir dari kekuatan parpol tertentu, tetapi memang atas dasar kebutuhan rakyat dan tidak mengabaikan konstruksi masyarakat. Demikian pula, wakil rakyat harus memahami apa sebenarnya yang diharapkan oleh konstituen dan visi yang hendak ia perjuangkan untuk mewujudkan aspirasi tersebut.

Partai politik dan wakil rakyat harus mampu melakukan pelembagaan demokrasi secara kukuh. Konflik antar elit politik dan perpecahan yang melanda beberapa partai politik

sebenarnya mencerminkan parpol kita belum mampu melakukan pelembagaan demokrasi secara baik. Pelembagaan demokrasi diperlukan, bukan saja sebagai mekanisme demokrasi untuk menyelesaikan masalah-masalah internal partai, tetapi juga untuk menjaga *fatsoen* politik. Sehingga politik tidak kehilangan dimensi moralitasnya.

Jika persaingan politik yang berlangsung adalah tanpa etika dan moral politik, tidak ada garansi bahwa pemerintahan yang dihasilkan oleh keseluruhan hasil pemilu 2009 menjadi bersih, transparan dan bertanggung jawab seperti yang diharapkan rakyat Indonesia dan cita-cita Reformasi. Apapun parpolnya hendaknya tidak kehilangan orientasi perjuangan untuk membawa rakyat menuju perubahan yang lebih baik.

## **F. Benah-Benah Partai Ka'bah**

Drama konflik berkepanjangan di tubuh PPP antara Romi dengan Djan Faridz akhirnya berakhir pasca keputusan MA yang mengugurkan gugatan Djan Faridz. Hasilnya, Kubu Romi merupakan pemegang SK Menkumham RI, di mana secara politik hukum sudah bisa bekerja mengatasmakan Partai ini. Selesainya konflik hukum ini sangat berarti bagi PPP maupun pendukung fanatiknya sebab perhelatan pemilu 2019 tidak dapat dikatakan lama lagi. Karena itu usaha berbenah-benah mempersiapkan kerja-kerja politik memenangkan pemilu mesti diambil sebagai pilihan terbaik. Momentum peringatan Harlah PPP tahun 2018 ini nampaknya baik untuk membaca kondisi real politik kekinian dan apa yang penting dipertimbangkan bagi PPP dalam mencapai target-target kerjanya sampai 2019. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan mengeksplorasi beberapa kemungkinan bagi PPP mengambil peluang dalam perhelatan pemilu 2019, terutama upaya pascakonflik.

### **Menengok Masalah**

Untuk mengukur seberapa eksistensi sebuah partai adalah seberapa capaiannya (perolehan kursi) di ajang pemilu, seberapa besar pendudukan kader-kader mereka di eksekutif level provinsi dan kabupaten. Berdasarkan besaran itu dapat dilihat bagaimana partai seperti PPP di kancah politik nasional selama ini. Secara historis, Partai Kakbah ini merupakan partai yang merepresentasikan aspirasi umat Islam, terutama di masa orde Baru. Namun, dibandingkan rekan seumurannya seperti Golkar dan PDI (PDIP), PPP lebih dahulu bernasib miris. Padahal di masa Orde Baru PPP selalu menempati urutan ke-2 setelah Golkar. Trend penurunan suara dari Pemilu ke Pemilu merupakan fakta tak terbantahkan. Di sinilah persoalannya, pasca reformasi, eksistensi PPP semakin terancam. Bahkan pemilu paling tragis bagi PPP adalah pemilu 2009 yang mengkonfirmasi raihan suara yang turun drastis 5,38%. Padahal pada Pemilu 2004, mereka meraih sekitar 8,15%. Lalu, bagaimana membayangkan keadaan Partainya ulama ini di pemilu 2019?

Ada beberapa argument yang bisa diajukan untuk menjelaskan kondisi ini. *Pertama*, faktor internal, mulai dari konflik elit, lemahnya institusionalisasi partai, gagapnya partai membaca

perubahan dan melakukan rekonstruksi gerakan, serta kegagalan dalam membangun *platform* yang populis. Sampai di sini dapat dilihat bahwa simbol-simbol agama yang luhur cuma dipakai sebagai identitas pengenalan, landasan etik moral politik belum tampak optimal, ayat-ayat Tuhan yang dikumudangkan tidak lebih dari mantra yang melenakan. Tantangan paling keras pada PPP adalah ketika berada dalam pusaran kemelut kasus al-Maidah 51, di mana publik Islam kemudian secara massif terpolarisasi kepada arus besar menuntut Ahok sebagai orang yang bertanggung jawab, tetapi di sisi lain Partai Kakbah ini diidentifikasi oleh umat sebagai golongan yang tidak berpihak pada mereka. Dalam konteks ini berarti ummat menganggap bahwa artikulasi politik PPP yang riil seperti politik pembelaan terhadap umat tidak terlihat, sementara yang ada hanya kepentingan pragmatis selingkar kecil oligarki Islam itu tanpa memperhitungkan seberapa luas kepentingan tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam yang kompleks.

*Kedua*, faktor eksternal, di luar PPP yang mengklaim sebagai partai Islam ada beberapa lagi partai yang eksis dengan klaim yang sama. Dalam hal ini PKS. Jadi perebutan ruang klaim ini yang terjadi dan masih terasa di akar rumput, klaim tentang siapa yang paling mewakili suara Islam. Di sisi yang berbeda, ada juga partai populis-terbuka yang memanfaatkan ceruk suara

yang sama, suara ummat. Sejalan dengan itu, ada fenomena masyarakat Islam yang belum menguntungkan bagi partai Islam seperti PPP. Misalnya, fenomena meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap apa saja yang teridentifikasi sebagai Islam. Islam di sini bukan hanya berlaku sebagai agama, tetapi lebih dari itu berlaku sebagai objek konsumsi. Seperti pasar keuangan Islam, asuransi Islam, Makanan Halal, Fashion Islam, dan bahkan wisata Islam. Minat masyarakat berislam di ruang-ruang sekuler semakin tinggi, tetapi minat yang besar dan terus tumbuh itu tidak berbanding lurus dengan minat mereka ke partai Islam.

## **Berbenah**

Ada anggapan umum bahwa partai ini dianggap sebagai partai tua dan miliknya orang-orang tua. Namun, gerak-gerak berbenah sebenarnya sudah tampak pada partai Kakbah ini. Contohnya, kemunculan Romahurmuzy bisa dimaknai sebagai usaha memodernisasi dan memudahkan partai. Usia ketua umum yang relative masih energik dianggap bisa melakukan penetrasi politik yang modern dan canggih. Komposisi kepemimpinan di DPP yang juga banyak berada di umur-umur muda dan produktif. Mereka harus memperhatikan kecenderungan dan kebutuhan masyarakat, membangun isu-isu riil yang menjadi



prioritas untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang kompleks seperti kesejahteraan, ketersediaan lapangan kerja dan pendidikan serta pembelaan terhadap perempuan. Apa lagi sekarang, jika diperhatikan beberapa partai sudah mulai beralih dan bekerja menyasar pemilih millennial. Kerja ini mengandaikan penguasaan kerja politik yang adaptif terhadap teknologi informasi dan media sosial seperti FB, Twitter, dan WA. Isu-isu populisme juga sedang digandrungi masyarakat.

Kedua, Sekarang sebagian kalangan Islam menyangsikan kemampuan demokrasi sebagai mekanisme pendistribusian kekuasaan yang fair dan relevan. Singkatnya demokrasi mereka anggap sebagai jalan yang tidak Islami, bahkan ada organisasi yang menolak Pancasila dan NKRI. Namun, PPP tetap kukuh memegang konsep Islam moderat, keislaman keindonesiaan. Di sinilah partai ini patut diapresiasi dengan tinggi terutama tentang komitmen kebangsaan mereka. Memang, meningkatkan pemahaman geopolitik dan ekopolitik yang baik dalam setting kemajemukan bangsa juga merupakan tugas lain partai Islam. Pada level tertentu partai bukan hanya mendapatkan keuntungan citra sebagai Islam ramah, bahkan lebih dari itu kerja seperti ini dilakukan untuk memperbesar marketnya dan lepas dari kungkungan pasar Islam yang terbatas. Dalam konteks ini menarik sekali memahami puisi Romahurmuzy

pada acara refleksi tahun baru 2017 kemarin (<http://ppp.or.id/berita/resolusi-tahun-baru-2018-ketum-romahurmuziy-tulis-puisi---.html>). Petikannya sebagai berikut;

“Menapak hari perdana di 2018,  
Wujudkan batin yang penuh welas,  
Karena tak mungkin menyamakan perbedaan  
yang sudah jelas,  
Berkawan tak berarti harus memelas,  
Berhadapan tak bermakna memaki dengan  
kata pedas  
Selamat datang tahun baru, Selamat tinggal  
tahun kelabu  
Selamat datang persahabatan sebangsa,  
Selamat tinggal cacian sesama saudara  
Selamat Tahun Baru  
Dengan semangat mengharu-biru, Masa depan  
Indonesia hanya satu, Menjadi negara paling  
maju  
Hingga bangga anak dan cucu, Karena  
leluhurnya memuja ilmu, Mengesampingkan  
kuasa nafsu  
Selamat Tahun Baru!”

Ketiga, tantangan untuk berbenah bagi partai Kakbah adalah *vote buying*, jual-beli suara. Bagaimana komitmen partai ini untuk menghindari perilaku jual-beli suara? pasalnya, demokrasi dihadapkan pada gelombang limbah politik yang berbau menyengat dan mengganggu tertib nafas sehingga menyesak dada. Limbah politik itu dikenal sebagai politik uang sehingga mengganggu kerja syaraf pikir rakyat bahkan menghilangkan kewarasan. Setiap menjelang pemilihan umum beredar isu tentang biaya politik (*political cost*) untuk pencalonan dari puluhan juta hingga mencapai ratusan milyar, termasuk di dalamnya biaya perahu politik, publikasi, sosialisasi, mobilisasi dukungan, dan segala tetek-bengeknya. Ada semacam keyakinan umum bahwa kandidat yang paling kuat modalnya lah yang paling mungkin menang. Apa lagi pemilihan kepala daerah secara langsung diadakan, isu politik uang dalam pemilihan pemimpin tidak dapat dihindarkan. Mulai dari pemilihan kepala desa, bupati, gubernur. Fakta ini menunjukkan bahwa kepemimpinan, keterwakilan, dan kekuasaan harus tunduk pada daulat modal, pada kekuatan uang.

Oleh karena itu, sebagai Partai yang didirikan dan dibimbing oleh para ulama maka PPP hendaknya mengedepankan politik moral. Dalam tradisi politik demokratis yang dibangun oleh

para filosof seperti Aristoteles, Plato, Al-Kindi dan Al-Faraby, akhlaq merupakan keutamaan. Ia merupakan aktifitas dan nalar praktis yang harus ditempatkan dalam prinsip kepemimpinan. Dari nalar utama inilah politik dimaknai sebagai upaya menciptakan, dalam Bahasa UUD, sebagai memajukan kesejahteraan umum, orang latin mengatakan bonum publicum, orang Barat menyebutnya common good, dan pemikir muslim menyatakan al-maslahah ar-raiyah.

## **Penutup**

Beberapa argument yang diajukan di atas tentu saja tidak bersifat tertutup dan terbatas. Ada banyak argument lain yang bias menjelaskan bagaimana usaha partai ini berbenah. Di hari lahirnya tahun ini agaknya organisasi ini bias melakukan refleksi dan bekerja secara realistis yang muaranya tidak hanya memberikan keuntungan electoral bagi partai, tetapi juga kerja yang diridai Allah Swt. Selamat Harlah PPP. PPP bergerak bersama rakyat!

## **G. Al-Washliyah, Dakwah dan Siyasah**

Alwashliyah sebagai organisasi yang muncul di masa pergerakan perjuangan kemerdekaan tentu memiliki karakter gerakan dakwah keagamaan sekaligus gerakan politik pembebasan dari penjajahan yang sangat khas. Hubungan itu niscaya berlaku kekal dalam sepanjang perjalanan organisasi besar ini. Lantas, seperti apa metamorfosa hubungan dakwah dan *siyasah* dalam organisasi Alwashliyah ini dari dulu hingga kini?

### **Hubungan Kekal**

Alwashliyah merupakan organisasi yang menganut I'tikad (keimanan) Ahlu-sunnah wa al-jamaah, mengakui pemikiran fikih empat mazhab, tetapi menekankan pada mazhab Syafii. Di Sumatera Utara sebagai tempat kelahiran organisasi ini banyak dari anggotanya di sepanjang pantai timur dan dekat dengan tradisi tarekat Naqsyabandiyah terutama di Basalam Langkat. Alwashliyah juga merupakan Islam yang tradisional sekaligus modern, mereka mempelajari kitab kuning, kitab-kitab klasik Islam tetapi juga serius berlatih *marching* band di sekolah-

sekolah mereka, inilah ekspresi Islam yang disebut oleh Kareel Stenbrink sebagai Islam kompleks. Hingga kini, Alwashliyah berhasil membangun identitas keislaman sekaligus kebudayaan yang kuat di Sumatera Utara, sebagaimana NU di Jawa Timur dan Muhammadiyah di Yogyakarta.

Di masa-masa awal berdirinya organisasi ini kegiatan dakwah sangat gencar dilakukan terkait dengan perlawanan terhadap penjajahan Belanda yang member jalan mulus bagi masuknya agenda propagandis dan misionaris Kristen ke kantong-kantong Islam. Sehingga, dengan demikian dapat dibayangkan kadar militansi para kader Alwashliyah dalam memperjuangkan syiar Islam di tanah apa yang dikenal dahulu sebagai Sumatera Timur. Kegigihan para kader Alwashliyah berdakwah di seluruh pelosok daerah di Sumatera Utara jelas mendapatkan apresiasi positif dari kalangan *harakah* dakwah di tanah air. Kegemilangan sejarah dakwah Alwashliyah secara apresiatif dicatat oleh ulama Moderat Buya HAMKA dalam majalah *Pedoman Masyarakat*:

*“Adakah satu pergerakan Islam yang dapat mencapai rekod satu perkumpulan seperti al-Jami’ah al-Washliyah?. Ia berusia sepuluh tahun tetapi telah dapat menyiarkan Islam di lembah Porsea yang subur itu, sehingga telah terdapat di sana tidak*

*kurang dari 20.000 orang Islam yang baru sehingga lantaran itu, goncang, dibuatnya tiang salib, bergerak sendiri gereja, dengan lonceng ditandingi dengan suara azan yang sayup-sayup sampai. Cobalah kira-kirakan sendiri, bagaimanakah agaknya kelak barang 20 tahun atau 30 tahun lagi.”*

Sebagai organisasi modern Alwashliyah memang tidak bisa menghindar dari berbagai dimensi kehidupan yang melingkupi umat. Karakter organisasi seperti ini setidaknya dapat dirujuk dalam pemikiran Talcott Parsons dalam “*Structure and Process in Modern Societies*”, (1960; 45-46). Parsons mengatakan bahwa organisasi-organisasi di suatu Negara diklasifikasikan menjadi empat kelompok, antara lain; (1) berorientasi ekonomi seperti perusahaan; (2) berorientasi politik; (3) organisasi integratif yang mengurus kedayagunaan dalam masyarakat seperti lembaga hukum dan pemelihara pola yang member sumbangan untuk mempertahankan pola budaya, pendidikan yang diwakili oleh otoritas agama dan sekolah.

Namun dapat diperdebatkan bahwa seringkali organisasi memperlihatkan orientasi ganda sekaligus atau saling berurutan. Suatu organisasi politik, misalnya, dapat berhubungan dengan perusahaan atau kegiatan bisnis untuk membantu menjamin keamanan finansial organisasi. Lebih

jamak lagi ditemukan organisasi keagamaan, pendidikan dan budaya mempunyai ciri-ciri politik untuk memungkinkannya mewujudkan tujuan utama organisasi guna mempertahankan orientasi budaya dalam masyarakat. Afiliasi dengan percaturan politik penting bagi beberapa organisasi demi kelangsungan hidupnya.

Relasi afiliatif organisasi keagamaan dengan organisasi politik sangat kuat ketika ormas keagamaan menghadapi suatu ancaman yang dapat memperlemah organisasi, entah lewat persaingan keras dengan organisasi lain maupun penindasan oleh penguasa. Di sinilah posisi Alwashliyah dengan tantangan internal dan eksternal tidak dapat menghindar dari orientasi ganda, dakwah sekaligus politik, dakwah sekaligus pendidikan, ekonomi, budaya.

Dengan demikian, sekalipun Alwashliyah selalu antusias dalam kegiatan sosial, pendidikan dan keagamaan, organisasi ini sejak didirikan juga sama peduli dan bahkan terlibat aktif dalam politik praktis. Meskipun secara normatif Alwashliyah tidak mengatur tentang keterlibatan dalam politik elektoral, bukan juga partai politik dan tidak pernah mendirikan partai politiknya sendiri, bagaimanapun juga organisasi ini telah



memiliki sejarah keterlibatan yang panjang dalam politik praktis melalui partai politik yang ada.

Sejak tahun-tahun awal berdirinya, misalnya, Alwashliyah berhubungan erat dengan partai politik Masyumi di Era Soekarno. Demikian halnya Alwashliyah punya saham besar di PPP di masa Soeharto, sampai kini di era reformasi polarisasi politik Alwashliyah lewat kehadiran kader-kadernya di berbagai parpol dengan ragam ideologi. Sekalipun demikian, pencapaian politik Alwashliyah tidak pernah mendekati ketinggian prestasi sosialnya di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. Prestasi politik kekuasaan Alwashliyah sepanjang pengamatan saya paling tinggi di level legislatif dan yudikatif dan kondisi ini tidak berarti Alwashliyah tidak memberikan apapun pada perbaikan kualitas pembangunan dan pengembangan *civic society* di era demokrasi.

Perkembangan kontemporer memunculkan beberapa fakta yang tidak dapat diabaikan begitu saja terutama bagi organisasi yang mengkhidmahkan dirinya kepada umat. Modernisasi, perkembangan teknologi informasi, pertumbuhan ekonomi, dan segala bentuk perubahan sosial yang terjadi telah menggeser fungsi dan kedudukan ulama di mata masyarakat. Di sisi lain tampak kegagalan ulama dan organisasi mereka mengantisipasi

dan menyikapi perubahan, minimnya keteladanan, dan keberpihakan ulama kepada umat. Ada juga fakta di mana ulama lewat produk ijtihad dan fatwanya sering tidak senafas dengan masyarakat. Bahkan terkesan mengacaukan ketimbang mendamaikan. Ini bukan generalisasi. Ini hanya pembacaan atas kecenderungan kuat yang menggejala di tengah kehidupan kita sekarang.

Misalnya, fenomena keislaman di Medan kontemporer menguak beberapa problematika yang kompleks ketika Islam berhadapan dengan pembangunan baik ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Apa yang tampak di permukaan adalah ketidakberdayaan umat dalam menghadapi gelombang pembangunan pusat pertokoan dan perbelanjaan yang membuat masjid-mesjid harus dirubuhkan, pedagang eceran harus kehilangan tempat berjualan, dan sumbu pendek konflik disebabkan sengketa tanah dan sumber daya alam. Kita juga dengan mudah mendapatkan kenyataan bahwa di kantong-kantong kemiskinan terutama di daerah pesisir senyatanya mereka adalah umat Islam, warga Alwashliyah, atau setidaknya memiliki tradisi *Washliyin*. Sampai di sini organisasi tentu membutuhkan fokus penyelesaian dan penyelamatan ekonomi warganya.

Umat juga harus prihatin terhadap figur ulama, *ustadz*, muballigh terjebak dalam selebrasi ekonomi politik yang sarat dengan permainan keuntungan dunia, kemegahan dan kemewahan. Mereka tidak tahan berada di garis demarkasi perjuangan membela umat yang masih miskin, bodoh, terpinggirkan, tersingkirkan dalam pusaran kapitalisme ekonomi dan politik praktis.

Di usia jelang seabad, signifikansi dari eksistensi organisasi besar seperti Alwashliyah bukan hanya untuk diagungkan, prestasi kegemilangan dakwah di masa awal dulu bukan hanya sekedar kenangan manis untuk diceritakan ke anak cucu. Tetapi kebesaran dan kegemilangan tersebut justru mengandung tanggung jawab yang luar biasa besar terkait dengan problematika keummatan yang berlangsung saat ini. Dengan kata lain boleh jadi Alwashliyah bertanggung jawab terhadap perjalanan kehidupan keagamaan dan kebangsaan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Wa Allahu a'lam bi as-shawab.

## **BAB III**

### **DILEMA DESENTRALISASI KEKUASAAN POLITIK**

#### **A. Anomali Otonomi**

Belakangan ini banyak kalangan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Secara ideal konsep otonomi daerah adalah ruang demokratisasi bagi rakyat lokal untuk dapat meningkatkan partisipasi di daerah, mengupayakan kepentingannya tanpa dikte dari pusat, dan dengan mudah bisa mewujudkan kesejahteraannya. Tetapi, di lapangan, fenomena dan fakta menjelaskan kelebihan-liaran pelaksanaan demokratisasi. Jauh dari apa yang dibayangkan berikut anomalnya. Dalam keadaan itu, bagaimana dengan nasib rakyat?

#### **Idealita**

B.C. Smith (1998) mengatakan bahwa munculnya perhatian terhadap transisi demokratisasi di daerah berangkat dari suatu keyakinan bahwa demokrasi di daerah akan berpengaruh pada demokrasi di tingkat nasional. Hal ini menegaskan peningkatan kualitas demokrasi di daerah determinan memengaruhi

peningkatan kualitas demokrasi di tingkat nasional. Kualitas tentu saja menyangkut kebudayaan demokrasi, pendidikan, dan nilai dari sebuah partisipasi.

Tujuan politik otonomi daerah adalah untuk menciptakan hubungan yang lebih adil dan terbuka antara pusat dengan daerah dalam kerangka NKRI. Kesatuan dapat direkatkan dalam suasana politik desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahannya. Tetapi, cita-cita ideal seperti ini bukan sesuatu yang mudah diwujudkan, Indonesia sendiri berpengalaman dalam menentukan corak desentralisasi dengan bermacam-macam undang-undang. Target dan capaiannya adalah penataan hubungan pemerintahan dan kemasyarakatan yang sesuai dengan ciri khas Indonesia sebagai bangsa dan negara.

Baru-baru ini upaya mengubah UU tentang otonomi sedang dibahas di DPR. Ini juga dilakukan guna mendapatkan desain dan tertib pelaksanaan otonomi daerah yang lebih sesuai dengan aspirasi rakyat. Pemerintahan lokal otonom dan mandiri menyaratkan beberapa hal, antara lain; *pertama*, bahwa pemerintah lokal mempunyai teritorium yang jelas; *kedua*,

memiliki status hukum yang kuat untuk mengelola sumberdaya; *ketiga*, mengembangkan sumber daya lokal sebagai lembaga yang mandiri dan independen.

Semua itu tentu harus didukung oleh kebijakan yang menata kewenangan pemerintah pusat dalam porsi yang sangat kecil serta pengawasan yang dilakukannya lebih bersifat tidak langsung. Pemerintah lokal harus diberi otonomi dan kebebasan serta dianggap sebagai level terpisah yang tidak memperoleh kontrol langsung dari pemerintah pusat. Tapi harus dicatat bahwa betapapun bagusnya konsep desentralisasi, ia akan tidak bermakna apapun bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat daerah ketika ia tidak diarahkan secara serius untuk bisa masuk mengakar dalam kultur birokrasi lokal dan diimplementasikan dengan baik. Selain itu, konsep desentralisasi tidak bermakna apabila tidak didukung dengan penciptaan suasana demokratis (kebudayaan demokratis) yang memadai bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses dan dinamika pembangunan daerah. Lalu, sejauh mana kita telah berada dalam pencapaian ideal demokrasi ini?

### **Ekses Otonomi**

Semenjak diterapkannya UU No. 22/1999 lalu UU No. 32/2004, banyak masalah lahir dan secara gagap kita hadapi, di

antaranya; *pertama*, ketidaksiapan menjalankan prinsip-prinsip desentralisasi yang memuat nilai demokrasi; *kedua*, pelaksanaan program otonomi daerah sepanjang reformasi ini nampaknya masih banyak ditemui adanya penyimpangan dan penyempitan makna. Cita-cita ideal dari otonomi daerah belum sepenuhnya tegas, penyimpangan dan penyempitan makna dalam pelaksanaan otonomi daerah seringkali terjadi.

Sebagian besar daerah ternyata tidak siap dengan kebijakan ini. Akibatnya, warga di daerah terjebak dalam masalah yang parah. Misalnya, minimnya pendapatan asli daerah (PAD), ketidak-kreatifan pelaksana pemerintahan daerah dalam menggunakan dan mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan menambah beban masyarakat, karena biasanya pemerintah daerah hanya mengandalkan retribusi pajak, menciptakan perda dengan jenis retribusi yang justru menambah beban masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak memadai, sumber daya manusia yang rendah dan sebagainya. Apalagi pengalaman ketergantungan kepada pusat masih sangat kuat menancap. Ketika daerah dilepaskan mandiri, mereka malah kelimpungan. Harapan untuk membangun daerah dengan potensi lokal masih sekedar impian atau hanya cenderung dieksploitasi dan dibelenggu oleh segelintir elit oligarkhis di daerah.

Sebenarnya, desentralisasi memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat daerah untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa interupsi pusat. Tapi, desentralisasi juga membuka “celah hitam”. Karena keterlenaan atau *euphoria* masyarakat, desentralisasi menjelma menjadi fasilitas atau jalan mulus bagi munculnya rezim tirani baru. Bukan hanya menggeser rezim dari pusat ke daerah, tapi menciptakannya. Karena itu, pertarungan politik di daerah kian menajam. Beragam kasus kontroversi politik pun acap muncul.

Di sinilah, beban politik masyarakat daerah menjadi bertambah berat. Bukannya menikmati iklim demokrasi lokal, daerah malah terjebak pada konflik kepentingan. Misalnya, kekisruhan Pemiluakada. Masyarakat menjadi korban dari kepentingan elitnya. Ada lagi, Peraturan Daerah yang membawa semangat sektarianisme baru atas nama agama. Soal lain adalah bangkitnya identitas lokal sebagai bentuk 'perlawanan' pemerintahan *ala* Orde Baru yang cenderung Jawa sentries yang sebelumnya menghegemoni.

Setelah sekian lama terbungkam atas nama penyeragaman, identitas ini menyeruak ke permukaan. Sebagai contoh adalah kembalinya Aceh dengan istilah *Nangroe*, Sumatra Barat ke *Nagari*, Kabupaten Tana Toraja yang kembali ke *Lembang*, dan



beberapa daerah di Kalimantan Barat yang berjuang kembali ke pemerintahan *Banua*, dan yang terbaru adalah bangkitnya semangat rakyat Yogyakarta mengusung “Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat” dalam polemik RUU keistimewaan Yogyakarta. Ini juga semakin menyulut kemunculan kembali ego-etnosentrisme. Bangkitnya identitas lokal ini menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya feodalisme lokal yang telah lama terkubur di Indonesia. Banyak daerah bekas kerajaan -sebelum bergabung dengan NKRI- yang juga merasa istimewa dan berkontribusi besar terhadap kemerdekaan Indonesia dan pembangunan. Hal ini pada gilirannya memperunyam keadaan. Tidak mustahil NKRI akan terancam.

Demokrasi di tingkat lokal menjanjikan dua kemungkinan sekaligus, yaitu kemajuan dan kemunduran, perubahan dan kemandegan. Apabila demokratisasi itu berjalan secara substantif sebagaimana tujuan luhurnya maka perubahan menuju tata masyarakat yang maju menjadi niscaya. Sebaliknya jika proses demokrasi itu hanya menyentuh aspek-aspek yang superfisial, hanya formalitas dan ritual demokrasi belaka, maka angan-angan tentang perubahan itu hanya akan tetap di tempatnya.

Tokoh-tokoh daerah diharapkan dapat muncul dan membawa suasana segar dalam pemerintahan daerah, setelah lama kita hidup dalam iklim pemimpin yang di *droping* dari pusat. Untuk itu, pemerintah pusat sejauh mungkin tetap memegang komitmen otonomi yang dimilikinya tanpa terjebak pada kepentingan sektoral. Nilai-nilai pemerintahan yang baik sebagaimana dihasilkan melalui pilkada langsung tampaknya juga harus dilandaskan pula oleh bagaimana kematangan rakyat di setiap daerah memanfaatkan momentum itu untuk menunjukkan kedaulatan dirinya.

Demokratisasi harus diarahkan kepada pendewasaan berpolitik masyarakat, peningkatan kualitas partisipasi dan penyejahteraan. Salah satu yang menjadi determinannya adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang apatis dan berpartisipasi secara pasif atau oportunistik dalam konteks demokratisasi di wilayahnya berpotensi melahirkan kesempatan bagi segelintir elit yang akan menguasai dengan sewenang-wenang. Akibatnya, kualitas otonomi pun menjadi rendah yang padanya absent *interpersonaltrust* dan nihil *civicengagement*. Padahal keduanya merupakan faktor yang sangat penting bagi kuatnya bangunan demokrasi.

Absennya kepercayaan rakyat terhadap elitnya dan hilangnya partisipasi rakyat hanya akan mempercepat keruntuhan demokrasi. Namun, bila kepemimpinan elit di daerah baik dan masyarakat memiliki partisipasi kritis dalam konteks demokratisasi itu, arah demokratisasi mudah ditebak; keadaannya akan lebih lurus dan baik. Rakyat yang berkuasa, rakyat pula yang menentukan arah demokrasi dan nasibnya sendiri. Jangan apatis!!!

## **B. Demokrasi di Sumut dalam Sorotan**

Setelah Orde Baru tumbang pada tahun 1998, terbukalah kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk berdemokrasi. Sampai saat ini, Indonesia telah empat kali berganti presiden, tiga kali pemilu legislatif, dua kali pilpres secara langsung, dan ratusan kali pemilihan kepala daerah. Tetapi kuantitas demokrasi tersebut belum dapat dirasakan kualitasnya. Indonesia belum keluar dari jebakan transisional beserta kompleksitasnya. Proses memapankan sistem pemilu, penghambatan terhadap hak-hak memilih dan dipilih, penguatan lembaga hukum dan banyak lagi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan oleh pemerintah dalam menguatkan demokrasi. Kondisi ini tentu saja tidak dibebankan kepada pemerintah semata, melainkan mesti didukung dengan partisipasi aktif masyarakat di dalamnya.

Bagaimana dengan keadaan demokrasi di daerah? Faktanya, perkembangan demokrasi nasional dapat berbeda dengan perkembangan demokrasi di provinsi. Karena provinsi dan daerah memiliki keunikan dan *nuance* (beda halus) dalam

menjalankan demokrasi. Ada provinsi yang tergolong cukup baik menjalankan demokrasi dan ada pula provinsi yang dalam kategori buruk menjalankan demokrasi. Di sinilah menarik untuk mengetahui secara nyata perkembangan demokrasi di Provinsi Sumatera Utara secara kualitatif. Dalam pengamatan penulis belum ada *expose* lembaga baik dari pihak pemerintah maupun lembaga *civil society* di tingkat lokal yang menjelaskan sejauhmana kualitas demokrasi di Sumatera Utara. Karena itu uraian ini dirasa relevan dalam mengisi kekosongan tersebut.

Pertanyaan pokok yang dapat diajukan di sini antara lain; bagaimana status dan perkembangan demokrasi di Sumatera Utara saat ini? Apakah setelah dua gelombang pemilihan kepala daerah 2005-2010 di Sumatera Utara dan Pilgubsu 2008 lalu bisa dijadikan indikator meningkatnya demokrasi di Sumatera Utara? Lalu bagaimana Pilgubsu 2013 mendatang? Apakah sekedar rutinitas demokrasi belaka tanpa ada kualitas yang diharapkan?

### **Tiga Aspek**

Dalam tradisi studi untuk mengukur demokrasi di suatu pemerintahan, ukuran *standard* kualitas demokrasi dilihat dari tiga aspek yang masing-masing aspek memiliki variabel indikator. Misalnya; aspek kebebasan sipil. Variabel

indikatornya antara lain; kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Aspek hak-hak politik; hak memilih dan dipilih masyarakat, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Aspek lembaga demokrasi; peran peradilan yang independen, peran birokrasi pemerintah daerah, pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, dan peran partai politik.

Dalam Studi yang dilakukan oleh Lembaga Studi Demokrasi Indonesia sepanjang tahun 2010-2011, perjalanan demokrasi di Sumatera Utara ini sebanjar parahnya dengan jalan lintas provinsi di Aek Latong. Dari aspek kebebasan sipil, masyarakat Sumut tidak menghadapi kendala yang berarti. Karena orang-orang dapat dengan mudah dan bebas membentuk organisasi, berserikat tanpa tekanan dan hambatan dari pihak manapun. Beberapa media lokal sempat menginformasikan tentang resistensi pendirian patung penyembahan di Tanjung Balai. Ini memang menyentuh wilayah kebebasan berkeyakinan. Tetapi tensi dari ketegangan ini tidak sampai memuncak. Karena masalah ini masih dapat diselesaikan dengan baik.

Aspek hak-hak politik merupakan aspek yang paling bermasalah dalam melihat status demokrasi di Sumut.

Gelombang pemilukada tahun 2010 di berbagai kabupaten-kota di Sumut dinilai memiliki banyak masalah. Misalnya kasus daftar pemilih tetap (DPT). Rumitnya sistem pendataan kependudukan dijadikan sumber utama oleh penyelenggara pemilu. Akibatnya adalah hilangnya hak-hak masyarakat dalam memilih. Pemilukada banyak yang bermasalah, jauh dari bersih, jujur, adil, dan bebas. Proses-proses tersebut diwarnai dengan dominasi peran uang dalam memengaruhi pilihan masyarakat.

Berdasarkan catatan Mahkamah Konstitusi (MK) hampir semua pemilukada 2010 di Sumut dipenuhi oleh Indikasi kecurangan disebabkan politik uang di pengadilan yang diselenggarakan oleh MK. Namun, dari semua itu pemilukada di Madina yang diputuskan MK harus diulang karena terbukti massifnya politik uang. Selain itu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu juga menjadi noktah hitam dalam lembaran perjalanan demokrasi di Sumut. Misalnya kasus pemilukada Tebing Tinggi, yang meluluskan calon yang tersangkut kasus pidana. Kemudian, meskipun dinyatakan menang oleh KPUD Tebing Tinggi, toh MK menggagalkan putusan tersebut dan merekomendasikan pemilukada ulang.

Satu lagi aspek yang cukup bermasalah adalah lembaga demokrasi di Sumut. Lembaga demokrasi seperti pemerintah daerah dianggap publik belum memiliki peran yang ideal dalam pembangunan demokrasi. Sebab, otonomi masih dinikmati oleh elit daerah yang menjadi raja-raja kecil di wilayahnya masing-masing. Mereka juga kerap mengandalkan retribusi pajak yang memberatkan masyarakat. Banyak kepala daerah di beberapa kabupaten/kota yang tersangkut kasus korupsi dan menjadi tahanan KPK. Ini menunjukkan bahwa otonomi belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Sorotan lain mengarah pada kompetensi partai politik dalam menyahuti dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Sebagai media politik yang paling dekat dengan rakyat, partai politik justru yang paling bermasalah. Tidak adanya ideologi organisasi yang jelas. Sistem perkaderan yang ketat dan mapan juga absen. Ditambah lagi, parpol sering menekankan aktifitas sebagai pemburu rente, yaitu dengan memanfaatkan kader parpol di DPRD dan eksekutif untuk mengeruk keuntungan dari dana APBD.

Selain itu, kader-kader parpol di DPRD juga terlihat tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai tupoksinya. Kita belum pernah mendengar ada Perda inisiatif DPRD SU sampai



saat ini. Kecuali gedung parlemen yang kian mewah yang konon katanya bisa menjadi faktor elementer meningkatkan kinerja mereka.

Kasak-kusuk di ruang-ruang publik tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2013 sudah semakin memanas awal tahun 2012 ini. Inilah tahun sesungguhnya yang menjadi penentu keberhasilan Pilgubsu 2013. Karena itu, kita dapat melihat di berbagai media massa, bahwa sudah tampak beberapa tokoh yang muncul saban hari dalam berbagai tema. Mulai dari tema persaudaraan, ekonomi kerakyatan, keadilan, pertanahan dan sebagainya. Tetapi apakah selang waktu setahun ini dapat membantu meningkatnya derajat demokrasi di Sumut ini? Apakah demokrasi substantif yang lepas dari jebakan-jebakan rutinitas prosedural dapat dinikmati masyarakat?

Ada data menarik dari IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) tahun 2009 yang dikeluarkan BAPPENAS soal kualitas demokrasi di provinsi seluruh Indonesia. Dari 33 Provinsi yang ada, Sumut berada di peringkat lima (bawah) dengan kategori buruk. Gawatnya lagi, indeks angka tersebut menjadi salah satu ukuran penentu besaran proyek pembangunan yang akan dikucurkan oleh BAPPENAS. Dengan kata lain, kualitas

demokrasi yang buruk berakibat pada minimnya kepercayaan pemerintah pusat dalam memberikan dana pembangunan ke Sumut. Termasuk juga minimnya kepercayaan investor asing dalam menanamkan investasinya. Akhirnya, kesejahteraan masyarakat Sumut masih jauh panggang dari api. Nilai buruk demokrasi di Sumut ini juga menambah daftar citra buruk yang sudah diterima sebelumnya, seperti daerah terkorup dan zona merah terorisme.

Tahun 2012 ini adalah tahun janji-janji. Inilah masa di mana para pejanji menawarkan segenap janjinya kepada rakyat. Padahal, membangun demokrasi tidak dapat hanya dengan sekedar janji, tetapi kepastian dan kemauan politik para elit yang didukung masyarakatnya. Karena itu, dalam upaya membenahi dan meningkatkan kualitas demokrasi di Sumut, harus ada kesadaran dan komitmen seluruh *stakeholder* dan dukungan masyarakat di daerah ini. Dalam menghadapi Pilgubsu 2013 sebagai agenda yang paling mendesak dalam setahun ini, masyarakat harus lebih selektif dan hati-hati dalam melakukan pilihannya. Sehingga Pilgubsu 2013 tidak menjadi sekedar rutinitas prosedural belaka. Pilgubsu 2013 harus dapat memberikan dampak yang lebih luas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semoga saja!

### **C. Tata Ruang Politik Kita**

Blarr!!! Rentetan peristiwa kerusuhan sosial seperti rusuh Warung Makan di Lubuk Pakam, amuk massa di Tanjung Balai, dan konflik tanah di Karo sangat mengejutkan banyak pihak. Beritanya segera menyeruak kepublik secara nasional. Rupanya peristiwa tersebut bukan hanya isapan jempol. Tetapi, ia hadir kini dan dekat sekali dengan keberadaan kita di saat semua perangkat agama, ilmu pengetahuan, dan infrastruktur demokrasi telah sepenuhnya membimbing masyarakat kepada keluhurannya. Peristiwa tersebut semacam interupsi dari hiruk pikuk dan cara-cara kita mengada sebagai masyarakat social selama ini, dan menjegal cita-cita adiluhur bersama tentang kedamaian, kerukunan dan kesejahteraan.

Bagaimana bias kekerasan mewujud dalam ruang kehidupan kita, baik dalam skala domestic maupun keranah publik? Telaah terhadap kejadian tersebut menjadi penting, tentu bukan soal siapakah yang terbukti bersalah atau tidak, dipenjara atau diampuni, hal itu kita percayakan saja pada pihak berwajib. Tulisan ini merefleksikan tragedi tersebut dikaitkan ruang kehidupan sosial-politik, dan evaluasi keberadaan kita sebagai warga bangsa.

## **Tubuh Sosial Sakit**

Klaim yang kita banggakan selama ini adalah masyarakat Sumatera Utara yang majemuk merupakan miniature Indonesia, tempat orang belajar kerukunan dan harmoni sosial. Tetapi, menjaga klaim itu tidak sepenuhnya mudah, karenanya ia keropos tak terawat. Keadaan yang tidak dapat kita abaikan bahwa kerusuhan sosial sering terjadi sebab konstruksi sosial yang menggambarkan ketidakseimbangan, ketidakadilan, ketidaknyamanan dan ketidakamanan. Karena itu, seringkali fenomena kerusuhan dan kekerasan diperkuat oleh rangkaian dari struktur di luar diri manusia yang memberikan ruang berkembangnya sifat destruktif dan keserakahan tak terkendali. Tubuh sosial, ekonomi, politik, budaya dan agama ikut menyumbang terpicunya agresi tersebut dan menghalangi naluri kesucian dan berkembangnya kehidupan manusia yang lebih berkeadaban.

Pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sangat menarik untuk ditelaah. Beliau mengatakan diberbagai media bahwa penyebab rusuh Tanjung Balai adalah kurangnya komunikasi antar tetangga, antar masyarakat, sehingga menyebabkan kesalah pahaman. Memang kita sedang sakit. Kita luput memperhatikan bahwa tubuh sosial yang kasat mata ini

terancang kearah dehumanisasi, di mana ruang-ruang interaksi sesama manusia dibatasi tembok dan gedung-gedung tuna rungu, yang tidak peka terhadap kepedulian. Juga struktur sosio-politik yang memberikan sirkuit lebar bagi usaha-usaha saling memangsa, di mana penghuninya pun terpaksa berterima dengan suasana rimba raya yang buas.

Ruang-ruang politik kita dikuasai oleh pemodal, penggombal, dan sedikit sekali yang mengedepankan moral. Dengan mudah dapat dilihat ruang hidup para elit; gedung-gedung tinggi nan mewah, ber AC, cantik dan tertata, mobil-mobil mewah dan berkelas. Keadaan ini berpunggunan dengan ruang-ruang hidup masyarakat kebanyakan yang kumuh, lusuh, bau menyengat, terisolir dan rentan penyakit.

Demikian halnya dengan Tata Ruang ekonomi. Susah bagi masyarakat kebanyakan untuk menikmati suasana kegiatan perekonomian yang bersih, sejuk, nyaman dan aman. Ruang-ruang ekonomi yang bernilai strategis dan keuntungan tinggi sudah dikuasai oleh kapital. Sementara Masyarakat bawah yang jumlahnya banyak itu harus rela berkegiatan ekonomi di ruang-ruang sempit, pengap, udara panas, becek, dan tercekik lintah darat. Mereka harus berhadapan dengan kerawanan, ketidaknyamanan retribusi liar dan uang preman. Banyaknya

usia produktif yang terkonsentrasi di jalanan, duduk di terminal dan warung-warung pada jam kerja adalah sinyal kuat ketidaksehatan sosial-ekonomi kita, mereka menganggur, tak ada yang bias mereka kerjakan, tak ada pula yang bisa mereka makan dan bawa pulang untuk keluarga di rumah.

## **Keadaban**

Hal yang esensial untuk merawat kesehatan tubuh sosial kita adalah komitmen setiap warga maupun elitnya dalam aktifitas politik untuk mengutamakan kepentingan kemaslahatan publik di atas kepentingan pribadi. Komitmen seperti itu juga dapat disebut mempertimbangkan etika publik. Demokrasi yang memberikan ruang kebebasan seperti sekarang ini perlu direnungkan ulang, demokrasi adalah ikrar kolektif warga bangsa untuk hidup bersama dalam memperjuangkan kebajikan dan keadilan serta menciptakan kesejahteraan harus direalisasikan dalam tataruang politik yang sehat dan seimbang. Memperkecil ketimpangan sosial, meredam kecemburuan. Untuk semua itu tentu membutuhkan rangkaian tindakan etis yaitu bertindak sesuai prinsip kepatutan publik dan setiap orang harus melaksanakannya.

Di ranah publik, etika sebagai seperangkat nilai tata keadaban untuk kebaikan bersama menjadi penting di tengah kerisauan,

ketika kita menyaksikan ruang politik sekedar menjadi ajang transaksi kepentingan elit sesaat dan terbatas. Menekankan pentingnya etika dalam perjalanan demokrasi adalah hal mendesak dalam dialektika dan dinamika demokrasi apa lagi ketika politik untuk mencipta kemaslahatan bagi setiap warganya makin sunyi dan tidak terdengar.

Dalam tradisi politik demokratis yang dibangun oleh para filosof seperti Aristoteles, Plato, Al-kindī dan Al-faraby, etika merupakan keutamaan. Ia merupakan aktifitas dan nalar praktis yang harus ditempatkan dalam prinsip kepemimpinan. Bagi warga negara dapat dimaknai sebagai komitmen publik dalam meletakkan kebaikan warga, *bonum publicum*, atau *al-maslahat ar-ra'iyah* seperti kesetaraan, kebebasan, dan kesejahteraan.

Kebebasan tanpa etika adalah barbarianisme, anarkisme. Kebebasan tanpa signal keadaban publik akan memicu munculnya hasrat brutal dari mereka yang kuat secara ekonomi dan politik untuk menindas yang lemah. Hadirnya tatanan bebas tanpa keinsyafan terhadap etika akan menjadikan kepentingan publik sekedar arena demokrasi yang di dalamnya terjadi ajang penindasan dari mereka yang kuat secara finansial maupun politik.

Relevansi komitmen aktif warga negara dalam mengedepankan etika justru menjadi penting untuk menjamin dan merawat kebebasan yang telah kita perjuangkan dan keadilan yang kita citakan. Saat etika dan komitmen warga hilang dari ranah publik, segera kita menyaksikan intimidasi terhadap hak kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya (hak asasi yang konstitusional).

## **Penutup**

Segenap pengabaian terhadap apa yang penting bagi kebaikan bersama dalam kehidupan republik ini agaknya menjadi pekerjaan rumah. Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama menyelesaikan masalah ini, menata ulang tataruang social politik yang lebih sehat. Kemerdekaan dan kebebasan yang telah kita capai dalam aktifitas bernegara hanya bisa dipertahankan dengan hadirnya komitmen aktif setiap warga negara merawatnya dengan mengedepankan etika. Demokrasi sebagai arena politik yang menghadirkan kebebasan warga negara dalam mengekspresikan hak asasinya butuh etika yang memberikan jalan tertib pada pemaknaan bagi kebaikan bersama setiap warga Indonesia. Demokrasi kita pun bukan hanya bermakna kebebasan, lebih dari itu demokrasi adalah kebudayaan dan peradaban.



Agama harus dikembalikan kepada kesejatiannya sebagai panduan moral tertinggi dalam menata peradaban masyarakat, yang mencerahkan mendamaikan, dan menyelamatkan. Dengan demikian, pengabdian kita kepada Allah akan lebih khusyu' dan pergaulan sesama manusia lebih baik menjadi manusia seutuhnya .*Waallahua'lam bi-sh-shawab.*

#### **D. Gatot Pujo Nugroho dan Mitos Kepemimpinan Jawa**

Orang Jawa menyimpan segudang mitos dalam kehidupannya. Legenda-legenda kepemimpinan yang diceritakan lewat *babad* atau lakon pewayangan adalah kurikulum wajib bagi orang Jawa. Begitulah kelaziman anak-anak Jawa dalam meresapi *pitutur* para pendahulu mereka, dan mungkin tidak biasa bagi orang-orang Pujakesuma (putra Jawa kelahiran Sumatera).

Kepemimpinan Gatot Pujo Nugroho sebagai pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara dapat dikatakan sebuah ketidaklaziman sekaligus rekor baru. Tidak lazim karena jabatan itu diperoleh melalui “kekeliruan” politik yang dialami Syamsul Arifin, disebut rekor baru karena Gatot merupakan putra Magelang Jawa Tengah, boleh jadi dia orang Jawa pertama yang mencapai pucuk pimpinan di wilayah Sumatera Utara.

Tulisan ini tidak dimaksudkan memicu sentimen etnik yang berujung pada tribalism. Tetapi hanya hendak melihat bagaimana figur Gatot Pujo Nugroho dalam mitologi

kepemimpinan Jawa, sekaligus menguji identitas figur tersebut dalam memberikan kebaikan bagi wilayah ini.

### **Jaka Tingkir, Semar dan Ratu Adil**

Dalam pandangan orang Jawa banyak legenda mitologis yang merefleksikan para pembajik yang memimpin tanah Jawa. Hikayat-hikayat tersebut terkesan seperti ada dan tiada, nyata dan semu, tetapi yang pasti hikayat itu hidup dalam masyarakat Jawa sebagai pembelajaran dalam kehidupan.

Salah satu figurnya adalah Jaka Tingkir, figur model kuasa Jawa yang ideal. Ia dianggap dapat memberi arah untuk melahirkan pemimpin di ruang politik, agama dan budaya. Nancy K. Florida, dalam studi terhadap *Babad Jaka Tingkir*, mengungkapkan peran Jaka Tingkir sangat penting dalam pembangkitan kekuatan pinggiran. Nancy mengatakan bahwa Jaka Tingkir\_melalui pengaruh ayahnya Ki Ageng Pengging\_ adalah sosok yang sulit ditentukan (dikompromikan). Sosoknya memiliki gaya unik, berada di luar kategori pilihan lazim: luar versus dalam, jiwa versus raga, kuasa duniawi/politis versus kuasa spiritual. Figur raja yang tidak biasa ini merupakan titisan dari ayahnya Ki Ageng Pengging yang merupakan sosok pinggiran yang melawan keterpinggiran. Dalam Babad Jaka Tingkir, Ki Ageng Pengging adalah seorang kiai pesantren

sekaligus seorang pangeran. Namun, dia adalah pangeran alim sederhana yang menolak cara hidup istana, busana dan kendaraan mewah.

Figur lain yaitu Semar, tokoh wayang yang paling banyak digemari dalam masyarakat Jawa. Dalam mitologi Jawa, Semar adalah seorang pemimpin yang sering dipuja karena keberhasilannya dalam memajukan bangsa. Tokoh ini banyak dijadikan sebagai simbol seorang pemimpin yang ideal, yang memiliki sifat rendah hati, suka menolong sesama, tidak serakah, melakukan *tapa*, mengurangi makan dan tidur, dan lelaku lainnya. Petunjuk-petunjuk kehidupan Semar sangat sederhana, karena dia seorang pembantu atau *abdi*. Dalam pewayangan *Semar* sering bergaul dengan sosok *Gareng*, *Bagong* dan *Petruk*.

Semar biasanya dimintai nasehat oleh Pandhawa dalam mengambil keputusan mengenai masalah kemasyarakatan yang dianggap gawat dan mendesak. Sebagai sosok tua, Semar tidak punya keinginan memegang kekuasaan duniawi sebagaimana halnya kebanyakan manusia. Hal ini dikarenakan kekuasaan umumnya dapat mengubah watak, situasi sekaligus dapat mencelakakan. Semar dapat mencapai tujuannya secara efektif

dengan cara memberi contoh, sebagai metode pengajarannya tanpa bermaksud menguasai orang lain atau harta benda.

Dalam kamus Jawa, semar: *dempel*, yang berarti keteguhan jiwa. Rambut semar berbentuk seperti *kuncung* yang bermakna *akuning sang kuncung*, yaitu sebagai kepribadian pelayan yang mewujudkan untuk melayani masyarakat. Meskipun dia seorang *abdi*, rakyat jelata, buruk rupa, miskin, hitam legam namun di balik wujud lahiriah tersebut tersimpan sifat-sifat mulia, yakni mengayomi, mampu menyelesaikan masalah, sabar, dan bijaksana. Semar menghormati rakyat jelata lebih dari menghormati para dewa pemimpin. Semar mudah menangis ketika melihat penderitaan manusia yang dilayaninya, itulah sebabnya wayang semar matanya selalu mengeluarkan air. Semar lebih mampu menangis orang lain daripada menangis dirinya sendiri. Semar sudah tidak peduli dan tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi hanya memikirkan penderitaan orang lain. Semar sebagai keturunan dewa seharusnya bisa saja menguasai 'dunia atas' dan menguasai segalanya, tetapi ia memilih jalannya sendiri sebagai seorang *abdi*, tidak kaya dan tidak berkuasa. Sosok Semar menyerminkan bahwa seorang pemimpin yang baik melihat yang dipimpinnya tidak dari atas singgasana yang terpisah, tetapi melihat dari sudut pandang rakyat yang dipimpinnya.

Satu lagi mitos penting dalam kehidupan orang Jawa yaitu mengenai munculnya sang Ratu Adil. Ini terkait dengan ramalan Jayabaya. Beberapa sejarawan Belanda menggambarkan Ratu Adil sebagai pribadi yang memiliki jiwa nasionalisme, intelektualisme, daya religius yang serba brilian dan perfeksionistis. Sejatinya sosok Ratu Adil adalah harapan rakyat akan datangnya sang penolong yang bakal melenyapkan kekacauan, kejahatan, dan memerintah dengan adil dan makmur. Kedatangan Ratu Adil, oleh Jayabaya digambarkan muncul fenomena alam dan masyarakat yang sangat kritis, bencana alam disusul dengan kesengsaraan rakyat, moralitas merosot dan kejahatan meraja lela. Pada suasana yang carut-marut demikian, munculah sosok pemimpin yang diramal mendatangkan kebahagiaan dalam negeri untuk menciptakan keadaan adil dan makmur bagi rakyatnya, sosok pemimpin *berbudi bawa leksana hambaudenda hanyakrawati ambeg adil paramarta*, pemimpin yang diharapkan dapat menumbuhkan suasana kehidupan sejahtera lahir-batin.

## **Penutup**

Rasanya tidak berlebihan jika kehadiran figur-figur mitologis tersebut wujud dalam kehidupan nyata ini, mengingat kondisi politik saat ini yang semakin kacau, kesengsaraan rakyat terjepit

di antara para pemimpin yang hanya memikirkan kekayaan pribadi tanpa peduli.

Nampaknya hal ini juga yang menjadikan banyak masyarakat atau segelintir orang yang masih peduli dengan kelangsungan hidup negara ini dan mendambakan sosok Semar bijaksana dan peduli, Jaka Tingkir yang pro rakyat marginal dan salih, atau sang Ratu Adil yang mampu menyelamatkan bangsa dari berbagai krisis multidimensi yang sedang melanda bangsa Indonesia. Suasana batin yang sama halnya dengan beberapa kalangan muslim yang mendamba seorang Al-Mahdi yang diturunkan Tuhan sebagai sang pembebas kemanusiaan dari kezaliman dan dosa.

Jika menggunakan ilmu *uthak-athik gathuk*, dicocok-cocokkan, Gatot Pujo Nugroho ini masuk dalam kategori figur pemimpin seperti apa ya? Jaka Tingkir, Semar, atau Ratu Adil?

## **E. Risalah Untuk Pak Gubernur Sumut**

Yang Terhormat, Bapak Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi. Anda berdua pemimpin Indonesia. Karena Anda terpilih oleh idealisme yang melampaui pragmatisme politik dan primordialisme. Sosok dan rekam jejak Anda membangkitkan harapan baru. Anda telah memenangkan hati pemilih. Karena itu saya ucapkan selamat.

### **Pemimpin adiluhung**

Pak, Gatot, kemenangan Anda berarti juga pengakuan bahwa kabupaten Magelang adalah bagian dari Indonesia. Tak ada salahnya kini Anda memimpin bagian Indonesia yang lain yaitu Sumatera Utara. Warga Sumut pun memberi Anda panggung politik dengan harapan Anda menjaga integritas sebagai pejabat publik, tetap bersahaja, rajin turun ke lapangan untuk menyapa dan mendengarkan keluhan warga. Kepemimpinan Anda *nyambung* dengan realitas di lapangan.

Sebagai seorang dosen politik Islam, saya mengajarkan teori politik dan kepemimpinan yang normatif dan ideal. Repotnya, mahasiswa saya tidak menemukan keadaan ideal tersebut dalam realitas kepolitikan kontemporer, terutama di Sumatera Utara



untuk kasus beberapa kepala daerah yang terlibat korupsi dan buruknya budaya birokrasi. Saya ingin beritakan kepada Bapak gubernur yang terhormat bahwa seorang pemimpin semestinya tidak terkotak-kotakkan oleh sentimen primordial. Anda adalah pemimpin seluruh warga Sumut tanpa kecuali, yang sama hak dan kedudukannya di depan hukum. Anda harus memperjuangkan hak hidup warga. Tak peduli apa pun agama atau sukunya, terutama kepentingan pihak yang lebih lemah, sekalipun untuk itu Anda harus menanggung resiko berhadapan dengan pihak yang lebih kuat.

Di setiap aspek perilaku, sikap, dan program, sewajibnya mengartikulasikan empat pilar kebangsaan: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus berani melawan perilaku tak ber-Tuhan dengan sila pertama Ketuhanan yang Maha esa, dan primordialisme dengan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Anda harus melawan aksi disintegrasi dengan sila Persatuan Indonesia, anda juga harus membudayakan hikmah dan pengetahuan yang tinggi dalam musyawarah melalui sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, juga membenci kerakusan kapitalisme dengan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pilkada Gubernur Sumut kali ini memberi kontribusi penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Demokrasi sejatinya adalah daulat untuk rakyat. Utang Anda bukan kepada partai pendukung dan donatur besar kendati andil keduanya tidak bisa diabaikan. Untuk Anda ketahui bahwa semalam sebelum pencoblosan, tukang buruh bangunan tetangga saya dengan bangga dan haru (seperti mendapat perintah Tuhan) mengaku pasti memilih Anda sambil mengipas-ngipas diri sebab kontrakan kami lumayan pengap dan gerah. Saya rasa, mimpinya bukan alih profesi sebab pekerjaan itu terbukti menghayatinya selama 10 tahun di ujung Tembung. Mimpinya adalah kemudahan akses kesehatan dan pendidikan bagi anak dan keluarganya, kemudahan mendapatkan pekerjaan bagi rekan buruh lainnya.

Semua orang hidup bergerak bekerja demi kehidupan yang lebih baik. Namun, realitas Sumut hari ini menyebutkan; siapa kuat, dia menang, siapa curang dia untung, siapa korup dia kaya. Kesemrawutan dan hukum yang disorder membuat daerah ini semakin kehilangan daya tariknya. Penegak hukum dan penguasa bermain mata dengan premanisme yang kian merajalela. Moral publik runtuh, Sumut pun menjadi salah satu dari tiga provinsi terkorup di Indonesia, tiga terburuk pelayanan

pemerintahannya, mungkin belum termasuk 3 keajaiban dunia yang pernah diciptakan Tuhan sepanjang peradaban.

Pilkada kemarin adalah pemberontakan warga menolak bayang-bayang kota kematian. Rakyat membebankan ekspektasi yang besar kepada Anda. Daerah ini sesak dengan baliho, spanduk, dan bendera yang bertebaran merebut perhatian warga. Pamer kekuatan modal, eksibisi ketampanan diri dan kekuatan massa primordial. Saat ini masyarakat direduksi menjadi sekedar konsumen ekonomi dan ideologis, tanpa peduli keamanan dan keindahan pandangan di sepanjang jalan. Politik ruang seharusnya memulihkan martabat masyarakat. Saat ini ruang politik masyarakat terasa pengap, gerah, dan panas. Jadi jangan salahkan jika rakyat mudah marah dan cepat *ngamuk*. Sementara ruang politik elit lebih dingin karena ada AC-nya, gedungnya nyaman, rumahnya adem dan mobilnya mewah.

## **Merakyat dan Melayani**

Saya yakin bahwa Anda bukan tipe kepala daerah yang mudah memutasi pegawai Pemda karena bukan orang Anda, lalu memegawaikan keluarga dan orang-orang Anda. Birokrasi Sumut sudah bertubuh tambun sehingga sulit melakukan

penetrasi dan akselerasi program kesejahteraan masyarakat. Selama ini, proyek dan pungli menjadi minyak pelumas yang menggerakkan mesin birokrasi. Tipe birokrasi feodal ini telah memosisikan rakyat sebagai pihak yang melayani, yang membayar. Fasilitas dan kualitas sumber daya manusia birokrasi Sumut, meski tidak yang terbaik tetapi potensial dan dapat diandalkan. Namun, sebagaimana jamak dimaklumi, tak ada birokrasi yang cepat dan efisien karena dihidupi oleh korupsi. Praktik korupsi telah menjadi bagian dari kultur birokrasi di semua level sehingga pemberantasannya pun perlu serentak dari atas ke bawah. Kebijakan pembangunan dan anggaran yang terbuka, seperti janji Anda, merakyat dan melayani, akan membiarkan Anda langsung dikawal oleh rakyat. Anggota dewan pun tak ada alasan untuk tak memihak aspirasi rakyat. Namun, yang paling sulit saya kira bukan resistensi birokrasi ataupun partai yang tak mendukung Anda selama Pilkada. Yang potensial menghambat justru partai pendukung Anda sendiri. Partai berseteru mengklaim siapa yang paling berjasa mengantar Anda ke kursi orang nomor satu di Sumut. Segera pula anda akan digerogeti.

Sebagai orang Jawa anda mungkin pernah membaca sabda Sultan Jayabaya dalam kitab *Musarar*; "*Tan kober apepaes tan tinolih sinjang kemben*". Yang saya tafsirkan secara bebas

bahwa anda mungkin akan kesulitan mengatur pemerintahan disebabkan ada masalah masalah internal yang merepotkan. Saya berharap Anda dan Wakil Anda tidak mengkonfirmasi prediksi Jayabaya tentang tipologi *Raja Koromurko* yaitu raja yang bertipe balas dendam, apa lagi tipe *Panji loro semune Pajang Mataram*, yaitu dua kekuatan dalam satu kubu dan saling ingin menjatuhkan. Saya berharap Anda dan wakil rukun dan kompak sampai masa jabatan berakhir.

Ekspektasi masyarakat jauh lebih tinggi dan Anda dalam bayang-bayang ekspektasi itu. Jangan heran jika kritik kepada Anda akan lebih keras. Untuk itu, tak perlu defensif. Karena Anda memang abdi rakyat. Dengan segala kekurangan dan kelebihan Anda, jangan coba-coba mengkhianati kepercayaan rakyat. Sekali rakyat mengendus kongkalikong Anda dengan kepentingan kekuasaan atau modal, rakyat akan meninggalkan Anda. Memimpin itu jalan sunyi menanjak dan terjal yang tak banyak dipilih orang. Hal itu berupa memberikan kebebasan bagi budak, merawat yatim piatu, dan memberikan makan pada musim kelaparan (Q.S. Al-Balad: 11-18). Jadi sesungguhnya pertarungan berat dalam pilkada hanya pemanasan untuk pertarungan sesungguhnya adalah di jalan pengabdian kepada rakyat.

Tolong bantu saya pak agar saya mudah menerangkan kepada mahasiswa saya bahwa pemimpin Islam yang ideal dan dapat diteladani itu masih ada dan dekat sekali dengan kita. Bantu mahasiswa saya menemukan kemudahan mencari sosok Umar ibn Khattab atau Harun al-Rasyd, bantu kami membangun optimisme kepemimpinan demi masa depan generasi selanjutnya.

Sudah Pak Gubernur, saya mau *ngajar* dulu, membangun mimpi dan harapan bersama mahasiswa saya tentang idealita politik yang membawa maslahat, setidaknya di kelas kami. Saya menunggu konfirmasi bapak menunjukkan keteladanan kepemimpinan dan kemaslahatan bagi masyarakat Sumut. Selamat mengabdikan!

## **F. Berebut Kuasa di Tanah Emas**

Bulan ini saya ditakdirkan mengunjungi dua tapak penting Kota Medan yaitu Istana Maimun dan Pelabuhan Belawan, serta satu forum dialog interaktif mengenai Pemilihan Kepala daerah kota Medan 2015 di stasiun Radio bergengsi. Dari sini saya mulai menyambung-nyambungkan retak-retak zaman yang melingkupi tanah ini, dikaitkan dengan suksesi kepala daerah yang segera menjelang. Seorang filosof Francis Michael Foucault tidak mengkaji sejarah untuk mengetahui bagaimana riwayat hidup orang-orang besar atau siapa yang berkuasa pada suatu jaman tertentu, melainkan kajian sejarah yang dilakukannya adalah sejarah tentang masa kini (*history of the present*). Memahami sejarah masa kini adalah untuk mengetahui apa yang terjadi kini, yakni bagaimana kekuasaan beroperasi. Sedangkan penyelidikan sejarah masa lalu dilakukan untuk mencari retakan suatu zaman (*discontinuity*) sebagai usaha untuk menemukan rezim pengetahuan apa yang berkuasa pada masa tertentu (*archeology of knowledge*), dan bagaimana beroperasinya kekuasaan (*geneology of power*) itu kini. Kekuasaan dalam pandangan Foucault tidak dipahami secara negatif seperti dalam perspektif Marxian, melainkan produktif dan reproduktif. Ia tidak terpusat, tetapi menyebar

(*omnipresent*) dan mengalir dinormalisasikan dalam praktik pendisiplinan. Dengan menggunakan arkeologi untuk menginvestigasi retakan-retakan zaman berdasarkan *episteme*, yakni mengetahui bagaimana terjadinya perubahan rezim pengetahuan dari suatu masa, dan tentu saja terjadinya perubahan itu melibatkan beroperasinya kekuasaan.

### **Tanah Emas**

Lebih dua abad lalu Jhon Anderson dalam laporannya *Mission to the East coast of Sumatra in 1823* menyebut kata Medan, sebuah istilah melayu yang berarti tempat berkumpul. Daerah ini sejak zaman dahulu kala merupakan tempat berkumpul, berdagang, serta bertaruh orang-orang dari Hamparan Perak, Sukapiring, dan lain-lain. Ketika John Anderson, orang Skotlandia yang bergabung dengan English East India Company di Penang (Malaysia), bertemu Sultan Deli, dia menggambarkan betapa kecilnya kekuasaan Sultan Deli. Pengawalnya hanya lima orang dengan tombak seadanya, istana pun tak ada. Anderson ke Pantai Timur Sumatra pada 1822 diutus Gubernur Jenderal Inggris di Penang, W Philips, dalam rangka rencana penguasaan Pulau Sumatera secara intensif.



Anderson yang mengunjungi pesisir timur Sumatera tahun 1823 mencatat bahwa mayoritas orang Melayudi sana merupakan keturunan pendatang Minangkabau. Namun ia juga menambahkan sederet asal lain yaitu pelaut dari Malabar dan Koromandel yang terdampar di pantai pendatang dari Aceh, Jawa , Borneo , Sulawesi , Terengganu dan kota-kota pelabuhan di Semenanjung Melayu, Riau, Lingga, dll. Dikutip dari Daniel Perret (2008:43). Dalam catatan ini Anderson mengingatkan bahwa jalur perdagangan sungai merupakan pintu masuk ke pusat perdagangan seperti Kota China melalui Sungai Deli, Sungai Wampu dan Sungai Sunggal yang berlabuh di Belawan.

Tahun 1869, Medan dipilih sebagai tempat tinggal pengelola perkebunan *Deli-Maatschappij*. Medan juga dipandang sebagai sejenis Buitenzorg dibandingkan dengan Labuhandeli yang berawa-rawa. Sebuah garnisun beranggotakan sekitar seratus orang ditempatkan di sana sejak 1873, mungkin akibat pemberontakan Sunggal yang pecah tahun sebelumnya. Pada tahun 1888, Medan secara resmi memperoleh status sebagai kota dan tahun berikutnya residen Pesisir Timur serta Sultan Deli pindah ke Medan.

Tahun 1909, Medan menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran. Dewan kota yang pertama terdiri dari 12 anggota Eropa, dua orang bumiputra dan seorang Tionghoa. Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terdapat dua gelombang migrasi besar ke Medan. Gelombang pertama berupa kedatangan orang Tionghoa dan Jawa sebagai kuli kontrak perkebunan. Perusahaan kemudian sepenuhnya mendatangkan orang Jawa sebagai kuli perkebunan. Orang-orang Tionghoa bekas buruh kuli perkebunan kemudian di dorong untuk mengembangkan sektor perdagangan. Gelombang kedua ialah kedatangan orang Minangkabau, Mandailing dan Aceh. Mereka ke Medan bukan untuk bekerja sebagai buruh perkebunan, tetapi untuk berdagang, menjadi guru dan ulama.

Beberapa nama tokoh pergerakan yang pernah mampir ke sini antara lain; Dokter Soetomo, pendiri Boedi Oetomo, tercatat pernah menjadi dokter Kesultanan Serdang. Pirngadi, dokter dari Jawa yang namanya kini ditabalkan menjadi nama rumah sakit umum daerah di Medan. Ibrahim Datuk Tan Malaka. Sebagai siswa sekolah guru di Bukittinggi yang kemudian melanjutkan ke Sekolah Tinggi Guru Negeri di Harleem, Belanda (1913-1919), Tan Malaka diberi posisi istimewa untuk

ukuran orang Indonesia saat itu, yakni sebagai asisten inspektur di sekolah-sekolah untuk anak-anak buruh Indonesia yang dikelola Senembah Company, perkebunan besar milik Belanda yang paling maju di Sumatera Timur (Anthony Reid, 2010). Dalam risalahnya “*Dari Penjara ke penjara I*” Tan Malaka menulis tentang Tanah Deli sebagai, “Goudland, tanah emas surga buat kaum kapitalis. Tetapi tanah keringat air mata maut, neraka buat kaum Proletar. Di sana berlaku pertentangan yang tajam antara modal dan tenaga, serta antara penjajah dan terjajah”. Selama kurang lebih dua tahun di Deli, Desember 1919 hingga Juni 1921, dia dibayangi kenangan memilukan tentang kehidupan nestapa golongan buruh, kaum pekerja Indonesia terhisap dan tertindas, yang kala itu disebut kuli kontrak.

Kini dapat dilihat bahwa beroperasinya kekuasaan kapital dapat meretak-retakkan simpul-simpul sejarah budaya kota Medan. Percik-perciknya sudah terasa belakangan ini, mulai dari pengalihan fungsi lahan bangunan masjid ke arah pusat-pusat pertokoan dan pusat perbelanjaan modern, susutnya jumlah pasar tradisional rakyat, minimnya ruang publik yang humanis. Jangankan rakyat, bahkan, Negara pun kalah dibantai gelombang kapitalisme di tanah emas ini: gegernya lahan Gedung nasional Medan, beberapa BUMN yang gagal

mempertahankan atau justru kehilangan asset lahannya. Medan tanpa mempersiapkan dan mempertimbangkan kesehatan tubuh sosialnya, juga sedang bergerak ke arah pembangunan high building, agresi pembangunan super blok yang membatasi kita melihat senyuman manis para tetangga.

Memang, Medan yang sejak dulu adalah harta karun yang tidak terpendam bagi banyak penambang untuk berdatangan, ia juga merupakan lahan perebutan ragam kepentingan. Kalau dahulu lembaran Tembakau Deli bisa menggegerkan pasar Eropa, memicu bangsa Eropa melakukan penjajahan dan lahan subur perkebunan bisa menjadi petaka bagi bangsa sendiri, apa lagi sekarang keadaannya lebih dari itu. Medan menjadi lahan mengadu nasib, mencari peruntungan, dan kini, jelang Pilkada 2015 beberapa kandidat tengah mempersiapkan diri untuk pertarungan perebutan kekuasaan di tanah emas, bagi sebagian kecil orang bahkan memiliki niat menjadi kepala daerah di Medan entah dengan kepentingan yang mulia atau bahkan kepentingan jahat.

## **BAB IV**

### **Krisis Mandat**

#### **A. Posisi Tawar *ala* Rakyat**

Dalam konteks pilkada, masyarakat kita tergolong relatif baru belajar berdemokrasi. Rakyat baru mengalami keadaan ketika mereka harus secara langsung menentukan siapa yang berhak menang dan menduduki kekuasaan. Terkadang dalam menentukan sebuah pilihan, rakyat menggunakan cara-cara yang sederhana (pragmatis). Di dalamnya tidak ada kepentingan apapun kecuali secukupnya.

Di tengah hingar-bingar pilgubsu 2008, menjelang kampanye dan hitung mundur (*countdown*) menjelang hari pencoblosan, ada fenomena menarik yang bisa dicermati berkaitan dengan cara orisinil rakyat menghargai hak pilihnya. Perbincangan dan wacana yang beredar adalah bahwa banderol rakyat semakin mahal. Semakin kentara bahwa para kontestan yang ikut kali ini mengemis dukungan rakyat, dan bukan sebaliknya.

#### ***Anomie* Kedaulatan Rakyat**

Alexis de Tocqueville mengatakan demokrasi adalah cara atau seni “pergaulan hidup” untuk mencapai kebaikan bersama. Gagasan ini merupakan alternatif terhadap pandangan *mainstream* yang mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan atau kedaulatan rakyat. Faktanya, frasa kedaulatan rakyat telah menjadi barang mainan politik jangka pendek. Ia mengalami degradasi nilai dan makna. Dengan demikian frasa pergaulan hidup dan kebaikan bersama merupakan esensi dasar dalam demokrasi secara substansial yang bakal memberikan dasar dan makna terhadap demokrasi formal (pemilu).

Taruh saja dinamika politik menjelang pilgubsu 2008 ini di Desa Cempedak Lobang, Kabupaten Serdang Bedagai. Desa itu beserta warganya masih relatif tidak begitu menghebohkan dalam gembar-gembor pilgubsu 2008, yang menarik adalah disana sempat diadakannya sebuah pertemuan tokoh-tokoh (agama) untuk melakukan pembacaan dan atau menentukan pilihan yang tepat sebagai gubernur dalam Pilgubsu April 2008 mendatang. Pasalnya mereka terpecah dalam tarik ulur kepentingan jangka pendek yang tidak sepele.

Seorang ustazd pemilik pesantren menyebutkan bahwa ia akan memilih dan mendukung siapa pun dari para kontestan yang

mau langsung memberikan sumbangan untuk pembangunan pesantrennya. Karena ia cukup lelah dan merasa dibohongi terus-menerus dalam setiap kali pemilihan. Namun, di sisi yang berseberangan ada seorang santri -sebagai pemilih pemula- dengan nada optimis berpendapat bahwa ia akan mendukung kontestan yang bisa menyediakan pendidikan gratis sampai ke perguruan tinggi. Dua kepentingan ekonomis itu tidak mudah mereka putuskan. Sementara yang tidak kalah penting adalah ikatan ideologis-emosional. Sebagaimana ikatan etnis dan kesejarahan dengan para kontestan.

Memang tidak pernah terungkap bagaimana mereka (rakyat) memikirkan bahwa proyek-proyek tersebut sesungguhnya adalah “mantra” wajib yang hanya dikomat-kamitkan dalam setiap ritual kampanye. Jika pun benar terjadi, ia harus melalui prosedur yang sangat panjang dan rumit. Sedikitnya sang calon tersebut harus membuat proposal. Lalu diajukan untuk kemudian dirapatkan dan disetujui. Belum lagi ditambah dengan berbagai intrik dan lobi bisnis birokrasi yang sarat dengan KKN.

Pola ini jelas berbeda dengan berbagai peristiwa pemilu sebelumnya (Pilcaleg 2004) ketika para caleg tampil nyaris sebagai *omnipolen* (berkekuatan hebat) meskipun sebetulnya

adalah *impolen* -untuk tidak mengatakan impoten alias tidak berdaya sama sekali- dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang membela rakyat. Faktanya memang demikian, tiga tahun sesudah Pemilu 2004, rakyat belum merasakan bentuk kesejahteraan dari keberhasilan demokrasi yang lebih canggih dari sebelumnya. Padahal, hari demi hari rakyat dipertontonkan parodi dan kebengisan politik oligarkhis.

Disamping pencerapan kecerdasan pemahaman politis rakyat, elit partai tidak lagi bisa mengangkangi seluruh wilayah politis dari konstituen. Tampaknya ada kecerdasan alami yang berkembang dan hidup dimasyarakat. Sangat mungkin aspek otentik ini luput dari perhatian para elit politik. Rakyat mulai jernih memilih dan memilah mana yang bungkus mana yang isi.

Rakyat tidak akan mudah lagi terkecoh mana yang asli (pemimpin sejati) dan mana yang aspal (asli tapi palsu) atau yang sekedar mencari kekuasaan. Mungkinkah ini adalah hasil dari resistensi terhadap rezim pemiskinan kecerdasan dari Orde Baru yang begitu gemilang? Atau ke-semrawut-an orde reformasi? Bukan mustahil.



Apa yang dipelajari rakyat dari beberapa corak pemilu yang telah mereka alami adalah bagaimana diferensiasi kepentingan partai dan elit politik tidak pernah dilupakan. Karena melek politik itulah, rakyat menuntut para kontestan harus menurunkan harga dirinya sendiri. Ibarat pedagang kalau memang hanya jualan mie ayam, ya jangan dikatakan jualan ayam panggang. Perkembangan proses inilah yang di satu pihak relatif membingungkan para elit partai. Persis! Karena rakyat bukan lagi robot-robot yang asal perut kenyang lantas bisa dicengkeram seluruh hidupnya. Rakyat benar-benar memiliki hak suara secara otonom.

Gejala jumlah Cagubsu yang beragam mencirikan keterbukaan pada sebuah pilihan. Demikian demokrasi menjamin kebebasan dan keterbukaan tersebut. Kebingungan karena adanya banyak pilihan adalah jauh lebih demokratis-manusiawi daripada kebingungan karena ketidak-bebasan di bawah todongan moncong senjata seperti ketika alternatif pilihan hanya tiga partai sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru.

Oleh karenanya, kali ini suara rakyat betul-betul mahal. Para cagub tidak boleh berhenti untuk menguras kocek sendiri demi mendapatkan suara rakyat. Bahkan, orang tidak pernah mengira sebelumnya kalau Cagub tersebut *de facto* memiliki kekayaan

yang begitu melimpah, jauh dari penampilan mereka selama ini. Seolah-olah demi mendapatkan keterwakilan suara rakyat dalam diri mereka, apapun diperjuangkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin dalam benak para Cagub biaya puluhan bahkan ratusan milyar yang telah dikeluarkannya selama masa kampanye dan tebar pesona, akan cepat balik modal ketika betul-betul terpilih menjadi Gubsu nanti.

Itulah kekuasaan. Siapa pun pasti tergoda. Ia menggiurkan. Semua orang berlomba merebutnya. Memang, kekuasaan memberikan kehormatan dan menyediakan kemewahan. Namun, kita lupa bahwa itu barulah satu sisi. Sementara di sisi lain, kekuasaan itu menuntut tanggung jawab. Kita harus mengatakan bahwa ketika seseorang memegang jabatan hendaknya dia tidak bersikap mentang-mentang. Justru kekuasaan harus membuat orang yang disertai tanggung jawab itu untuk rendah hati dan tidak pongah. Sebab, jabatan itu adalah sebuah amanah dan bahkan fitnah (cobaan).

Di sinilah kekuasaan itu menjadi tidak mudah. Sebab, kekuasaan tidak bisa dilihat hanya sekedar sebagai panggung tempat pemegang kekuasaan untuk tampil dan mempertontonkan kehebatannya. Sejatinya kekuasaan harus memberikan manfaat kepada masyarakat yang dipimpin.

Kekuasaan harus digunakan untuk memberikan kesejahteraan umum, *bonum publicum*.

Untuk itulah, tidak semua orang berhasil ketika diberi kekuasaan. Bahkan seringkali kekuasaan itu hanya dipakai untuk kepentingannya sendiri. Hanya dinikmati kehormatannya, tidak tanggung jawabnya. Dengan kekuasaan itu, banyak orang menjadi lupa diri dan merasa menjadi orang yang tidak tertandingi.

Kesadaran ini yang membuat “*bargaining position*”, posisi tawar rakyat dihadapan para kontestan semakin mahal. Ketika benak rakyat tersadarkan, mereka sudah mempersiapkan strategi khusus agar para Cagubsu itu tidak hanya menjadi tikus-tikus kantor yang nantinya mengemplang uang rakyat, menyengsarakan rakyat dengan KKN, dan menggadaikan daerah ini kepada pihak asing. Dalam menentukan pilihan, sekurang-kurangnya kita dapat menerapkan rumus yakni “ambil uangnya jangan pilih orangnya”. *Aduhai! Aduhai!* betapa mahal ongkos demokrasi, *upps maaf,..* suara rakyat.

## **B. Merawat Daulat Rakyat**

Pilkada di Sumatera Utara akan dilaksanakan 7 Maret 2013 mendatang. Memasuki suasana itu, hiruk pikuk politik semakin memanaskan situasi. Sosialisasi pelaksanaan Pilgubsu 2013 sedang gencar dilakukan oleh KPU Sumut. Para kandidat yang akan maju dalam pilkada kali ini berupaya keras merayu rakyat untuk mau memilihnya. Sementara itu rakyat hanya mampu meratapi nasib dan permasalahannya tanpa peduli apakah peristiwa itu berpengaruh kepadanya.

Menelisik lebih jauh, ada dua panorama yang kontras dan saling berlawanan. *Pertama*, ekshibisionisme para kandidat yang maju dalam pilgubsu. Kedua, kelesuan dan apatisisme politik masyarakat yang kian menguat. Jika demikian, bagaimana nasib daulat rakyat?

### **Krisis "Gejag"**

Hakikat demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan daulatnya atas perjalanan negara. Maka, tingginya angka golput merupakan rendahnya derajat kualitas demokrasi sekaligus ancaman terhadap legitimasi perjalanan negara. Dahulu, Soekarno pernah "berwasiat" tentang lima

macam krisis yang bisa mematikan perkembangan demokrasi. *Pertama*, krisis politik. Ia membuat publik tidak percaya lagi kepada demokrasi. *Kedua*, krisis alat-alat kekuasaan negara. *Ketiga*, krisis cara berpikir dan cara meninjau. *Keempat*, krisis moral. *Kelima*, krisis *Gejag* (kewibawaan otoritas). Saat ini, apa yang disebutkan Soekarno itu mematuk-matuki sendi-sendi kehidupan bernegara hingga keropos dan terancam runtuh. Misalnya, korupsi di birokrasi pemerintahan, korupsi di parlemen yang secara ajeg menggerogoti sendi-sendi keutuhan bangsa. Semua itu mendukung pada terbentuknya apatisme politik rakyat dalam suasana demokrasi.

Demokrasi sejatinya diidealkan sebagai sirkuit pencarian titik jumpa ragam kepentingan yang berseliweran dalam masyarakat plural. Seperti dikatakan J.S. Furnivall; "dalam suatu masyarakat yang plural terdapat disorganisasi tuntutan sosial secara umum, karena struktur kebutuhan dan motif-motif ekonomi tidak dikoordinasikan oleh nilai-nilai budaya bersama." Politik demokratis ditujukan untuk menciptakan imaji pertautan baru warga masyarakat. Dari ikatan komunal menuju ikatan kebangsaan yang menembus sekat-sekat partikular dan bersifat lintas komunal.

Syarat penting bagi keridaan warga untuk menautkan diri dengan entitas kebangsaan ini adalah tersedianya kepemimpinan moral sebagai sumber kepercayaan publik. Namun, saat ini, basis moralitas pemimpin yang lemah inilah yang membuat publik mulai menyangsikan faedah demokrasi bagi penyelesaian masalah-masalah kolektif bangsa Indonesia sebagai masyarakat plural. Bertahun-tahun pemerintahan demokratis diperjuangkan dengan keringat dan darah reformasi di seluruh lini dalam sistem politik negara.

Pasca runtuhnya Orde Baru 1998, para *stakeholder* sibuk mencari desain politik untuk mengatasi *gap* antara rakyat dan pemimpinnya. Salah satunya, adalah pemilihan pemimpin secara langsung. Sejak Juni 2004, mekanisme pemilihan langsung diperkenalkan. Mulai dari pemilihan legislatif, pilpres, dan pilkada. Inilah desain politik Indonesia paling mutakhir yang diharapkan menjadi jawaban atas kebuntuan proses seleksi kepemimpinan politik.

Namun, ketika kesempatan itu diraih, politik kembali tak berkhidmat bagi kepentingan orang banyak sebagaimana yang diwasiatkan Ibnu Taimiyah dalam *al-ahkam as-siyasah*; "bahwa politik harus digunakan untuk kemaslahatan manusia". Mekanisme yang bagus dan canggih itu (pilkada) tidak

didukung oleh *stakeholder*. Para politisi dan pejabat negara yang mumpuni. Yang terjadi justru pilkada-pilkada menghasilkan pemimpin yang miskin visi dan wawasan, perilaku politik tercerabut dari moralitas seperti terpisahnya langit dan bumi. Orang-orang yang menggenggam otoritas justru berlomba menghancurkan wibawa dari otoritas yang ia miliki. Lalu apa reaksi rakyat dengan kejadian ini?

Berhadapan dengan demoralisasi para pemimpin, terjadi apatisme politik dari masyarakat sebagai reaksi atas perilaku elitnya. Secara psike politik, kelesuan arus bawah dan ketidakpedulian masyarakat untuk datang ke TPS melakukan pemungutan suara dapat dikatakan sebagai akumulasi kemukaan yang terhimpun dalam keadaan batin mereka sampai kehilangan asa terhadap datangnya perbaikan-perbaikan.

Ada anggapan massal "pemilu tidak akan menghasilkan kebaikan apapun bagi rakyat". Secara pesimis kita patut bertanya, apa yang bisa diharapkan dari suatu pesta demokrasi seperti pilkada yang dipenuhi ketidakpastian hukum, kecurangan, pemborosan, dan kelemahan komitmen moral para pemimpin? Dalam keadaan ini agak sulit mengarahkan ke mana demokrasi kita. Inilah yang disebut oleh Anthoni Gidden sebagai "ironi demokrasi" (2000:90). Pertanyaan ini bukan

hendak meniadakan pemilu/pilkada? Karena kita sudah sepakat bahwa pemilihan merupakan normatifitas demokrasi.

Jika dicermati pokok masalahnya adalah para elit politik tidak menguasai satu bahasa penting sebagai politisi beradab. Rakyat tidak bisa membedakan antara sufi dengan sapi. Ini substantif bukan teknis. Kegiatan politik harus mengedepankan etika atau *fatsun* yang berorientasi pada *bonum publicum*, berbakti kepada kemaslahatan publik. Kebanyakan politisi kita cuma tahu bahasa politik dan ekonomi. Bahasa "politik" selalu bertanya siapa yang menang? Bahasa ekonomi selalu bertanya di mana untungnya? Kenyataan ini sesungguhnya pernah dicatat serius oleh S. K. Aung San (*The Voice of Hope*, 1996); “sekali kita mendapatkan demokrasi, maka akan selalu ada orang yang menyalahgunakan hak-hak demokrasi itu dan menggunakannya hanya untuk kesenangan sendiri untuk mencapai tujuan perorangan.”

Memang, harus diakui demokrasi juga punya celah. Kadang kita terlena dalam *euphoria*, kita lengah untuk menjaga demokrasi sehingga ketika celah tersebut dimengerti oleh orang-orang jahat maka demokrasi akan dikhianati. Setidaknya, celah demokrasi ada pada pemaknaan terma kebebasan, yaitu kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ia memang terbuka



bagi banyak tafsir, sehingga tafsir-tafsir tersebut juga sampai menjelma dalam beragam bentuk termasuk “bebas yang bablas”, tanpa pakem dan aturan-aturan yang mengikat. Demokrasi yang makna sejatinya daulat rakyat atas perjalanan berbangsa dan bernegara, ditelikung ke arah daulat elit atas rakyat.

### **Fatsun Politik**

Jika politisi ingin bermoral dalam politik, mereka harus menguasai satu bahasa lagi, yakni ”hikmah”, yaitu menguak kebenaran. Ahli hikmah selalu mempertanyakan ”apa yang benar”? Bahasa inilah yang secara metaforik dijelaskan dalam Pancasila sila keempat; ”kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan pengertian sederhana bahwa demokrasi tidak boleh dibiarkan, ia harus dipimpin dan diarahkan, ia tak boleh diberikan kepada elit/politisi busuk sehingga berkembang menjadi ajang avonturisme kepentingan perseorangan dan golongan. Demokrasi mesti dipimpin dengan hikmah, *wisdom*, dengan basis pengetahuan yang mendalam, penuh dengan rasa keadilan dan pertanggungjawaban, yang diramu dalam akal kolektif rakyat dalam wahana permusyawaratan dan perwakilan. Inilah yang disebut dengan *high politic*. Sebuah model berpolitik yang

lebih santun dan berwibawa. Dengan ini stigma politik terlalu elitis dan despotik akan berubah menjadi populis dan egaliter.

Suasana inilah yang akan membawa rakyat dalam kesejukan. Karena pemimpinnya benar-benar mewakafkan diri untuk kemaslahatan orang banyak. Jika rakyat sudah merasakan manfaat dari kehadiran para pemimpinnya, maka dia akan dengan sadar dan rida sepenuhnya mendatangi TPS-TPS untuk memilih. Bagaimanapun pemilu membutuhkan partisipasi rakyat. Karena rakyatlah yang berkuasa penuh dalam menentukan siapa yang layak memimpinnya.

Sejatinya para tokoh yang bakal maju dalam pilkada menyadari bahwa pilkada tidak sekedar proses politik rutin lima tahunan. Apalagi sekedar pemanasan mesin politik menuju Pemilu 2014. Pilkada juga bukan proses di mana para tokoh hanya bisa menebar *image* lewat baliho berikut dengan segenap narsisnya. Tetapi pilkada merupakan ajang pengedepanan moralitas politik yang berkorelasi kuat dengan kepekaan dan sensitifitas terhadap derita rakyat yang tercekik kemiskinan dan pengangguran. Kontestasi dalam pilkada ini harus diarahkan dalam konteks pendewasaan budaya politik masyarakat. Agar masyarakat merasakan pendidikan politik dan menemukan kearifan-kearifan di dalamnya. Sehingga, partisipasi politik

masyarakat dapat meningkat secara signifikan, demokratisasi dapat berjalan dengan baik. Pada gilirannya nanti, demokrasi akan benar-benar mampu menciptakan kesederajatan ekonomi, sosial dan politik.

### **C. *Iming-iming buat Pening***

*“Bulan yang engkau janjikan, bintang yang engkau tawarkan,  
yang ada hanya celaka, karena hati kau sakiti”, [Rita  
Sugiarto\_Iming-iming]*

Di tengah hingar-bingar pemilu 2014, proses kampanye dan hitung mundur (*countdown*) hari pencoblosan, ada fenomena menarik yang bisa dicermati berkaitan dengan rakyat dan cara mereka yang orisinal dan unik menunaikan dan menghargai hak pilihnya. Percakapan yang beredar sampai ke pelosok gunung adalah bahwa suara rakyat dibanderol dengan angka-angka yang mengejutkan, sementara para caleg menyusun segenap janji dan iming-iming untuk rakyat yang dikasihinya. Semakin kentara bahwa para kontestan yang ikut kali ini mengemis dukungan rakyat, dan bukan sebaliknya.

### **Anomie**

Alexis de Tocqueville mengatakan demokrasi adalah cara atau seni “pergaulan hidup” untuk mencapai kebaikan bersama. Gagasan ini merupakan alternatif terhadap *mainstream* yang

mengartikan demokrasi sebagai daulat rakyat. Faktanya, di tangan para politisi frasa kedaulatan rakyat telah menjadi barang mainan politik jangka pendek, ia mengalami degradasi nilai dan makna. Dengan demikian frasa pergaulan hidup dan kebaikan bersama merupakan esensi dasar dalam demokrasi secara substansial yang bakal memberikan dasar dan makna terhadap demokrasi formal (pemilu).

Taruh saja dinamika politik pemilu 2014 di sebuah Desa di Bagian selatan Sumut. Desa itu beserta warganya masih relatif tidak begitu menghebohkan dalam gembar-gembar pemilu 2014 padahal gambar-gambar para caleg dari ragam partai sudah bertebaran di manapun. Menariknya adalah dalam suatu waktu ketika saya berkunjung ke sana sempat diadakan sebuah pertemuan kecil dari beberapa warga untuk melakukan pembacaan dan atau menentukan pilihan yang tepat partai apa dan caleg yang bagaimana yang seharusnya dan sebaiknya dipilih. Pasalnya mereka terpecah dalam tarik ulur kepentingan jangka pendek yang tidak sepele. Seorang Petani menyebutkan bahwa ia akan memilih dan mendukung siapa pun dari para kontestan yang mau langsung memberikan sumbangan untuk pembangunan dan peduli pertanian. Namun, di sisi yang berseberangan ada seorang santri\_sebagai pemilih pemula\_dengan nada optimis berpendapat bahwa ia akan mendukung

kontestan yang bisa menyediakan pendidikan gratis sampai ke perguruan tinggi. Dua kepentingan ekonomis itu tidak mudah mereka putuskan sementara yang tidak kalah penting untuk dipertimbangkan adalah ikatan ideologis-emosional, etnis dan kesejarahan dengan para kontestan yang bersedia memberi iming-iming tersebut. Tampaknya, rakyat cukup lelah menimbang-nimbang kepentingan apa yang bisa mereka tawarkan sebagai pemilik hak suara. Mereka cukup lelah diberi janji dan bahkan dibohongi terus-menerus dalam setiap kali pemilihan. Seorang biduan hadir saat itu justru mengutip petikan lagu yang dipopulerkan oleh Rita Sugiarto yang masyhur dengan judul “Iming-iming”, *Bulan yang engkau janjikan, bintang yang engkau tawarkan, yang ada hanya celaka, karena hati kau sakiti.*

Memang tidak pernah terungkap bagaimana mereka (rakyat) memikirkan bahwa proyek-proyek tersebut sesungguhnya adalah “lagu wajib” didendangkan dalam setiap ritual kampanye. Jika pun benar terjadi, ia harus melalui prosedur yang sangat panjang dan rumit, sedikitnya sang calon tersebut harus membuat proposal, lalu diajukan untuk kemudian dirapatkan dan disetujui, belum lagi ditambah dengan berbagai intrik dan lobi bisnis birokrasi yang sarat dengan KKN. Sementara rakyat tak cukup banyak waktu

mengawasi semua itu, “*musim hujan kepanasan, musim panas keujanan, pantaslah saja diriku selalu dalam keresahan*”, demikian keadaan rakyat menunggu realisasi iming-iming para politisi, kelak berirama sang biduan.

Pemilu 2014 ini para caleg tampil nyaris sebagai “ratu adil” bahkan pola-pola komunikasi dalam kampanyenya menyerupai nabi-nabi, suka beramal, gemar nyumbang mesjid, sedekahi rakyat, sambil mengatakan “ayo ikutlah dalam barisan ku agar kalian selamat dan sejahtera”. Penampilan mereka itu seolah-olah *omnipolen* (berkekuatan hebat) meskipun sebetulnya adalah *impolen*-untuk tidak mengatakan impoten alias tidak berdaya sama sekali dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang membela rakyat. Faktanya memang demikian, tiga gelombang pemilu 2004, 2009, dan kini 2014, rakyat belum merasakan bentuk kesejahteraan dari keberhasilan demokrasi yang lebih canggih dari sebelumnya. Sekalipun hari-demi hari dengan simultan rakyat dipertontonkan parodi politik, dan kebengisan politik oligarkhis.

### **Suara mahal**

Di samping peningkatan kecerdasan pemahaman politis rakyat, elit partai tidak lagi bisa mengganggu seluruh wilayah politis

dari konstituen. Tampaknya ada kecerdasan alami yang berkembang dan hidup di masyarakat, sangat mungkin aspek otentik ini luput dari perhatian para elit politik. Rakyat mulai jernih memilih dan memilah mana yang bungkus mana yang isi. Rakyat tidak akan mudah lagi terkecoh mana yang asli (pemimpin sejati) dan mana yang aspal (asli tapi palsu), yang sekedar mencari kekuasaan. Mungkinkah ini adalah hasil dari sebuah resistensi dari rezim pemiskinan kecerdasan dari orde baru yang begitu gemilang? Atau kesemrawutan orde reformasi? Bukan mustahil.

Apa yang dipelajari rakyat dari beberapa corak pemilu yang telah mereka alami adalah bagaimana diferensiasi kepentingan partai dan elit politik tidak pernah dilupakan. Karena meleak politik itulah, rakyat menuntut para kontestan harus menurunkan harga dirinya sendiri. Jangan hanya janji-janji, kami jangan sekedar memberi iming-iming yang hanya membuat pening rakyat. Perkembangan proses inilah yang di satu pihak relatif membingungkan para elit partai, persis karena rakyat bukan lagi robot-robot yang asal perut kenyang lantas bisa diraih seluruh hidupnya. Rakyat benar-benar memiliki hak suara secara otonom.



Keragaman karakter caleg merupakan keterbukaan pada sebuah pilihan. Demikian demokrasi menjamin kebebasan dan keterbukaan tersebut, kebingungan karena adanya banyak pilihan adalah jauh lebih demokratis-manusiawi dari pada kebingungan karena ketidak-bebasan memilih sebab di bawah todongan moncong senjata seperti ketika alternatif pilihan hanya tiga partai sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru.

Oleh karenanya, kali ini suara rakyat betul-betul mahal, para caleg tidak berhenti untuk menguras kocek sendiri demi mendapatkan suara rakyat. Bahkan, orang tidak mau tahu kalau caleg tersebut *de facto* tidak memiliki kekayaan yang begitu melimpah. Celakanya, bagi bagi caleg seolah-olah demi mendapatkan keterwakilan suara rakyat dalam diri mereka, apapun diperjuangkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin dalam benak para caleg biaya puluhan bahkan ratusan miliar yang telah dikeluarkannya selama masa kampanye dan tebar pesona, yang banyak itu akan cepat balik modal ketika betul-betul terpilih menjadi anggota dewan nanti. Anda tahu dengan cara apa mereka mengembalikan modal dengan cepat?

#### *D. Gelagat Kandidat Rakyat*

Pemilu 2014 mengkonfirmasi keadaan fragmentasi politik di antaranya selisih suara antarpolisi tak lagi signifikan. Terkait gelaran Pilkada langsung yang tidak lama lagi di Sumut, hampir semua partai harus berkoalisi untuk mengukung calon bupati/walikota dan calon wakil bupati/wakil walikota. Tulisan ini ingin mengeker bagaimana Kandidat mendekati rakyat, bagaimana koalisi biasanya dibangun dan konsekuensi apa yang akan terjadi dari bangunan koalisi tersebut.

Gelagat orang-orang yang berniat maju sebagai kandidat kepala daerah secara sederhana dapat di lihat dengan kasat mata. Mungkin sifat dan kharakternya saja yang bisa dikategorisasikan apakah vulgar, norak, atau malu-malu kucing. Pemandangan yang lumrah dapat dilihat lewat, misalnya, pajangan baliho, nampang di media, berkunjung ke berbagai acara yang banyak dihadiri orang, menyelenggarakan kegiatan keagamaan, berderma ke berbagai acara santunan, bencana dan jenis lainnya. Belakangan upaya mendapatkan simpati dari rakyat, orang-orang semakin lebih kreatif dan menantang, misalnya, dengan mengadakan program “Juling”, jum’at keliling. Yaitu suatu kegiatan salat jumat secara

berpindah-pindah dari satu mesjid ke masjid yang lain. Selain itu, ada pula “Suling” atau subuh keliling. Suatu gerakan menyaser setiap masjid-mesjid di subuh hari meramaikan salat subuh berjamaah. Sungguh suatu kegiatan yang mengharu-biru ketika banyak orang terlelap tidur, tiba-tiba ada calon pemimpin yang rajin salat subuh sekaligus menyapa rakyatnya. Bukan main menantang kegiatan ini bahkan untuk anak-anak jebolan pesantren atau mahasiswa UIN sekalipun. Cara-cara mengambil simpati seperti ini bukan saja berlaku bagi orang yang masih hidup, bahkan kepada orang yang sudah matipun menjadi sasaran eksploitasi perebutan simpati rakyat.

### **Insentif**

Setelah itu, pola kerja-kerja politik akan lebih jauh berbeda sifatnya ketika memasuki ranah membangun koalisi. Materi pembicaraan yang paling efektif bagi pemain politik adalah merebut kekuasaan, jika sedikit rela bisa juga bagi-bagi kekuasaan (*power sharing*). Hal ini merupakan kode komunikasi politik yang mempertemukan antarelite partai, di luar itu nampaknya tidak sekalipun menarik bagi mereka. Di sinilah *electoral vote*, kursi yang diperoleh tiap partai di gedung dewan menjadi alat menentukan tawar-menawar politik. Maka, jelang pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati,

walikota dan wakil walikota akan mempertunjukkan drama koalisi. Di sini, publik dipaksa menonton suguhan aksi, gelagat yang “merakyat” dari kalangan elite. Konon, demi rakyat, elite di satu partai bisa berbeda-beda aspirasi dalam berkoalisi, lebih rumit lagi memahami di mana partai bisa saja memberikan dukungan, bergabung dengan koalisi yang berbeda ideologi, mungkin juga berbeda dengan selera konstituennya. Suara rakyat diperdagangkan para elite melalui negosiasi dan transaksi di belakang layar. Drama politik ini dipertontonkan para elite tanpa rasa malu, tanpa gagasan dan ide, kecuali sepenggal lagu lama yang diputar bolak-balik yaitu “mencari kesamaan visi dan *platform* dalam berkoalisi”. Drama seperti ini merupakan pengabaian atas akal publik. Seolah publik tak bisa menangkap kamufase yang mereka buat padahal publik sudah dapat mengakses ragam informasi politik dari berbagai sumber.

## **Realisme**

Dalam politik dagang sapi, negosiasi, tawar-menawar, dan kompromi menjadi kata kunci. Tukar-menukar insentif material menjadi kata kunci. Selain aspek ekonomi-politik, proses koalisi juga ditentukan chemistry politik antarelite partai. Politikus pada dasarnya ialah makhluk yang rasional dan

realistis, mereka akan merapat kepada kandidat pemenang. Di sini perhitungan menang-kalah menjadi faktor penentu. Kandidat yang memiliki elektabilitas tinggi menjadi titik konsentris dalam menghitung skema koalisi. Teori titik konsentris: jika sebuah batu dilemparkan ke dalam kolam berair, maka gelombang terbesar ada di jarak paling dekat di titik batu jatuh.

Mengingat popularitas calon di tingkat pemilih penting, dukungan terhadap pasangan calon yang punya magnet elektoral kuat menentukan gerak arah koalisi. Itu pula yang menjelaskan mengapa dari sekian banyak bakal calon hanya satu pasang yang menjadi primadona. Keberhasilan kandidat dalam memenangi pemilihan nanti sangat ditentukan kemampuan mereka dalam memaksimalkan dukungan dari *grassroot* partai masing-masing serta kemampuan mendapatkan dukungan dari pemilih partai yang tidak atau belum mendukung mereka. Pertimbangkan pula fenomena *split-voting ticket*, yang belakangan ini semakin kuat. Bahwa pilihan konstituen tidak selalu paralel dengan garis keputusan elite partai dalam mendukung pasangan calon. Pemilih mengambang menjadi faktor determinan dalam menentukan siapa Kepala Daerah kita lima tahun ke depan. Faktor figur wakil yang dipilih juga punya kontribusi dalam mengerek elektabilitas.

Calon wakil bupati/walikota bukan hanya pelengkap penderita, tapi juga penentu nasib kemenangan semua calon bupati/walikota. Masing-masing harus mencari pendamping yang tepat untuk menutupi kelemahan elektoral, baik ditinjau dari segi demografi, wilayah, maupun citra di mata pemilih.

Terakhir, kontestasi antarcalon akan lebih ditentukan pencitraan. Media tidak dapat dipungkiri dalam strategi pencitraan, dalam hal ini media cetak merupakan suatu media yang paling dapat memahami geliat politik, suasana batin masyarakat sampai di pedesaan. Selain itu, terdapat juga media internet. Dalam sebuah survey yang dilakukan Indikator Politik tahun 2013 melaporkan penggunaan Internet sebagai sumber referensi politik semakin menguat. Survey itu juga melaporkan bahwa isu terkait akses internet di Indonesia sebagai sumber informasi politik dan pengaruhnya terhadap tingkat apatisisme politik serta level kepercayaan terhadap institusi politik menghasilkan beberapa temuan menarik: khusus bagi pemilih yang mengakses internet menunjukkan bahwa semakin pemilih sering mengakses internet, maka semakin rendah kepercayaan terhadap institusi politik. Yang sering mengakses internet, juga lebih tertarik politik dan lebih sering mengikuti berita politik, ada hubungan positif antara level akses internet terhadap level kepedulian politik pemilih meskipun pada saat bersamaan hal

tersebut juga menaikkan level apatisme pemilih terhadap institusi politik.

Pendeknya, pencitraan figur politik memang penting. Tetapi, akan lebih baik lagi jika prosesnya tidak sekedar citra, tetapi harus lebih real dalam bekerja dan berkhidmah kepada rakyat. Dengan begitu politik tidak kehilangan maknanya yang hakikat, institusi politik tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat. *Toh*, sebenarnya rakyat sudah paham sesiapa kandidat yang benar-benar merakyat dan sesiapa kandidat yang sekedar bergelagat merakyat.

## **E. Pemuda Emoh Politik**

Pasca jatuhnya Soeharto 1998, di antara pekik heroik reformasi adalah transformasi kepemimpinan dari yang tua kepada yang muda. Banyak kawan-kawan mahasiswa terlibat di sana demi mengawal agenda tersebut. Sampai hari ini entah diperkirakan atau tidak, transformasi kepemimpinan pemuda itu ternyata mengalami tantangan dan kompleksitasnya tersendiri. Kondisi itu diakibatkan dari dalam dan dari luar. Tantangan dari luar berupa konstelasi politik internasional dan nasional yang tidak sesederhana yang dibayangkan.

Tekanan ekonomi dunia, tingkat pertumbuhan yang lambat, dinamika politik kebangsaan yang mendapatkan tantangan luar biasa dari di dalam negeri berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pola-pola pengaturan politik dalam negeri. Dari sinilah *political blunder* terjadi, ketidakmampuan para pemuda mengelola Indonesia dengan cara yang lebih penetratif dan canggih, tercebur ke dalam kubang lama di mana para pendahulunya berada.

Maka tidak sulit memahami statemen Marzuki Ali tentang anggota DPR muda sebagai sumber petaka bagi negeri. lebih



dari 50 persen dari anggota parlemen berusia muda yang diharapkan membawa perubahan dan perbaikan bagi negeri justru menjadi masalah baru. Sebagai contoh adalah Nazaruddin, Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Angelina Sondakh yang diduga-duga sebagai bermasalah dengan kasus korupsi. Seorang Bupati di daerah Jawa Barat berusia 35 tahun yang sempat digadang sebagai Bupati termuda sepanjang Indonesia merdeka itupun sudah mendiami penjara gara-gara korupsi. Alhasil, cita-cita reformasi menciptakan negara Indonesia baru yang bebas korupsi, ibarat jauh panggang dari api.

Tindak-tanduk politik seperti itulah yang membuat pemuda-pemuda lainnya *emoh* dengan politik. Hasil survey yang dirilis oleh LSI, mengkonfirmasi bahwa pemuda Indonesia bosan dengan politik. Peneliti Lingkaran Survey Indonesia (LSI) Vera Jasini Putri menyatakan 48% pemuda memandang politik sebagai sebuah hal yang membosankan. Sebanjar dengan saudara tuanya, survei bersama yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia dan Goethe Intitute serta The Freidrich Nauman Foundation For Freedom tahun 2011 menyebutkan 71,4% pemuda muslim tidak begitu tertarik dengan politik. Hanya 28,6% pemuda muslim yang mengatakan tertarik dengan politik (lihat [www.GoetheInstitute.com](http://www.GoetheInstitute.com)). Dengan

demikian, hasil survei itu menandakan ada masalah dengan politik di Indonesia, tindak-tanduk politisi dan partai politik yang tidak menampilkan konsep ideal dalam perspektif pemuda muslim.

### **Politik Tanduk-Tindak**

Bagaimana pemuda pergerakan (bukan politik praktis) yang ideologis itu? Nasib pemuda pergerakan juga tidak jauh berbeda. Cuma beda tipis (nuance). Beberapa organisasi kepemudaan tidak lagi tertib melakukan perkaderan kepemimpinan secara ideologis. Ketertiban itu luluh-lantak dengan perilaku politik uang dalam setiap suksesi. Selain itu mereka dapat memarkir ideologi pergerakannya sampai “perut” kenyang dengan cara politik tanduk-tindak. Protes-protes pergerakan terhadap keganjilan penyelenggaraan pemerintahan merupakan “tandukan” sampai pihak pemerintah memberikan kenyamanan kepada mereka, jika tidak langkah selanjutnya adalah menindak.

Keadaan pemuda seperti digambarkan di atas juga terjadi Pasca Perang Dunia II dan pada awal kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah kalah, banyak pemuda terperangkap dalam suasana batin yang galau. Sebagian mereka menjauh menghindari politik. Semboyan “Merdeka atau Mati” adalah gambaran jelas

tentang keadaan itu. Karena, selagi menyaksikan kemerdekaan belum sepenuhnya terwujud, sedangkan kesempatan untuk mati belum juga tiba, maka para pemuda itu terombang-ambing dalam kebimbangan tak menentu. Barangkali ini konsekuensi logis dari penjajahan Jepang yang hanya mengajarkan pemuda-pemuda saat itu baris-berbaris dan berkelahi, tetapi tak pernah dilatih bagaimana berpikir untuk memimpin. Lalu bagaimana pemuda masa depan, jika pemuda saat ini hanya mengajarkan “nanduk-nindak”? Apa jadinya kalau kurikulum perkaderan pemuda hanya soal korupsi, “rebutan lahan”, atau pemuda bosan politik?

### **Politik Kebajikan**

Dalam konteks keprihatinan terhadap kondisi kepemudaan ini, saya teringat nubuat Sutan Sjahrir ketika di penjara Cipinang dan tempat pembuangannya di Boven Digoel. Di sana Sjahrir menuliskan puisi indah dengan mengutip sepenggal sajak penyair Jerman yang dihafalnya di luar kepala, yaitu Friedrich Schiller. Dalam teks aslinya kutipan itu berbunyi: *und setzt ihr nicht das Lebenein, nie wird euch das Leben gewonnen sein---* yang maknanya: hidup yang tak dipertaruhkan, tak akan pernah dimenangkan.

Rupanya bagi Sjahrir politik bukan perkara yang sangat digandrunginya. Politik adalah bagian perkara yang tak terelakkan dalam kehidupan. Politik tidak terutama berarti merebut kekuasaan dan memanfaatkan kekuasaan itu, politik juga bukan persoalan mempertaruhkan modal untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, sebagaimana yang diyakini oleh penganut ajaran dan pelaksana *money politics* dewasa ini di tanah air kita. Bahkan politik juga tidak sekedar mempertaruhkan kemungkinan untuk merebut kemungkinan yang lebih besar.

Sjahrir dalam *Renungan dan Perjuangan*, menuliskan; “*Bukankah kesedihan pribadi kita akhirnya hanya sebagian kecil saja dari penderitaan yang besar, yang umum itu? Bukankah justru penderitaan itu merupakan ikatan kita yang semesra-mesranya dan sekuat-kuatnya? Justru sekarang--- pada saat aku barangkali harus berpisah untuk selamanya dengan yang paling kucintai dan yang paling indah bagiku di dunia ini ---justru sekarang inilah aku merasa lebih terikat pada bangsaku, aku semakin mencintainya lebih daripada yang sudah-sudah.*”

Di sini Sjahrir menganjurkan agar pemuda tidak boleh menghindar dari politik. Tetapi, menggunakannya sebagai

sarana merekayasa kemungkinan yang lebih baik dan besar manfaatnya bagi masyarakat. Kecintaan kepada bangsa harus diutamakan, pengorbanan diri dibutuhkan untuk kebahagiaan masyarakat. Jika realita politik sekarang menunjukkan ketidakjelasan dan kerumitan berbangsa, itu tidak berarti kita harus mengambil sikap menghindar dan tinggal di gua sendirian. Tetapi, kenyataan bahwa ragam masalah yang terjadi pada bangsa ini menuntut pemuda berperan aktif dengan memahami politik dengan benar. Pemahaman yang benar tentu akan menghasilkan kebenaran.

Politik tidak melulu kejahatan, filosof Jerman Max Weber mengatakan politik lebih dari pragmatisme simplistik, politik lebih dari sekedar matematika tentang hubungan mekanis di antara tujuan dan cara mencapainya. Berpolitik berarti melibatkan juga rasionalitas nilai-nilai atau *wertrationalitaet*. Politik itu suatu etika yang menuntut agar suatu tujuan yang dipilih harus dapat dibenarkan oleh akal sehat yang dapat diuji. Cara yang ditetapkan untuk mencapainya haruslah dapat dites dengan kriteria moral.

Konsepsi politik yang menjunjung tinggi nilai rasional itu membantu mengingatkan bahwa dalam politik ada suatu keindahan dan bukan hanya kekotoran, ada nilai luhur dan

bukan hanya tipu muslihat, ada cita-cita besar yang dipertaruhkan dalam berbagai langkah kecil, dan bukan hanya kepentingan-kepentingan kecil yang diucapkan dalam kata-kata besar. Hal-hal inilah yang menyebabkan politik dapat dilaksanakan dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. konsep ini yang harus dipegang oleh pemuda Indonesia masa kini, yaitu politik yang bersih dan mulia dengan memperjuangkan aspirasi rakyat, berkontribusi memperbaiki kehidupan bangsa sesuai level okupasinya.

Dalam menjalankan roda organisasi, layaknya sebuah perjuangan, ia membutuhkan pilar-pilar yang kokoh, harapannya dengan adanya pilar-pilar tersebut dapat menguatkan atau setidaknya menjadi imunitas. Seorang pejuang (mujahid) Mesir Hasan al-Banna mengatakan dalam risalahnya tentang pilar-pilar kemenangan; keimanan yang kuat, kekuatan pikiran yang jernih, pengorbanan yang ikhlas, dan semangat yang menggelora.

Dalam mengaktualisasikan ide-ide pembaruan, organisasi kepemudaan setidaknya dapat melakukan beberapa hal. *Pertama*, reorientasi gerakan. Organisasi kemahasiswaan atau kepemudaan harus dapat merumuskan orientasi gerakannya sehingga dapat menjadikan panduan dasar dalam menyusun

program-program kerja organisasi. *Kedua*, menciptakan suasana kondusif dan mampu memberikan medan wacana yang luas agar tercipta kesadaran atas tugas dan tanggung jawab generasi muda bangsa. Medan ini tidak saja ada karena adanya resonansi politik antar organisasi, namun lebih pada adanya sebuah langgam “nyentrik”. *Ketiga*, membangun organisasi secara kokoh, baik secara internal maupun eksternal. Yang pertama dapat dimulai dari pengadaan perangkat organisasi, manajemen organisasi yang modern, konsistensi perkaderan sampai dengan intelektualitas kader yang unggul. Yang kedua dapat dilakukan lewat pembangunan jaringan-jaringan yang mendukung, baik sesama organisasi kepemudaan maupun yang lainnya.

Yang pasti dari semua ini adalah, pemuda harus bekerja lebih keras dan terencana. Akan ada celah sejarah yang membutuhkan peran pemuda untuk mengisinya. Jadi, bukan sekedar kemauan mengisi celah sejarah tersebut, namun, kemampuan yang didukung oleh tekad politik yang kuat, dan pada gilirannya nanti sejarah akan memberikan kabar tentang apa yang kita simpan dalam hati, pikiran dan kerja kita. Semoga!!!

## **BAB V**

### **Politik Narsisme**

#### **A. Narsisme Pemimpin vs Apatisme Rakyat**

Pilkada di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara akan dilaksanakan 2010 mendatang. Memasuki suasana tahun Pilkada tersebut, hiruk-pikuk politik semakin memanaskan situasi. Para kandidat yang akan maju dalam Pilkada kali ini berupaya keras merayu rakyat untuk mau memilihnya. Menelisik lebih jauh, ada dua panorama yang kontras dan saling berlawanan secara ironi; yaitu narsisme dan ekshibisionisme para elit/tokoh yang bakal maju dalam Pilkada berhadapan dengan kelesuan dan apatisme politik masyarakat yang kian menguat. Hasil survey Lembaga Studi Demokrasi Indonesia (LSDI) september 2009 lalu di dua kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada Mei 2010 mendatang yaitu Labuhan Batu Utara dan Serdang Bedagai ditemukan bahwa sekitar 45 % masyarakat berpendapat bahwa Pilkada tidak akan menghasilkan perubahan dan perbaikan apa-apa.



Potret dua *angle* berbeda tersebut, jika dikorelasikan dengan momentum pilkada langsung sebagai desain politik paling canggih -yang konon dipercaya dapat membuahkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan sosial politik masyarakat- tampak sangat mencemaskan. Apalagi bila dikorelasikan dengan legitimasi Pilkada. Apakah keadaan ini yang disebut dengan ironi demokrasi?

### **Pemimpin narsistik**

Demokrasi sejatinya diidealkan sebagai sirkuit pencarian titik jumpa ragam kepentingan yang berseliweran dalam masyarakat plural yang sulit dipertemukan. Seperti dikatakan J.S. Furnivall; "dalam suatu masyarakat yang plural terdapat disorganisasi tuntutan sosial secara umum, karena struktur kebutuhan dan motif-motif ekonomi tidak dikoordinasikan oleh nilai-nilai budaya bersama."

Politik demokratis ditujukan untuk menciptakan imaji pertautan baru warga masyarakat. Dari ikatan komunal menuju ikatan kebangsaan yang menembus sekat-sekat partikular dan bersifat lintas komunal. Syarat penting bagi keridaan warga untuk menautkan diri dengan entitas kebangsaan ini adalah tersedianya kepemimpinan moral sebagai sumber kepercayaan baru publik. Namun, narasi yang hidup di masyarakat justru

basis moralitas pemimpin yang lemah inilah yang membuat publik mulai menyangsikan faedah demokrasi bagi penyelesaian masalah-masalah kolektif bangsa Indonesia sebagai masyarakat plural.

Dahulu, Soekarno pernah "berwasiat" tentang lima macam krisis yang bisa mematikan perkembangan demokrasi. *Pertama*, krisis politik. Ia membuat publik tidak percaya lagi kepada demokrasi. *Kedua*, krisis alat-alat kekuasaan negara. *Ketiga*, krisis cara berpikir dan cara meninjau. *Keempat*, krisis moral. *Kelima*, krisis *gejag* (kewibawaan otoritas). Saat ini, apa yang disebutkan Soekarno itu seolah sangat nyata di depan mata, mematuk-matuki sendi-sendi kehidupan bernegara sampai keropos dan terancam runtuh. Misalnya, korupsi di birokrasi pemerintahan dan korupsi di parlemen, persetujuan Polri-KPK-Kejaksaan yang secara kasat mata menjatuhkan kewibawaan institusi penegak hukum, dan banyak lagi kenyataan miris sejenis. Semua itu mendukung terbentuknya apatisme politik rakyat dalam suasana demokrasi.

Sistem demokrasi yang dibangun dengan susah payah, berdarah-darah dan berhasil mengubah tatanan banyak sistem politik negara pasca runtuhnya orde baru tahun 1998, para elit sibuk mencari desain politik sebagai upaya mengatasi jurang

pemisah yang begitu kentara, antara rakyat dengan pimpinannya. Hasilnya diantaranya adalah pemilu langsung. Pemilihan langsung sejak tahun 2004 dimulai dari pemilihan presiden dalam konteks lokal pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota sebagai mekanisme pemilihan kepemimpinan politik.

### **Apatisme**

Berhadapan dengan narsisme para pemimpin, terjadi apatisme politik dari masyarakat sebagai reaksi atas perilaku elitnya. Musababnya bisa bermacam-macam. Mulai dari kesalahan teknis administratif; pendataan DPT yang bermasalah dan masyarakat, tidak ada undangan ke TPS, masyarakat mendapat undangan tetapi tidak tercantum namanya dalam DPT, sosialisasi tentang pilkada yang kurang massif dan efektif. Secara psike politik, kelesuan arus bawah dan ketidakpedulian masyarakat untuk datang ke TPS melakukan pemungutan suara dapat dikatakan sebagai akumulasi kemukaan yang terhimpun dalam keadaan batin mereka sampai kehilangan asa terhadap datangnya perbaikan-perbaikan.

Ada anggapan massal bahwa "Pemilu tidak akan membawa kebaikan apapun bagi rakyat". Secara pesimis kita patut bertanya; apa yang bisa diharapkan dari pesta demokrasi

seperti Pilkada yang dipenuhi oleh ketidakpastian hukum, kecurangan, pemborosan, dan kelemahan komitmen moral para pemimpin? Dalam keadaan ini agak sulit mengarahkan ke mana demokrasi kita. Inilah yang disebut oleh Anthony Giddens sebagai "ironi demokrasi" (2000:90). Pertanyaan ini bukan hendak meniadakan Pemilu/Pilkada. Karena kita sudah sepakat bahwa pemilihan merupakan normatifitas dalam demokrasi.

Memang, harus diakui demokrasi juga punya celah. Kadang kita terlena dalam *euphoria*. Kita lengah untuk menjaga demokrasi sehingga ketika celah tersebut dimengerti oleh orang-orang jahat maka demokrasi akan dikhianati. Setidaknya, celah demokrasi ada pada pemaknaan terma kebebasan; kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ia memang terbuka bagi banyak tafsir, sehingga tafsir-tafsir tersebut juga sampai menjelma dalam beragam bentuk termasuk "bebas yang bablas", tanpa pakem dan aturan-aturan yang mengikat. Demokrasi yang makna sejatinya daulat rakyat atas perjalanan berbangsa dan bernegara, ditelikung ke arah daulat elit atas rakyat.

### ***High Politic***

Jika politisi ingin bermoral dalam politik, mereka harus menguasai satu bahasa lagi, yakni "hikmah", yaitu menguak

kebenaran. Ahli hikmah selalu mempertanyakan "apa yang benar"? Bahasa inilah yang secara metaforik dijelaskan dalam Pancasila sila keempat "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Dengan pengertian sederhana bahwa demokrasi tidak boleh dibiarkan, ia harus dipimpin dan diarahkan, ia tak boleh diberikan kepada elit/politisi busuk sehingga berkembang menjadi ajang avonturisme kepentingan perseorangan dan golongan. Demokrasi mesti dipimpin dengan hikmah, *wisdom*, dengan basis pengetahuan yang mendalam, penuh dengan rasa keadilan dan pertanggungjawaban, yang diramu dalam akal kolektif rakyat dalam wahana permusyawaratan dan perwakilan. Inilah yang disebut dengan *high politic*, sebuah model berpolitik yang lebih santun dan berwibawa. Dengan ini stigma politik terlalu elitis dan despotik akan berubah menjadi populis dan egaliter.

Suasana inilah yang akan membawa rakyat dalam kesejahteraan. Karena pemimpinnya benar-benar mewakafkan diri untuk kemaslahatan orang banyak. Jika rakyat sudah merasakan manfaat dari kehadiran para pemimpinnya, maka dia akan dengan sadar dan rida sepenuhnya mendatangi TPS-TPS untuk memilih. Bagaimanapun pemilu membutuhkan partisipasi rakyat. Karena rakyatlah yang berkuasa penuh dalam menentukan siapa yang layak memimpinya.

Sejatinya para tokoh yang bakal maju dalam Pilkada menyadari bahwa Pilkada tidak sekedar proses politik rutin lima tahunan. Pilkada juga bukan proses di mana para tokoh hanya bisa menebar *image* lewat baliho berikut dengan segenap narsisismenya. Tetapi Pilkada merupakan ajang pengedepanan moralitas politik yang berkorelasi kuat dengan kepekaan, sensitifitas terhadap derita rakyat yang tercekik kemiskinan dan pengangguran. Kontestasi dalam pilkada ini harus diarahkan dalam konteks pendewasaan budaya politik masyarakat. Bagaimana masyarakat merasakan pendidikan politik dan menemukan kearifan-kearifan di dalamnya. Sehingga, partisipasi politik masyarakat dapat meningkat secara signifikan dan demokratisasi dapat berjalan dengan baik. Pada gilirannya nanti, demokrasi akan benar-benar mampu menciptakan kesederajatan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam bahasa yang lebih sederhana; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga!!!

## B. Gombalisme di Altar Demokrasi

Perubahan! Pendidikan gratis! Perobatan gratis!! Pengentasan kemiskinan!!. Demikianlah para penggombal melancarkan “rayuan maut” kepada rakyat agar memilihnya. Masa kini kita sedang menyaksikan parade iklan-iklan yang menyosor kedalam sendi-sendi kesadaran dan menegaskan mantra-mantra yang menghanyutkan. Kita tak mampu melawan, karena parade iklan tersebut hanya berada di layar kaca, mereka tidak membuatnya nyata sebagaimana kenyataannya memang tak pernah ada, hanya ada di layar kaca.

Tak ada janji apapun, cuma mengenalkan diri, atau turut prihatin terhadap nasib petani dan pedagang pasar. Di pohon-pohon dan taman kota kita menyaksikan poster-poster para tokoh- tokoh kita dengan pose mata menatap ke atas-jauh, senyuman penuh persahabatan. Mereka tidak mengatakan apa-apa kecuali sekedar mengesankan kebajikan, meyakinkan khalayak bahwa harapan dan masa depan masih ada.

Kita sudah sampai pada era di mana *imagology* menjadi hal yang paling digandrungi di setiap aspek kehidupan. Ini keniscayaan. Apalagi saat ini media mendukungnya. Plus kemajuan teknologi informatika yang kian canggih. Di sini,

substansi tak penting, yang penting adalah *image*, citra. Para pemimpin menyebutnya dengan pencitraan politik. Di era ini mereka sangat tergantung pada pencitraan. Iklan politik mampu memoles wajah dan menyulap seorang koruptor menjadi begitu peduli terhadap nasib bangsa, nasib petani, dan sebagainya.

Ketidak-berdayaan kita dalam melawan rongrongan parade “gombalisme” tersebut merupakan bentuk intimidasi. Pada titik ini kita dapat katakan sedang terjadi tirani kata, tirani gombalisme. Pun, tirani tersebut semakin sering kita dengar masa-masa belakangan ini karena sebentar lagi (2009) akan ada pesta demokrasi manifesto dari frasa kedaulatan rakyat. Bagaimana jika para pegandrung gombalisme tersebut yang mengisi kontestasi pemimpin lima tahun mendatang? Demokrasi kita jadi apa? Apa anda kuat menahannya?

### **Pemilu digugat?**

Demokrasi kita masih sekedar proses penggunungan problematika hidup rakyat. Penekanan demokrasi pada prosedur sering melupakan substansi demokrasi itu sendiri, yaitu maujudnya kehendak rakyat yang tercermin dari kualitas keterwakilan. Inilah yang digugat oleh segolongan mahasiswa yang berteriak “tolak pemilu!!”, “golput!!”, yang lebih ekstrem justru menolak demokrasi dan menegakkan khilafah,



pemerintahan Islam. Mereka berdalih bahwa pemilu sementara ini hanya alat manipulasi kehendak rakyat untuk memuluskan rezim yang terbukti gagal mengatasi persoalan kontekstual. Janji-janji tanpa terbukti, dan hanya menjual suara rakyat.

Pemilu hanya diisi oleh para perayu rakyat yang tidak bertanggung jawab. Pemilu hanya sekedar memenuhi prosedur demokrasi. Partisipasi yang ada adalah partisipasi semu yang digerakkan bukan oleh kesadaran rasional. Namun, semangat ideologis buta dan pragmatisme modal. Demikian juga tingkat kompetensi tidak menyebar, hanya berputar pada segelintir orang atau elit. Beberapa partai besar masih percaya akan kesaktian para “sesepuhnya”. Bukan mencari yang lebih muda atau yang relatif baru.

Di sini, demokrasi kian kehilangan *elan vital*-nya sebagai sistem yang konon mampu membawa perbaikan. Kenyataan ini pada gilirannya memunculkan kerancuan berpikir yang berkembang di masyarakat. Kerancuan bahwa kehidupan dibawah bayang-bayang rezim otoriter masa lampau lebih baik daripada rezim demokratis. Demokrasi tidak membawa berkah. Demokrasi hanya menggunungkan masalah; pengangguran merebak, kemiskinan menanjak, disintegrasi dan konflik bergejolak.

Anggapan ini tak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya di sinilah kekeliruannya. Kita terkadang terlalu berharap pada demokrasi (pemilu). Padahal sejak awal Huntington sudah berwasiat; demokrasi tidak melulu mampu mengatasi persoalan kontekstual, ia hanya menanggulangi tiran. Persoalan kontekstual adalah problem pemerintahan yang dipilih secara demokratis melalui pemilu yang ada. Ketidakberesan pemerintahan demokratis seharusnya tidak dialamatkan pada sistem demokrasi dan pemilu sebagai prosedurnya. Kita perlu sadar, kegagalan pemerintahan demokratis berpotensi mengancam proses demokratisasi sehingga proses transisi demokrasi di negeri ini tidak berpucuk pada konsolidasi, tetapi berpaling dan kembali ke otoritarianisme.

### **Pemilu Beradab**

Pemilu merupakan perhelatan, sebuah pesta demokrasi yang diciptakan untuk meneraturkan pergiliran kekuasaan dan perebutan kepentingan agar konflik tidak menjadi semakin brutal. Pemilu adalah representasi keadaban sebuah bangsa di mana para pemimpinnya dipilih bukan melalui adu kekerasan, bukan dengan baku hantam dan senjata. Tetapi melalui kotak suara. Demokrasi yang berinti pada rakyat memang berhenti pada kotak suara. Ia yang mendapat suara terbanyak -bukan

karena kekuatan senjatanya atau uangnya- yang berhak mengendalikan bangsa. Suara adalah bukti dukungan, ia berkenan di hati rakyat. Keberkenanan politis tersebut seharusnya dijawab dengan tindakan etis. Bukan dengan cara-cara menggombal dan mengobral janji-janji. Rakyat menyerahkan mandatnya kepada orang atau partai yang mereka dengar mampu memperjuangkan kepentingannya.

Akan tetapi, yang sering terjadi, begitu mandat diberikan, mereka terkecoh karena yang terpilih mendapat mandat itu lalu menjauh dari harapan pemilih. Rakyat kembali harus menunggu hingga datang perhelatan berikut. Ketika itu pula sang wakil rakyat kembali mengumbar gombalnya agar dipilih lagi. Harapan, lagi-lagi rakyat berharap dalam buaian gombal tersebut. Buaian akan perubahan, kesejahteraan, pengentasan pengangguran, pembelaan terhadap wong cilik. Romantika tersebut terus terulang tiap ritus pemilu itu datang. Namun, belum tahu pasti wujudnya hingga negeri ini hampir terbuang dari peradaban.

Dalam demokrasi, pemilu bukan segalanya meskipun normatif keberadaannya. Tidak ada demokrasi tanpa pemilu. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa demokrasi bukan sekedar berbicara sebuah sistem dan prosedur pemerintahan yang oleh

Schumpeter disebut sebagai metode politik. Bagi Schumpeter demokrasi atau metode demokratis tidak lebih dari mencapai ragam keputusan politik di mana individu melalui perjuangan memperbutkan suara rakyat pemilih memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan (Huntington, 1991).

Sebuah gagasan yang meletakkan kesadaran bahwa kekalahan dalam Pemilu tidak direspon dengan perlawanan atas rezim yang menang, namun menerima kenyataan dengan lapang dada dan menunggu putaran pemilu berikutnya. Robert A Dahl dalam *On Democracy* (1999) menyebutkan bahwa demokrasi prosedural ini diyakini sebagai jalan paling mungkin untuk menuju perbaikan dan kemajuan.

Karena itu, penting dan mendesak sifatnya untuk mengupayakan terpilihnya pemerintahan demokratis yang mampu mengatasi persoalan kontekstual. Di sinilah signifikansi Pemilu sebagai hal yang tetap perlu. Pemilu adalah ruang untuk menentukan pilihan siapa yang layak dan tepat mengelola negeri ini. Mereka yang dianggap mampu mengatasi masalah kontekstual bangsa. Sebagai mekanisme demokrasi, pemilu menjadi kunci keamanan dan kematangan budaya berdemokrasi. Pemilu yang masih jauh dari substansi demokrasi harus disadari sebagai proses pendewasaan

demokrasi. Kian matang demokrasi kita, kian beradab dan bermutu pemilu yang kita selenggarakan.

Demokrasi akhirnya menjadi perjalanan panjang terjadinya pertarungan atau persaingan yang berujung konsensus. Namanya juga konsensus, pasti tidak ada yang memuaskan semua pihak. Konsensus meniscayakan ada tarik ulur antara yang ideal dan aktual. Keinginan untuk melakukan otonomi dan kontrol, kehendak untuk berekspresi dan ketertiban. Namun, dengan tarik ulur itulah ada ruang dialog bagi semua tafsir demokrasi yang tersaji dalam media *public sphere*. Dengan demikian, membangun demokrasi berarti menata kepingan dari banyak tafsir sehingga pada gilirannya akan mendapatkan mozaik utuh. Menata kepingan berarti merekonstruksi, tidak ada rekonstruksi tanpa dekonstruksi. Sebaliknya, dekonstruksi tanpa rekonstruksi hanya akan membawa malapetaka.

Gombalisme politik masuk ke ranah publik karena kelengahan kita juga. Dengan demikian, tugas kita adalah menggalang sekutu sebanyak dan selebar mungkin guna mengusir rezim gombalisme dan menuntut kejujuran dan tanggung jawab kepada wakil rakyat dan pemimpin kita. Kemudian, memastikan proses demokratisasi di negeri ini bergerak ke arah

rekonstruksi hingga berujung konsolidasi. Di sanalah kematangan demokrasi dievaluasi. Pemilu 2009 bisa menjadi momentum untuk melakukan itu. Dengan penuh keyakinan bahwa perjuangan demokrasi dalam makna distribusi sosial ekonomi yang adil, kebebasan berpikir dan berekspresi, dan penghargaan terhadap kepelbagaian harus tetap ditegakkan selama hayat masih dikandung badan, ada atau tidak ada pemilu.

### **C. Kepemimpinan Modal, Gombal, atau Moral?**

Entah kenapa saya mulai menyangsikan kemampuan demokrasi sebagai mekanisme pendistribusian kekuasaan yang fair dan relevan sekarang ini. Pasalnya, demokrasi yang mengandaikan daulat rakyat dalam menentukan arah kehidupan berbangsa tengah dihadapkan pada gelombang limbah politik yang berbau menyengat dan mengganggu tertib nafas sehingga menyesak dada. Daulat rakyat terkena limbah politik yang dikenal sebagai politik uang sehingga mengganggu kerja syaraf piker rakyat bahkan menghilangkan kewarasan. Tak ada lagi ketertiban dalam proses seleksi alamiah agar sejarah dapat memunculkan pemimpin yang benar-benar lahir dari rahim rakyat.

#### **Daulat Modal**

Menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2013 beredar isu tentang biaya politik untuk pencalonan gubernur mencapai seratus miliar, termasuk di dalamnya biaya perahu politik, publikasi, sosialisasi, mobilisasi dukungan, dan segala tetek-bengeknya. Bahkan ada pengamat yang mengatakan kandidat yang paling kuat modalnya yang paling

mungkin menang. Di era otonomi di mana pemilihan kepala daerah secara langsung diadakan, isu politik uang dalam pemilihan pemimpin tidak dapat dihindarkan. Mulai dari pemilihan kepala desa, bupati, gubernur. Isu ini menyerukan bukti-bukti bahwa kasus-kasus pemilukada yang disengketakan di MK paling banyak perkara politik uang. Fakta ini menunjukkan bahwa kepemimpinan, keterwakilan, dan kekuasaan harus tunduk pada daulat modal.

Persoalan yang dihadapi kini, mengapa otonomi sebagai petanda meningkatnya derajat demokratisasi lewat pemilihan langsung tidak memberikan perubahan dan kemajuan yang berarti? Kecuali otonomi daerah menjelma menjadi otonomi korupsi, perilaku korupsi yang semakin otonom pada orang-orang di situs-situs kekuasaan di level daerah. Bukankah perilaku tersebut akan berdampak serius bagi perkembangan kehidupan kebangsaan selanjutnya?

Sungguh ini merupakan pergeseran substansi yang cukup fundamental. Daulat rakyat digantikan dengan daulat modal, frasa suara rakyat suara Tuhan, digantikan dengan frasa siapa memiliki modal kapital yang besardialah yang punya takdir kemenangan. Dalam narasi kelahiran kepemimpinan di dunia, pemimpin berasal dari kaum aristokrasi, nasab yang khas dan



privilege, yang darahnya tidak merah. Pemimpin dinisbatkan pada titisan dewa, atau bayangan Tuhan di muka bumi (dzillu Allah fi al-Ard). Teori legitimasi langit ini diadaptasi dari peradaban Persia kuno yang diadopsi oleh dinasti kekhalifahan Islam sampai kerajaan Islam di Nusantara.

Masuknya kolonialisme Eropa di abad 17 ke Nusantara memperkenalkan mekanisme baru soal kepemimpinan. Bahwa kepemimpinan tidak dapat didasarkan pada legitimasi Tuhan tetapi berdasarkan kepentingan ekonomi dan legitimasi material. Keberhasilan pembangunan tidak dihitung berdasarkan seberapa berkenan Tuhan terhadap kepemimpinan tersebut, melainkan dihitung dengan angka-angka, pertumbuhan ekonomi, berapa yang miskin dan berapa yang kaya, berapa peningkatan kelas menengah, dan seterusnya. Karenanya, daulat modallah yang menentukan pembangunan infrastruktur, pertanian, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya dapat dijalankan atau tidak. Maka tak heran ketika moralitas, religiusitas harus tersungkur dihadapan kedigdayaan modal-kapital. Lihatlah di hadapan kita berapa banyak pejabat bupati yang dikenal dekat dengan ulama dan gemar berzikir besar-besaran tetapi sekaligus korupsi besar-besaran.

## **Kepemimpinan Gombal**

Tren berikutnya yang dapat menjadi indikator kepemimpinan adalah perilaku gemar gombal. Artinya, tren kepemimpinan masa kini ditandai dengan seberapa besar mereka memberikan janji gombalnya yang muluk dan seberapa riuh ia mendapatkan tepuktangan dari massa karena gembira digombali. Itu petanda pemimpin itu berhasil sebagai pemimpin. Perkara janji-janjinya itu ditepati dan diwujudkan dalam program kongkrit, itu soal lain yang penting gombalnya berhasil dulu. Jelang pemilihan biasanya banyak figur mendadak nabi; dialah yang “menggombal” bias memberikan kesehatan, memfasilitasi supaya rakyat jadi pintar, menjamin keselamatan hidup masa depan, dan seterusnya. Mirip pola-pola penyampaian para utusan Tuhan ketika menjelaskan risalah-Nya kepada umat manusia. Bedanya janji-janji Tuhan yang disampaikan para Nabi itu benar adanya, sementara janji para pemimpin itu belum tentu benar.

Demokrasi memang membebaskan para penipu untuk mengatakan apapun tanpa sangsi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, barangkali ini kelengahan kita juga ketika terlalu euphoria dengan kebebasan berpendapat dan berbicara termasuk berbicara yang tidak benar. Berbeda dengan Nabi Muhammad yang melarang umatnya menggambar dirinya

apalagi untuk kebutuhan dipercitrakan, para pemimpin masa kini gemar menebar gambarnya supaya dikenal publik. Gambar-gambar tersebut pun dicitrakan kebaikan dan persahabatan, agar dianggap orang yang menontonnya berdecak kagum, bahkan teriak histeris.

## **Pemimpin Bermoral**

Tipologi kepemimpinan modal dan gombal tentu saja tidak memberikan dampak yang positif bagi kemajuan kehidupan masyarakat kita hari-hari ini. Karena itu kepemimpinan moral harus dikedepankan dan harus dimenangkan. Seorang filosof masyhur Alfarabi (257-339H/870-950M) dalam kitabnya *Ara' Ahl al-Madinah al-Fadhilah* mempersyaratkan kepemimpinan moral dalam suksesi kepemimpinan. Ada sekitar dua belas syarat disebutkannya dalam buku itu, antara lain;(1) lengkap anggota badannya (2) mempunyai daya faham yang baik (3) intelektual (4) cakap dalam mengemukakan argumentasi sehingga mudah dipahami rakyat (5) cinta pendidikan dan ilmu pengetahuan (6) tidak tamak, bukan pemabuk, dan pezina (7) cinta kejujuran dan pembenci kebohongan (8) berjiwa besar dan berakhlaq karimah (9) tidak mengutamakan kemegahan dan kemewahan (10) pecinta

keadilan dan benci kezaliman (11) tanggap terhadap penegakan hukum berkeadilan (12) istiqamah dan berani menjalankan kebenaran.

Dunia sudah mafhum tentang beberapa pejabat, bupati atau mantan pejabat di Sumut ini menjadi tersangka dan ada yang sudah mendekam di penjara karena tersangkut kasus korupsi. Fenomena ini sangat jelas menerangkan bahwa moralitas sedang absen mengisi kehidupan kemasyarakatan kita. Moralitas tidak dikedepankan oleh pejabat-pejabat itu, bahkan tanpa mengukur kewarasan ada kalangan yang menggadag-gadag mantan napi koruptor untuk maju sebagai cagub. Seolah tak ada lagi tokoh yang lebih mulia akhlaknya.

Apa yang dimaktubkan Alfarabi tentang syarat-syarat menjadi pemimpin di atas terasa masih relevan dengan keadaan kekinian. Karena memang kepemimpinan moral inilah yang dapat diandalkan bagi perbaikan dan kemajuan masyarakat saat ini. Ketundukan masyarakat pada daulat modal dan daulat penggombal hanya akan menggenapkan garis lingkaran sesat kehidupan. Daulat modal hanya akan melahirkan pemimpin bertipe Malin Kundang, pemimpin yang telah kita pilih yang hanya akan mendurhakai kita yang melahirkannya sebagai pemimpin. Daulat gombal yang kita menangkan hanya akan

membuat rakyat tak pernah siuman dari kepingsanan. Kita mesti mengembalikan martabat kemanusiaan melalui pengedepanan daulat rakyat berdasarkan nurani dan moralitas. Pilihan ini juga dapat dijadikan indikator kewarasan kita. Momentum Pilgubsu 2013 ini, saatnya moral memimpin!!!

#### **D. Balada Negeri Paralogy**

*Sekejam itu kau fitnahkan, tuduhan yang kau lemparkan,  
tenggelam aku dihasut dusta, tercemar diri ini... [Iwan,  
Penyanyi Pop Melayu 90-an)*

Petikan syair lagu di atas sebenarnya menggambarkan realitas cinta anak manusia yang diwarnai fitnah, hasut dan dusta. Ada banyak penyair satir lain yang mengenang keadaan seperti itu. Sehingga, benar atau salah tidak jelas tempatnya. Maka ada baiknya direfleksikan ke dalam realitas bernegara kita hari-hari belakangan ini.

Pada dekade pertengahan 80-an rezim orde baru tengah berada pada puncak represifnya; mereka dapat saja melakukan penindasan, intimidasi, penculikan aktivis, dan pelanggaran HAM lainnya. Penguasa saat itu telah mencampuradukkan apa yang dianggap salah oleh hukum dengan apa yang dianggap

salah menurut selera mereka. Ukuran benar salah ketika itu bukanlah agama atau norma hukum, tetapi menurut selera sabda pandito ratu, sabda penguasa.

Keadaan yang tidak jauh beda bahwa belakangan ini perhatian publik tertawan oleh kepungan pemberitaan mengenai pencalonan Kapolri, dalam prosesnya tidak lama kemudian calon tersebut ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Tak berselang lama, ibarat berbalas pantun Polri juga menetapkan empat komisioner KPK secara bergiliran sebagai tersangka. Publik bereaksi keras terhadap kondisi ini dan menyarankan Presiden mengambil langkah kongkrit menyelesaikan polemik ini. Resistensi ini secara umum diandaikan bahwa lakon pejabat publik ini berlawanan secara diametral dengan logika publik, mereka dibingungkan dengan apa dan siapa yang benar, apa dan siapa yang salah dalam hal ini. Opini-opini yang berkembang di media demikian liar, publik punya bahasa sendiri dalam menyatakan realitas tersebut, demikian halnya pemerintah juga memiliki hal yang sama. Keadaan seperti inilah yang disebut oleh Seorang filosof Francis Jean-François Lyotard dengan istilah paralogy yang berarti gerakan melawancara didirikan penalaran. Metode atau proses penalaran yang bertentangan aturan logika atau formula,

terutama penggunaan silogisme yang salah (kekeliruan formal). Secara psikologis, paralogy disebut sebagai sebuah gangguan penalaran ditandai dengan respons yang tidak pantas.

Dalam sebuah masyarakat post-industrial fungsi negara telah berubah. Kelas yang berkuasa tidak melulu politisi dalam pemahaman tradisional, tetapi juga termasuk pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi profesional, buruh, keagamaan, pegawai pemerintah atau swasta, guru, orang tua, kakak, teman, dan lain sebagainya. Pengambil keputusan bisa diperankan oleh siapa saja. Setiap individu dalam masyarakat saat ini berada dalam sebuah jaringan relasional yang semakin kompleks dan terus bergerak (*mobile*). Proses mobilitas inilah yang oleh Lyotard dicirikan sebagai "*perang argumen/pernyataan*" (*agonistic*). Setiap pernyataan (*move*) selalu berpengaruh terhadap setiap pemain dalam *language game* ini, apapun posisinya. Dengan permainan bahasa ini, beberapa yang nampak dihadapan kita adalah bahwa media kuning sedang berbendera biru, sedangkan media biru sedang berbendera merah, demikian seterusnya. Semuanya sedang memainkan petanda-petanda, warna-warna yang bisa direpresentasikan di dalamnya kepentingan masing-masing. Suatu partai yang dulu tampak Proletar sekarang terlihat



borjuis-elitis, yang tampak elitis sekarang terlihat merakyat, semua bermain dalam permainan bahasa, sesuai kepentingannya.

Dalam konteks polemik KPK-Polri hukum dianggap tidak lebih hanya permainan bahasa (language game). Kondisi seperti ini disebut oleh Julia Kristeva sebagai lebih dari permainan bahasa, bahkan ini merupakan abjeksi: suatu posisi moral yang terletak pada jurang terdalam (1980). Suatu ruang yang sunyi, pengap dan gelap. Baudrillard dalam wacana simulasi, manusia mendiami ruang realitas, di mana perbedaan antara yang nyata dan fantasi, yang asli dan palsu sangat tipis. Lewat televisi, film dan iklan dunia simulasi tampil sempurna. Ruang yang tak lagi peduli dengan kategori-kategori nyata, semu, benar salah, referensi, representasi, fakta, citra, produksi atau reproduksi semuanya lebur menjadi satu dalam silang sengkabut tanda. Kesatuan inilah yang disebut dengan *simulacra* atau *simulacrum*, sebuah dunia yang terbangun dari sengkabut nilai, fakta, tanda citra dan kode (Jean Baudrillard: 1989).

Simulacra bertemu dengan kondisi masyarakat kini yang sudah menjadi masyarakat konsumtif, apapun, siapapun, dan dari manapun informasi dengan lahap dikonsumsi. Reaksi atas

proses ini yang kemudian menampakkan ragam ekspresi hidup manusia dalam mengemukakan kebenaran dan atau kesalahan. Celaknya, tidak banyak dari mereka yang memiliki daya seleksi yang ketat dan cenderung mengikuti budaya masal, mengikut trend. Jebakan sesat panggung simulacra adalah tidak pernah menunjukkan sesuatu yang sebenarnya, yang hakiki, dia tidak pernah bersifat hitam putih, mirip dengan teknologi elektronik visual yang menyediakan gambar dengan resolusi puluhan juta warna. Kapan merah menjadi merah, dan hitam menjadi hitam, seluruhnya tergantung kepada selera individu dalam menegaskannya lewat kata-kata. Tetapi apakah kata-kata itu merupakan yang sebenarnya? Belum tentu.

Dalam sejarah bernegara kita paralogy seperti balada yang permainannya berlangsung secara terus menerus. Bahwa apa yang dinyatakan salah oleh hukum belum tentu dianggap salah oleh penguasa, dalam level yang lebih serius bahkan apa yang dianggap salah oleh Tuhan, melalui wahyu-Nya, bisa jadi tidak salah menurut penganutnya. Apa yang dinyatakan benar oleh agama belum tentu dianggap benar oleh pengikutnya. Paralogy ini mirip dengan perilaku *talbis al-haqqa bi-l-bathil*, mengelabui kebenaran dengan kebathilan, suatu perilaku yang

dikecam keras oleh Tuhan. Talbis dilakukan oleh orang yang sudah mengerti, bukan orang yang tidak tahu.

Dalam panggung simulacra, sesiapa tokoh yang patut dipuja-puji adalah sesiapa yang rajin muncul di media populer, bukan di dunia nyata. Kebenaran massa adalah kebenaran menurut media.

Pilihannya ada pada kita, apakah sengaja ingin masuk dalam jebakan simulacra atau tidak. Sebagai pengikut Muhammad SAW yang membaiatnya sebagai nabi pejuang moral kaum Muslim tidak bisa melakukan abjeksi, yang meletakkan akhlak ke dalam jurang. Kyai AR Fachruddin, salah seorang tokoh Muhammadiyah, dalam setiap pengajiannya selalu mendengungkan doa “Allahum arina al haqqa haqqan wa urzuqna ittiba’ahu, wa arina al-bhatila bathilan wa urzuqna ijtinabahu”, ya Allah beritahulah kami bahwa kebenaran adalah kebenaran dan berikanlah kami rezeki mengikutinya, beritahulah kami bahwa kebathilan adalah kebathilan dan berilah kami rezeki menjauhinya.

Kata Iwan dalam reffrainnya, *Siapa benar siapa salah, mana sebenarnya yang salah?. jika benar tak kan salah yang bersalah kan tetap salah.*

## **E. Refleksi Kebangkitan Nasional: Apanya Yang Bangkit?**

Sejarah bangsa bisa menjadi *alarm* dalam konteks peringatan, tetapi lebih penting lagi mendalaminya sebagai ajang *historical reflection* (refleksi sejarah) untuk melakukan prognosa terhadap masa depan bangsa. Lewat petanda-petanda yang menyeruak ke ruang publik dan perjalanan bangsa kita saat ini, ada pertanyaan mendasar yang muncul; jadi apa bangsa ini 100 tahun ke depan?

Diagnosa sementara banyak dilakukan pemikir dan pengamat bahwa bangsa ini sedang mengalami kelumpuhan akut akibat terserang kanker syaraf otak karena para elit pemimpinnya gemar menebar citra dan pesona tanpa peka terhadap derita rakyatnya. Sementara rakyat tidak merasa memiliki tanah air Indonesia. Karena tanah, air, dan sumber daya alam yang sejatinya milik mereka, kini milik orang lain, milik bangsa asing. Sudah satu abad lebih kebangkitan itu dimulai. Bagaimana kita memandangnya secara optimis di tengah rendahnya loyalitas warga bangsa terhadap negaranya? Bagaimana memaknai kebangkitan nasional sekarang ini? Apanya yang bangkit?

### **Refleksi Sejarah**

Seratus tiga tahun lampau, lebih seabad lalu, beberapa mahasiswa antara lain Soetomo, Gunawan Mangoenkusoemoe, Gombrek, Saleh, dan Soeleman selalu mediskusikan dan memikirkan nasib bangsa yang sangat buruk, selalu dianggap bodoh dan tidak bermartabat oleh bangsa lain (Belanda). Mereka pun mencari solusi bagaimana cara memperbaiki keadaan yang amat buruk dan tidak adil itu. Diskusi Soetomo dan kawan-kawannya itulah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Boedi Oetomo. Sebuah gerakan berbasis kesadaran akan pentingnya kebebasan dan kemerdekaan bangsa dari penjajahan.

Selain kondisi terjajah, Boedi Oetomo juga lahir di antara maraknya perilakupara pejabat pangreh praja (pamong praja) yang kebanyakan hanya memikirkan kepentingan sendiri dan jabatan. Dalam praktiknya mereka pun tega menindas rakyat dan bangsa sendiri, misalnya dengan menarik pajak sebanyak-banyaknya untuk menyenangkan hati atasan dan para penguasa Belanda.

Gerakan Boedi Oetomo adalah gerakan yang alamiah dan sederhana. Deklarasi pendirian Boedi Oetomo tahun 1908 jauh dari hiruk pikuk kemewahan, dukungan, *show of force* lewat parade papan bunga yang menyemak di jalan, apalagi spanduk ataupun baliho. Namun, gerakan yang dibangun Boedi Oetomo

adalah gerakan substansial yang berhasil membangun kesadaran orang pribumi untuk cinta terhadap tanah air Indonesia, loyal terhadap bangsa-negara dan melawan penjajahan. Kelahiran Boedi Oetomo menyetuskan kesadaran kolektif tentang Indonesia sebagai negara bangsa. Melukiskan tekstur ke-Indonesia-an dalam ingatan kolektif, yaitu kebhinekaan yang bercitarasa kekeluargaan. Dari tekstur kemajemukan itulah lahir dan tumbuh nasionalisme.

Sebuah teladan yang hingga kini patut dilestarikan adalah perilaku para tokoh yang membidani kelahiran Boedi Oetomo begitu takzim mengumandangkan pembersihan ruang publik dari segenap ambisi yang bercorak privat. Mereka mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Karena para pendiri tersebut sadar betul bahwa dasar “mengada” kita sebagai bangsa adalah keragaman. Indonesia adalah rajutan aneka kebudayaan, sulaman dan untaian mutu manikam, lengkap dengan manik-manik zamrud khatulistiwa yang tidak bisa diperkosa oleh kepentingan segelintir golongan atas nama apapun.

Sekarang, kesadaran agung para pendiri Boedi Oetomo itu kehilangan relevansi dan resonansinya. Tak tampak lagi “budi” yang “utama”, nilai yang mengedepankan kepentingan publik

daripada pribadi. Kini, kenyataan hidup warga bangsa ini ditandai secara jelas oleh kebiasaan mereka untuk hidup bagi diri sendiri, mengutamakan keuntungan untuk diri sendiri, gemar mendusta dan tak hirau akan nasib orang lain. Kita hampir tidak dapat menghindar dari sikap memanipulasi, mengeksploitasi, dan menindas orang lain demi keuntungan diri sendiri. Inilah absurditas yang dibudidayakan terus oleh warga bangsa ini.

Keadaan ini semakin menjelaskan mengapa peringatan Kebangkitan Nasional setiap tahunnya dimaknai sesempit spanduk dan baliho, semangatnya hanya berhenti sebagai sekadar seremoni lapangan. Bagaimana mungkin orang-orang yang mengaku sebagai warga bangsa justru mengejawantahkan tindakan-tindakan nyata yang menjelaskan bahwa mereka tidak mengakui pentingnya berbagi dengan sesama mereka yang sebangsa, tidak memikirkan kepentingan seluruh warga bangsa, dan tidak berbuat nyata untuk kesejahteraan seluruh rakyat?"

Perilaku *ananiy* (menikmati diri sendiri) itu terlihat jelas dalam kebiasaan mengorupsi uang yang mestinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Lihat juga kebiasaan pejabat memperkaya diri sendiri melalui jabatan publik. Padahal sesungguhnya kekuasaan itu adalah amanah yang diberikan



oleh rakyat kepadanya untuk digunakan demi menyejahterakan rakyat. Lihat pula naifnya kebiasaan mempraktikkan nepotisme dalam berbagi rezeki, kesempatan, dan jabatan, serta dalam kebiasaan memperlakukan orang-orang tertentu sebagai "orangku" atau "orang-orang kita" sembari memperlakukan orang-orang lain sebagai "bukan kelompokku" atau "bukan orang kita".

Lebih miris lagi, sikap seperti ini tumbuh subur di kalangan pejabat dan pegawai negeri. Tak ada nasionalisme, apalagi wawasan kebangsaan. Yang ada "aku" dan "kelompokku". Orang lain? Masa bodoh. Kini ide dan semangat kebangkitan nasional, tampak usang dan renta. Barangkali disebabkan kalah popularitas dengan politik citra yang memang sedang naik daun. Padahal Soetomo cs yang juga pamong praja (bekerja untuk pemerintahan Belanda) telah meneladankan satu kata "Tanah Air Indonesia". Khidmah untuk bangsa.

Yach...bangsa ini benar-benar mengalami kanker syaraf. Penyakit itu menyerang otak di kepala. Kepala (pemimpin) yang sakit akan menyebabkan kelumpuhan hampir seluruh badan. Keadaan semakin memburuk, dan masing-masing anggota tubuh berebut nutrisi yang tersisa hanya sekedar untuk *survive*. Segera terjadi anak bangsa suka memakan kawan lainnya, meneror dan mengebom warganya, anak membunuh

ibunya, tetangga mencurigai tetangganya, pejabat mengorupsi hak rakyatnya, para elit memiskinkan rakyatnya. Kalau begitu, apanya yang bangkit?

## **F. Nasib Angelina Nasib Bunga**

Apa yang terpikirkan ketika melihat perjalanan hidup seorang manusia mencapai titik puncak kegemilangan? Tentulah kejadian itu membuat suasana pikiran dan batin mengharu-biru. Sebab, dalam kehidupan berliku tidak banyak orang dapat berjalan mulus sampai dengan apa yang menjadi cita-cita tercapai. Banyak orang yang salut, memuji, mau berteman. Lalu apa pula yang terpikirkan ketika melihat kehidupan begitu menyakitkan, petaka, kejatuhan, terhina dan kehilangan martabat kemanusiaan datang silih berganti? Apa ada yang mau berteman, memuji dan menghargai?

### **Angelina bak Bunga**

Siapa pula yang tidak cemburu melihat kehidupan sosok Angelina Sondakh yang aduhai. Lahir dari keluarga terhormat dan disegani. Di usianya yang muda-mapan karirnya cemerlang, harta melimpah, jabatan yang meninggikan marwah, dikelilingi para pemuja, lengkaplah sudah. Ibarat musim bunga tiba, Angelina indah berseri-seri, mempesona pemujanya tak terperi.

Tak banyak anak muda Indonesia yang bernasib mujur seperti ini. Banyak kalangan muda masih dalam tahap bermimpi untuk menjadi kaya dan sukses. Sebagian besar lagi merasa perlu mengikuti training motivasi jadi pemuda kaya, mengikuti seminar-seminar yang memberikan pengetahuan bagaimana memburu harta sebanyak-banyaknya di dunia ini. Sampai ada jargon “muda kaya, tua bahagia, mati masuk surga”. Angelina tidak sesulit itu mendapatkan apa yang diimpikan banyak pemuda Indonesia. Ia melesat tinggi melangit dalam pusaran sosialita kekuasaan.

Namun, seperti rumus alam tentang bunga, musim bunga tak pernah lama. Musim semi segera menjadi musim gugur. Angelina bak bunga. Ia cantik dan kaya, mantan puteri Indonesia, anggota DPR, pejabat teras Partai Demokrat, partai berkuasa. Tetapi dalam kurun waktu yang singkat pula, ia menyusul teman tampannya, Nazaruddin, yang menjadi tersangka kasus Wisma Atlet. Sejak pertengahan 2011 nama Angelina disebut-sebut oleh media dan menjadi bulan-bulanan media dan publik. Bahkan beberapa media menyebutnya sebagai wanita paling tenar Indonesia tahun 2011. Perbincangan mengenainya bergerak liar, hingar-bingar tak berkesudahan. Keelokan puteri Indonesia ini segera terkena polusi limbah politik yang membaluti hidupnya. Petaka demi

petaka seperti tak henti menyertainya, sejak meninggalnya Adji Massaid (Anggota DPR-RI), sang suami tercinta. Angie, panggilan akrabnya, melewati hari-hari tak pasti yang tak seorangpun mengerti kapan semua itu berakhir. Racun opium politik membuatnya linglung dan sesat di jalan yang benar.

Politik sebenarnya merupakan jalan benar yang mulia, jalannya para Nabi dan filsuf demi tujuan mulia *mashlahat ar-raiyah*, kemashlahatan rakyat. Berpolitik sesungguhnya mengimplementasikan nubuat Nabi Muhammad SAW; sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Politik itu bukan najis, tetapi ia dapat menjadi *mutanajjis* (terkena najis) karena orang-orang bejat sengaja meletakkan kotoran padanya.

Gumpalan limbah kekuasaan bisa saja melumeri, membaluri para pelakunya, dan sering tak terhindarkan. Orang susah mencari titik suci dalam politik kekinian. Para agamawan atau kalangan santri dan ulama yang terjun ke dunia politik praktis belakangan ini seperti tidak dapat berbuat apa-apa, tak lebih hanya ibarat *air musta'mal*, air yang digunakan karena kesuciannya, tapi tak dapat mensucikan.

Demikianlah yang terjadi pada Angelina Sondakh. Ia tak dapat menghindar dari hukum “silau” politik kekuasaan; korupsi.

Narasi kehidupan Angelina ini adalah satu dari sekian banyak pengalaman orang lain. Peristiwa ini mengingatkan saya pada tembang Melayu lawas “Nasib Bunga”. Kurang lebih syairnya begini; *“bila musim bunga tiba, halamanku indah berseri, tumbuh bunga indah mempesona hati riang tak terperi. Bila musim gugur tiba bunga jatuh di bumi juga, hatikupun iba melihatnya, nasib bunga tiada lama.”*

Senada dengan syair tembang di atas, seorang pujangga masyhur sekaligus filsuf beraliran realisme, Sutan Takdir Alisyahbana, mengatakan bahwa kehidupan manusia di dunia ini seperti sekuntum bunga. Dalam waktu yang singkat bunga ditanam, tumbuh, berkembang-berbunga, semerbaknya harum menyeruak ke alam sekitarnya, kemudian segera layu jatuh ke bumi. Semua proses itu berlangsung cepat, saking singkatnya, petuah Jawa kuno mengatakan *“Urip Mung Mampir Ngombe”*. Hidup manusia ini hanya mampir minum saja. Kemewahan dunia ini hanya sementara, seperti musafir yang kehausan tiba-tiba berhenti di padang pasir karena menemukan mata air. Kehausannya mereda sebentar tak menghilangkan hakikat dahaga.

**Boleh saja**

Tak bolehkah kita menikmati hidup yang singkat ini? Mumpung sebentar apa salahnya kita buat kesenangan, mumpung kaya, mumpung berkuasa? Kata bang Haji Rhoma Irama semua boleh saja. Ini tersurat dalam dalam syair lagunya berjudul “*Boleh saja*”. Lagu itu memuat narasi kehidupan manusia di dunia yang melenakan. Kemilau dunia boleh saja dinikmati tetapi harus ingat bahwa suatu saat manusia akan meninggalkannya. Berbuatlah apa yang anda suka tapi ingat suatu saat semua itu akan ada balasannya. Baik atau jahat, lurus atau sesat, semua terserah manusia. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati, tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah jangan sampai dipedaya olehnya. Demikian senandung Rhoma.

Cara manusia menyikapi hidup di dunia ini memang susah ditertibkan. Manusia sering mengingkari fitrahnya sebagai makhluk suci pilihan Allah SWT yang diberikan fasilitas memelihara dan memanfaatkan isi dunia ini untuk kebajikannya. Nabi Muhammad SAW dengan nada “menyerah” pernah berkata: “*’Isy maa syi’ta fainnaka mayyitun, wahbib maasyi’ta fainnaka mufaariquhu, wa’mal maa syi’ta, fainnaka majziyyun bihi, wa I’lam anna syarfa al-mu’min qiyamuhu bi al-lail, waizzuhu istighnaa’uhu ani an-naas* (Hiduplah sesukamu maka sesungguhnya kamu akan mati, sukailah sesuatu sesukamu

maka sesungguhnya kau akan terpisah darinya, dan berbuatlah sesukamu maka sesungguhnya kamu akan mendapatkan balasan dari perbuatanmu. Kehidupan kemuliaan seorang mukmin itu mendirikan malamnya dengan bersimpuh, menyungkur di hadapan Allah SWT sang Penguasa Semesta. Sementara kemuliaan manusia adalah ketika diletakkan dari manusia lainnya baik dari segi harta dan jabatan ia tetap sederhana dan menganggap semua hanya amanah dari Allah yang harus dipertanggung jawabkan suatu hari nanti)".

Rumus kehidupan itu mudah ditebak. Kehidupan hanya memiliki dua nilai yang saling bertentangan; positif-negatif, bahagia-derita, kaya-miskin, atas-bawah, dan seterusnya. Persoalannya hanya terletak pada seberapa besar munculnya kesadaran kemanusiaan dari semua peristiwa yang terjadi. Ketika manusia dalam keadaan bahagia atau dalam derita. Ketika manusia lebih kaya dari lainnya, ketika manusia lebih kuat dari lainnya. Seberapa besarkah manusia menyadari semua itu sebagai ujian kemanusiaannya? Untuk memunculkan kesadaran itu kita tak perlu menunggu Tuhan turun dari langit, cukuplah peristiwa dan narasi kehidupan menjadi *i'tibar* untuk menghadirkan rasa bertauhid, motivasi ber-Tuhan di dalam kemanusiaan kita. Sehingga kita tak gelap mata. "*Kini sadarlah*



*kau bunga, kau mekar banyak yang memuja, bila layu engkau  
tak berharga. Nasib bunga tiada lama.”*

## Daftar Bacaan

- Al-Farabi. (1995). *Ara'ahl al Madinah al Fadhilah wa Mudhadatuha*.
- Dhakidae, D. (2004). Partai-partai Politik, Demokrasi, dan Oligarki. *Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program*. Kompas Peberbit Buku Kompas, Jakarta, Februari.
- Mujani, S. (2007). *Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pepinsky, T. B., Liddle, R. W., & Mujani, S. (2012). Testing Islam's political advantage: Evidence from Indonesia. *American Journal of Political Science*, 56(3), 584-600.
- Riza, F. (2011, November). The Involvement of Ulama in the Medan Mayoral Elections of 2010. In *Paper for the International Workshop on Muslim Religious Authority in Contemporary Asia*, Asia Research Institute, National University of Singapore, Singapore (pp. 24-25).
- Riza, F. (2014). Contesting the Space in Indonesia: A Case From Al-Washliyah in North Sumatra. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 10(2), 149-162.
- Sean, M. (2006). The Hidden History of Realism: A Genealogy of Power Politics.
- Smith, B. C. (1998). Local government and the transition to democracy: a review article. *Public Administration and Development: The International Journal of Management Research and Practice*, 18(1), 85-92.
- Smith, B. C. (1998). Participation without power: Subterfuge of development?. *Community Development Journal*, 33(3), 197-204.
- Voss, K., & Sherman, R. (2000). Breaking the iron law of oligarchy: Union revitalization in the American labor movement. *American journal of sociology*, 106(2), 303-349.

Wanto, A. (2012). The Paradox Between Political Islam and Islamic Political Parties: The Case of West Sumatera Province. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 50(2), 329-368.

Wertheim, W. F. (1959). Indonesian society in transition: A study of social change. Hague: W. Van Hoeve, 1964 [c1956].

Winters, J. A. (2011). Oligarki. *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*.

Noer, D. (1982). *Gerakan Moderen Islam di Indonesia, 1900-1942*. LP3ES= Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

Noer, D. (1973). *The modernist Muslim movement in Indonesia, 1900-1942*. Oxford University Press.

Noer, D. (1987). *Partai Islam di pentas nasional, 1945-1965*. Grafitipers.

Reid, A. (2014). *The blood of the people: revolution and the end of traditional rule in northern Sumatra*. NUS Press.

Hasan, N. (2009). The making of public Islam: piety, agency, and commodification on the landscape of the Indonesian public sphere. *Contemporary Islam*, 3(3), 229.

Noorhaidi, H. (2009). Islamist Party, Electoral Politics and Da 'wa Mobilization among Youth: The Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia.

Hasan, N. (2000). In search of identity: the contemporary Islamic communities in Southeast Asia. *Studia Islamika*, 7(3).